

Lampiran
Keputusan *Pasamuhan* Agung II MDA Bali Tahun 2021
Nomor : 03/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021
Tentang : Pedoman *Penyuratan Awig-Awig* Desa Adat

PEDOMAN

PENYURATAN AWIG-AWIG

DESA ADAT DI BALI



MAJELIS DESA ADAT (MDA)

PROVINSI BALI

TAHUN 2021

PEDOMAN PENYURATAN *AWIG-AWIG* DESA ADAT DI BALI

**Disusun
Majelis Desa Adat Provinsi Bali
2021**

BUKU SATU

**TINJAUAM UMUM DESA ADAT DI BALI,
AWIG-AWIG, DAN TATA CARA PENYURATAN
AWIG-AWIG DESA ADAT DI BALI**

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak Seminar Hukum I, tentang “Pembinaan *Awig-Awig* Desa Dalam Tertib Masyarakat”, yang dilaksanakan tanggal 8-9 September 1969, oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Propinsi Bali, telah diterbitkan beberapa buku yang dapat dijadikan penuntun dalam penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat di Bali.

Buku pertama (stensilan) dikeluarkan oleh Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar, 1970 berjudul “*Pembinaan Awig-Awig Desa dalam Tertib Masyarakat*”. Penulisan *Awig-Awig* Desa Adat di Bali dewasa ini mengacu kepada buku “*Pedoman/Teknis Penyusunan Awig-Awig Dan Keputusan Adat*”, yang dikeluarkan Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali, 2002. Kemudian terbit buku berjudul *Penuntun Penyuratan Awig-Awig* yang disusun oleh Wayan P. Windia (1997). Buku sejenis terbit tahun 2011. Judulnya *Penuntun Penyuratan Awig-Awig: Contoh Awig-Awig Tertulis Desa Pakraman Tanah Aron, Kabupaten Karangasem*, disusun oleh I Ketut Sudantra, Wayan P. Windia, dan Putu Dyatmikawati.

Tahun 2019, terjadi perubahan terhadap status, kelembagaan, dan tata kelola Desa Adat di Bali, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Selanjutnya disebut Perda Desa Adat di Bali 2019). Status hukum Desa Adat yang sebelumnya kurang jelas, dibuat menjadi jelas, yaitu sebagai subjek hukum. Kelembagaan di Desa Adat juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi Bali terkini. *Prajuru* Desa Adat kini didampingi *Sabha* Desa dan *Kerta* Desa. Juga dibentuk sejumlah *Paiketan* yang berada di bawah naungan Desa Adat, seperti *Paiketan Krama Istri*, *Paiketan Pamangku*, *Paiketan Sekaa Teruna/Yohana*, dan lain-lain. Perubahan lainnya tampak pada sektor peningkatan kualitas kesejahteraan/ekonomi dengan

membentuk *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat, yang disingkat BUPDA, di samping Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dirintis sejak tahun 1984. Selain itu, status warga desa juga diperjelas menjadi *Krama* Desa Adat, *Krama tamiu*, dan *tamiu*.

Adanya perubahan terhadap status hukum, kelembagaan, dan tata kelola Desa Adat di Bali, sesudah berlakunya Perda Desa Adat di Bali 2019, perlu direspons dengan perubahan atau penyesuaian *Awig-Awig* Desa Adat dengan Perda Desa Adat di Bali 2019. Dalam hubungan dengan perubahan atau penyesuaian *Awig-Awig* Desa Adat, Pasal 4 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali menentukan sebagai berikut.

- (1) *Awig-Awig* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus disusun berdasarkan pedoman penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh MDA Provinsi difasilitasi oleh Dinas.

Beberapa buku pedoman penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat, seperti telah disebutkan di atas, sudah ketinggalan zaman alias jauh dari spirit Perda Desa Adat di Bali 2019. Di lain pihak, sampai sekarang belum ada buku pedoman penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat, seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Itulah antara lain yang melatarbelakangi Majelis Desa Adat Provinsi Bali mengambil inisiatif untuk menyusun buku Pedoman Penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat di Bali, yang kemudian ditetapkan dalam *Pasamuhan* Agung II MDA Bali, 27-28 Oktober 2021.

Dasar Hukum

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar penyusunan buku *Penuntun Penyuratan Awig-Awig* Desa Adat di Bali. Apabila

dasar hukum yang dimaksud diurut mulai yang tertinggi sampai yang terendah, gambarannya adalah sebagai berikut.

1. Pasal 18B dan Pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat;
13. Deklarasi Pembentukan MDA di Bali dalam *Paruman Agung I*, pada *Anggara (Selasa) Pon, Langkir*, tanggal 6 Agustus 2019, bertempat di Wantilan Pura Samuhan Tiga, Desa Adat Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

14. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2020.

Dari deretan dasar hukum di atas, berikut dijelaskan beberapa ketentuan yang secara spesifik menegaskan perlunya dan sekaligus memberikan dasar hukum secara langsung bagi penyusunan Buku Pedoman ini.

1. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ditentukan bahwa setiap Desa Adat memiliki *Awig-Awig* dan *Pararem*. Setiap Desa Adat juga diwajibkan menyuratkan *Awig-Awig* dan *Pararem*-nya. Selanjutnya, dalam Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 ditentukan bahwa tata cara penyuratan *Awig-Awig* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. *Awig-Awig* Desa Adat tidak hanya wajib disuratkan dan disahkan dalam *Paruman* Desa Adat, melainkan juga harus didaftarkan oleh *Prajuru* Desa Adat ke perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat, dalam hal ini Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Tatacara pendaftarannya diatur dalam Peraturan Gubernur.
2. Peraturan Gubernur yang dimaksud oleh Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Dalam Peraturan Gubernur ini, tatacara penyuratan *Awig-Awig* diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Berdasarkan ketentuan Pasal 4, *Awig-Awig* Desa Adat harus disusun berdasarkan Pedoman Penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat yang disusun oleh Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang difasilitasi oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat.
3. Kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 kepada MDA Provinsi sesuai dengan tugas dan wewenang MDA yang ditentukan oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 ditentukan bahwa MDA Provinsi mempunyai tugas mendampingi Desa Adat dalam penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat. Tujuan pendampingan itu, antara lain, agar Desa Adat

dalam melaksanakan wewenangnya di bidang pengembangan hukum adat (*Awig-Awig* dan *Pararem*), tidak saja berdasarkan *desa mawacara*, melainkan juga harus sesuai dengan asas *Bali mawacara* (lihat: Pasal 24 huruf h). Asas *desa mawacara* memberi wewenang kepada Desa Adat untuk membuat aturan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat, sedangkan asas *Bali mawacara* menghendaki adanya kesamaan hukum adat yang berlaku di Bali. MDA Provinsi Bali memiliki kewenangan menentukan hukum adat yang berdasarkan *Bali mawacara*. Hal itu sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, khususnya Pasal 76 ayat (2) huruf a yang menentukan bahwa MDA Provinsi Bali mempunyai wewenang menemukan, merumuskan, dan menetapkan kesatuan tafsir terkait dengan adat-istiadat dan Hukum Adat Bali. Setiap kesatuan tafsir mengenai hukum adat Bali dirumuskan dalam Keputusan *Pasamuhan* Agung MDA Bali. Desa Adat di seluruh Bali harus taat dan patuh dengan segala Keputusan *Pasamuhan* Agung MDA Bali.

4. Dalam Pasal 14, Pasal 19, dan Pasal 23 Anggaran Dasar (AD) Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Tahun 2020, masing-masing mengenai tugas dan wewenang Pengurus Harian MDA Provinsi Bali, tugas dan wewenang Pengurus MDA Kabupaten/Kota, tugas dan wewenang Pengurus MDA Kecamatan juga diatur mengenai ketentuan senada. Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa tugas MDA, antara lain: (a) mengayomi, membina, dan mengembangkan adat, tradisi, budaya Bali; (b) memberikan saran, usul, dan pendapat/pertimbangan mengenai masalah-masalah adat dan kearifan lokal kepada Pemerintah Daerah serta berbagai pihak, baik perseorangan, kelompok, maupun lembaga; (c) mendampingi Desa Adat dalam penyuratan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem*; (d) melaksanakan penyuluhan adat istiadat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat adat Bali secara menyeluruh.

Hal ini sekaligus sebagai konsekwensi yuridis dari kesepakatan seluruh Desa Adat di Bali sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi Pembentukan Majelis

Desa Adat, yang lahir dalam *Paruman* Agung Desa Adat se Bali di Wantilan Pura Samuan Tiga, pada *Anggara* (Selasa) *Pon, Langkir*, tanggal 6 Agustus 2019. Dalam *Deklarasi Samuan Tiga* tersebut, seluruh Desa Adat se-Bali bersepakat bulat bersama-sama, setia, patuh dan taat serta seia-sekata, *gilik saguluk, para-sparo, salunglung sabayantaka sarpana ya* membentuk Majelis Desa Adat sebagai persatuan (*pasikian*) Desa Adat seluruh Bali.

Selain itu, adanya *Buku Pedoman Penyuratan Awig-Awig Desa Adat* yang disusun oleh MDA Provinsi Bali juga sangat penting dikaitkan dengan proses pendaftaran *Awig-Awig* Desa Adat ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Menurut ketentuan Pasal 6 huruf d dan ketentuan Pasal 13 huruf d, dalam proses pendaftaran *Awig-Awig* ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat harus dilengkapi surat keterangan MDA Provinsi yang menyatakan bahwa *Awig-Awig* Desa Adat telah disusun dan ditulis sesuai dengan pedoman penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat.

Tujuan

Buku Penuntun Penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat di Bali ini disusun dengan tujuan:

1. Tersedianya buku Penuntun Penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat di Bali.
2. Terbantunya jajaran Majelis Desa Adat di Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dan Desa Adat di Bali dalam mengetahui, mengerti, dan memahami beberapa pengertian dasar yang berhubungan dengan usaha penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat di Bali.
3. Terlaksananya tugas pembinaan dan/atau pendampingan oleh Majelis Desa Adat di Bali dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali beserta instansi lain yang terkait, dengan lebih mudah dan lebih baik, pada waktu melakukan pendampingan penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat di Bali.

Manfaat

1. Memudahkan bagi warga/*Krama* Desa Adat, *Prajuru* Desa Adat, dan masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan buku "Penuntun Penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat".
2. Memudahkan bagi jajaran Majelis Desa Adat di Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dan Desa Adat di Bali dalam mengetahui, mengerti, dan memahami beberapa pengertian dasar yang berhubungan dengan usaha penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat di Bali.
3. Memudahkan bagi Majelis Desa Adat di Bali dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali beserta instansi lain yang terkait saat melaksanakan tugas pembinaan dan/atau pendampingan penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat di Bali.

Proses Penyusunan

Penyusunan buku Penuntun Penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat di Bali ini dilaksanakan oleh tiga tim penyusun yang dituangkan dalam Surat Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor:03/SK-TIM/MDA-PBali/X/2020 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENYELARAS DRAF NASKAH PEDOMAN PENYURATAN *AWIG-AWIG* DAN PENYURATAN *PARAREM* DESA DESA ADAT Tanggal 23 Oktober 2020. Masing-masing tim penyusun dan penyelarar terdiri atas beberapa orang, seperti di bawah ini.

Tim Penyusun Buku Satu (Tinjauan Umum Desa Adat Di Bali, *Awig-Awig*, dan Tata Cara Penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat di Bali), Prof. Dr. Wayan P. Windia, Dr. I Ketut Sudantra,SH., MH dan Dr. Putu Dyatmikawati, SH., M.Hum.

Tim Penyusun Buku Dua (Contoh Sistematika *Awig-Awig* Desa Adat di Bali Disertai Beberapa Catatan) dan Buku Tiga (Tentang *Pararem*) terdiri atas I Gede Putu Wardana, SH., MM., Dr. Drs I Made Wena, M.Si, Dr. Drs. I Gusti Made Ngurah, M.Si, Dr. Ir. Luh Riniti Rahayu, M.Si, I Ketut Madra, SH., MM, Drs. I Gede Nurjaya, M.M, Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, SH., MH, Dr. I Wayan

Bagiarta, SH., MH, I Ketut Alit Suardana, SH, Dr. I Gde Marhaendra Wija Atmaja, SH., M.H., Dr. Dra. I Gusti Ayu Diah Yuniti, M.Si.

Selain berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Tim Penyusun juga bekerja berdasarkan petunjuk dan/atau pengarahannya dari *Bandesa Agung* dan *Panyarikan Agung* Majelis Desa Adat Provinsi Bali, baik dalam hubungan dengan substansi buku penuntun maupun tenggang waktu penyusunan buku yang disediakan.

Berdasarkan Surat Keputusan dan pengarahannya tersebut, selanjutnya Tim Penyusun mulai melakukan penelitian pendahuluan guna mengumpulkan bahan hukum sebagai persiapan menyusun rancangan buku Penuntun Penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat di Bali. Melalui penelitian pendahuluan berhasil ditemukan sejumlah referensi, seperti: buku-buku tentang Hukum Adat Bali, buku-buku tentang Desa Adat di Bali, dan sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan *Awig-Awig* Desa Adat di Bali. Selain itu juga berhasil ditemukan sejumlah contoh *Awig-Awig* Desa Adat di Bali, baik yang disusun/disuratkan sebelum dan sesudah tahun 1986 dan sesudah tahun 2001. Untuk pengayaan, Tim Penyusun juga membaca sejumlah *Awig-Awig* tertulis yang disusun sebelum Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Bahan-bahan itulah yang dijadikan sumber dan/atau inspirasi dalam penyusunan buku Penuntun Penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat di Bali.

Sesudah rancangan buku dirasa cukup, dimintakan pendapat dan masukan kepada beberapa orang yang diketahui memiliki perhatian terhadap Desa Adat di Bali, Hukum Adat Bali, dan *Awig-Awig* Desa Adat di Bali. Rancangan buku kemudian diserahkan kepada Pengurus Harian Majelis Desa Adat Provinsi Bali untuk kembali mendapatkan masukan. Revisi terakhir dilakukan berdasarkan masukan dari peserta *Pasamuhan Agung* Majelis Desa Adat Bali yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 2021.

BAB II

DESA ADAT DI BALI

Desa Adat

Desa Adat di Bali merupakan salah satu bentuk kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial. Di samping kesatuan masyarakat hukum adat teritorial (Desa Adat), di Bali juga terdapat kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis, yaitu perkumpulan *dadia/panti*; dan kesatuan masyarakat hukum adat fungsional, yaitu subak. Desa Adat di Bali sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Pada zaman Bali Kuna, Desa Adat disebut *thani*, *banua* atau *banwa*.

Pengertian yuridis pertama mengenai Desa Adat dapat ditemui dalam Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Dalam Peraturan Daerah ini Desa Adat didefinisikan sebagai *desa dresta* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata *Krama* pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kayangan Tiga atau Kayangan Desa, yang mempunyai wilayah tertentu serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri". (Pasal 1 a Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor: 06 tahun 1986).

Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yoncto Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa *Pakraman*, sebutan "Desa Adat" diganti dengan "Desa *Pakraman*". Desa *Pakraman* didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata *Krama* pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. (Pasal 1 nomor urut 4

Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yoncto Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, tentang Desa *Pakraman*).

Pada tahun 2019, Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yoncto Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa *Pakraman* diganti berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. (Selanjutnya disebut Perda Desa Adat di Bali 2019). Desa Adat dalam Perda Desa Adat di Bali 2019 didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata *Krama* pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. (Pasal 1 nomor urut 8 Perda Desa Adat di Bali 2019).

Berdasarkan beberapa definisi, seperti dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa Desa Adat di Bali, merupakan organisasi masyarakat Hindu Bali yang berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan spiritual keagamaan yang paling mendasar bagi pola hubungan dan pola interaksi sosial masyarakat Bali. Atau dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa sebuah Desa Adat, akan terdiri atas tiga unsur (unsur pokok Desa Adat), yaitu:

1. Unsur *parahyangan*, yaitu tempat suci umat Hindu dan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan agama Hindu.
2. Unsur *pawongan*, yaitu warga desa yang beragama Hindu.
3. Unsur *palemahan*, yaitu wilayah Desa Adat yang berupa *karang ayahan desa* dan *karang gunakaya* yang diatur sesuai dengan agama Hindu. (Lihat juga Pasal 6 Perda Desa Adat di Bali 2019).

Mengacu kepada Perda Desa Adat di Bali 2019, Desa Adat mempunyai tugas mewujudkan *kasukretan* Desa Adat yang meliputi: ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *sakala* dan *niskala*. Salah satu kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul adalah pembentukan *Awig-*

Awig, Pararem, dan peraturan adat lainnya yang selanjutnya dipergunakan untuk mengatur tatanan kehidupan di Desa Adat.

Banjar Adat

Sebuah Desa Adat, ada yang hanya terdiri atas satu Banjar Adat. Dalam hal ini berarti Desa Adat sekaligus Banjar Adat. Ada juga yang terdiri atas beberapa Banjar Adat, dan bahkan ada yang terdiri atas puluhan Banjar Adat. Banjar Adat atau Banjar *Suka Duka* atau sebutan lain adalah bagian dari Desa Adat (Pasal 1 nomor urut 9 Perda Desa Adat di Bali 2019). *Mabanjar* berarti menjadi anggota banjar. Bale Banjar adalah bangunan (tempat pertemuan), yang dimiliki oleh satu Banjar Adat.

Dengan demikian menjadi semakin jelas bahwa organisasi Banjar berada di bawah Desa Adat dan *Prajuru Banjar/Kelihan Banjar* atau sebutan lain juga berada di bawah *Prajuru Desa Adat/Bandes* atau sebutan lain. Berdasarkan struktur ini, maka apabila Banjar berkehendak membuat *Awig-Awig Banjar*, wajib berkoordinasi dengan Desa Adat/*Bandes* agar *Awig-Awig Banjar* yang dibuat/disusun sesuai dengan *Awig-Awig Desa Adat* atau tidak bertentangan dengan *Awig-Awig Desa Adat*.

Tempekan

Kalau warga dalam satu Banjar Adat lumayan banyak dan *wewidangan* atau *wewengkon* (wilayah) Banjar Adat relatif luas, atas kesepakatan bersama, maka Banjar Adat dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang dinamakan *Tempekan*. Pemberian nama *Tempekan* biasanya disesuaikan dengan keadaannya. Contohnya, yang berada di wilayah bagian Utara, disebut "*Tempekan Kaja*" (*Kaja* = Utara), yang di selatan disebut "*Tempekan Kelod*" (*Kelod* = Selatan), dan lain-lain.

Tipe Desa Adat

Walaupun unsur Desa Adat di Bali sama, tetapi tipenya tidak sama. Pemahaman mengenai tipe Desa Adat ini penting karena berpengaruh terhadap keberadaan dan tanggung jawab *Krama* Desa Adat, *Prajuru* Desa Adat, dan juga tata kelola kekayaan (*padruwen*) Desa Adat. Berdasarkan tradisi dominan yang dimiliki, Tjok Raka Dherana (1995) mengklasifikasikan Desa Adat di Bali menjadi tiga tipe:

- (1) *Desa Bali Aga* (*Bali Mula* atau *Bali Kuna*), yaitu Desa Adat yang masih tetap menganut tradisi pra-Majapahit. Pada desa-desa adat seperti ini tidak dikenal adanya sistem kasta, perangkat pimpinan Desa Adat disebut *dulu-dulu desa*. Kebanyakan berada di sekitar Kintamani dan daerah pegunungan lain di Bali.¹
- (2) *Desa Apanaga*, yaitu Desa Adat yang sistem kemasyarakatannya sangat dipengaruhi oleh Majapahit, hukum yang berlaku mengikuti hukum Hindu yang diterapkan di Majapahit, yang bersumber pada *Manawadharmasastra*. Desa-desa ini umumnya terletak di daerah Bali dataran. Kepemimpinan pada Desa Adat tipe ini umumnya merupakan pola tunggal, disebut *Prajuru Desa*.
- (3) *Desa Anyar* (Desa Baru), yaitu Desa Adat yang terbentuk relatif baru, sebagai akibat adanya perpindahan penduduk (migrasi) dengan tujuan awal mencari penghidupan. Desa-desa seperti ini dapat ditemui di daerah Jembrana dan Buleleng Barat. Adakalanya desa ini ditempati oleh penduduk yang berasal dari desa yang sama. Contohnya, Desa Nusa Sari di Kabupaten Negara yang penduduknya berasal dari Nusa Penida.²

¹ Dalam Perda Desa Adat di Bali 2019, Desa Bali Aga (Bali Mula atau Bali Kuna), disebut Desa Adat Tua, sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 Perda Desa Adat di Bali Tahun 2019.

² Lebih jauh tentang tipe Desa Adat, baca juga Tjok Raka Dherana, 1995. *Desa Adat dan Awig-Awig dalam Struktur Pemerintahan Bali*. Denpasar, Upada Sastra. MPLA Dati I Bali, 1990. *Mengenal dan Pembinaan Desa Adat di Bali*. Denpasar, Proyek Pemantapan Desa Adat.

Perda Desa Adat 2019 juga mengakui keberadaan *Desa Bali Aga (Bali Mula/Bali Kuna/Bali Tua)*, seperti tertuang dalam Pasal 53 dan Pasal 54.

Pasal 53

- (1) Desa Adat *Tua* merupakan susunan masyarakat asli di Desa Adat tertentu di Bali yang memiliki sistem pemerintahan kolektif (*ulu apad*).
- (2) Desa Adat *Tua* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tata cara penetapan *Prajuru* atau *paduluan* berdasarkan:
 - a. garis keturunan; atau
 - b. *ririgan, ketekan* (urutan).
- (3) Susunan organisasi dan kelembagaan Desa Adat *Tua* mengikuti susunan asli, sistem pengelolaan *Parahyangan*, dan sistem kemasyarakatan *manut dresta* setempat.
- (4) Desa Adat *Tua* berwenang mengatur dan mengurus bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal sesuai dengan *dresta* setempat.

Pasal 54

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, pengaturan Desa Adat *Tua* berlaku *mutatis mutandis* dengan ketentuan Desa Adat.

Selain ketiga tipe Desa Adat seperti digambarkan di atas, sejalan dengan perkembangan tempat pemukiman penduduk di sekitar Desa Adat, kini juga muncul tipe lain Desa Adat, seperti Desa Adat yang berdampingan dengan kompleks perumahan atau Desa Adat berdampingan dengan "Banjar Dinas" tertentu yang ada karena alih fungsi lahan pertanian.

Pada waktu Desa Adat di Bali menyuratkan *Awig-Awig* sangat penting memperhatikan tipe Desa Adat seperti dikemukakan di atas agar penyuratan *Awig-Awig* tidak menghilangkan ciri khas (karakter) Desa Adat yang telah diwarisi secara turun-temurun dan juga tidak menimbulkan kegaduhan atau

permasalahan di Desa Adat. Sampai di sini perlu diingatkan kembali bahwa penyuratan *Awig-Awig* bertujuan menciptakan *kasukretan* atau kedamaian Desa Adat, dan bukan kegaduhan atau aneka permasalahan di Desa Adat.

Desa Adat di Bali sebagaimana tercantum dalam lampiran Perda Desa Adat di Bali 2019 berjumlah 1.493 Desa Adat. Rincian Desa Adat pada masing-masing Kabupaten/Kota di Bali tergambar seperti di bawah ini.

Data Desa Adat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2019

Nomor	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Adat
1	Buleleng	170
2	Jemberana	64
3	Tabanan	349
4	Badung	122
5	Denpasar	35
6	Gianyar	273
7	Bangli	168
8	Klungkung	122
9	Karangasem	190
	Jumlah	1.493

Otonomi Desa Adat

Desa Adat memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Hak dan kewenangan tersebut disebut otonomi asli karena tidak merupakan kewenangan pemberian, melainkan lahir dan tumbuh bersamaan dengan terbentuknya Desa Adat. Hak tersebut diakui oleh Negara melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

Istilah "*otonomi Desa Adat*" tidak ditemukan dalam batang tubuh Perda Desa Adat di Bali 2019, tetapi secara jelas disebutkan dalam konsideran menimbang dan penjelasan umumnya. Konsideran huruf a Perda Desa Adat di Bali 2019 menyatakan sebagai berikut:

"bahwa Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara"

Otonomi Desa Adat tersebut mencakup isi yang sangat luas, mencakup semua kewenangan Desa Adat, baik kewenangan Desa Adat berdasarkan asal-usul maupun kewenangan lokal berskala Desa Adat.

Secara terinci, Perda Desa Adat di Bali 2019 menyebutkan kewenangan-kewenangan Desa Adat tersebut dalam Pasal 24 dan Pasal 25. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul, meliputi:

- a. pembentukan *Awig-Awig, Pararem*, dan peraturan adat lainnya;
- b. penetapan perencanaan pembangunan Desa Adat;
- c. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
- d. pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- e. pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal;
- f. pengelolaan *Wewidangan* dan tanah *Padruwen* Desa Adat;
- g. pengelolaan *Padruwen* Desa Adat;
- h. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan asas Bali *Mawacara* dan *Desa Mawacara*;
- i. penetapan sistem organisasi dan pranata hukum adat;
- j. turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di *Wewidangan* Desa Adat;
- k. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban *Krama* di Desa Adat;

- l. penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat/*wicara* Adat yang bersifat keperdataan; dan
- m. penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat.

Kewenangan Desa Adat berskala lokal, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25, meliputi kewenangan untuk melakukan pengelolaan tempat suci dan kawasan suci; hutan adat; sumber-sumber air; *pasisi* dan *sagara*; *padruwen* Desa Adat/wilayah ulayat adat; pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; industri pangan dan kerajinan rakyat; pasar Desa Adat atau *tenten*; tambatan perahu; tempat pemandian umum; sanggar seni, budaya, dan *Pasraman*; *kapustakaan* dan taman bacaan; dan destinasi dan/atau atraksi wisata; sepanjang yang menjadi kewenangan Desa Adat

Dari kewenangan-kewenangan Desa Adat di atas, isi otonomi Desa Adat dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan untuk menetapkan aturan-aturan hukumnya sendiri, dalam bentuk *Awig-Awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat.
2. Kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasi yang bersifat sosial religius, seperti pelaksanaan pemerintahan, pengembangan dan pelestarian nilai agama, tradisi, adat dan hukum adat, seni dan budaya serta kearifan lokal; pengelolaan wilayah, milik dan dan harta kekayaan Desa Adat; dan lain-lain.
3. Kekuasaan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban Desa Adat; dan
4. Kekuasaan untuk menyelesaikan perkara-perkara adat.

Seperti digariskan oleh Pasal 18B ayat (2) UUDNRI 1945 di atas, otonomi Desa Adat bukanlah otonomi yang mutlak, melainkan semi-otonom, karena harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intinya, pelaksanaan otonomi Desa Adat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prajuru Desa Adat

Penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat dilakukan oleh *Prajuru*. Secara umum, istilah *Prajuru* menunjuk pada semua perangkat pimpinan yang mengurus organisasi tradisional Bali, seperti Desa Adat, *Subak*, *Sekaa*, *Dadya*, dan lain-lain. Itu sebab, dalam Pasal 1 angka 15 Perda Desa Adat di Bali 2019 dinyatakan bahwa "*Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat" yang dipimpin seorang *Bandes* atau *Kubayan* atau sebutan lain sesuai tradisi setempat dan tipe Desa Adat setempat. Dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Perda Desa Adat 2019, mengenai *Prajuru* Desa Adat diatur sebagai berikut.

Pasal 29

- (1) *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. *Bandes* Adat atau sebutan lain;
 - b. *Patajuh Bandes* Adat atau *pangliman* atau sebutan lain;
 - c. *Panyarikan* atau *juru tulis* atau sebutan lain; dan
 - d. *Patengen* atau *juru raksa* atau sebutan lain.
- (2) *Bandes* Adat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih oleh *Krama* Desa secara musyawarah mufakat.
- (3) *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, ditunjuk dan ditetapkan oleh *Bandes* Adat dalam *Paruman Sabha* Desa Adat.
- (4) *Pemilihan Bandes* Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penunjukan *Prajuru* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem*.
- (5) Masa jabatan *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* yang berlaku di Desa Adat setempat.
- (6) *Prajuru* Desa Adat melaksanakan tugas dan wewenang secara kolektif kolegial.

- (7) *Prajuru* Desa Adat dapat mengangkat staf administrasi umum dan keuangan sesuai kebutuhan.

Pasal 30

Tugas dan kewajiban *Prajuru* Desa Adat meliputi:

- a. menyusun rencana strategis dan program pembangunan Desa Adat;
- b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
- c. melaksanakan program pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui kegiatan *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*;
- d. melaksanakan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat;
- e. menyelesaikan perkara adat/*wicara* yang terjadi dalam *Wewidangan* Desa Adat;
- f. mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam *Wewidangan* Desa Adat sesuai dengan *susastra* agama dan tradisi masing-masing;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dalam *Paruman* Desa Adat.

***Krama* Desa Adat**

Tidak setiap orang yang berdomisili di Desa Adat dapat disebut *Krama* Desa Adat atau *Krama* Bali. Berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa *Pakraman* (MUDP) Bali, Nomor: 050/Kep/Psm-1/MDP Bali/III/2006, Jumat, 3 Maret 2006 tentang Hasil-hasil *Pasamuhan* Agung I MDP Bali, ditegaskan bahwa penduduk Bali dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: *Krama desa* (penduduk beragama Hindu dan *mipil* atau tercatat sebagai anggota di Desa *Pakraman*); *Krama tamiu* (penduduk yang beragama Hindu dan tidak *mipil* atau tidak tercatat sebagai anggota di desa *Pakraman*); dan *tamiu* (penduduk non-Hindu dan bukan anggota Desa *Pakraman*).

Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 1 Perda Desa Adat di Bali 2019 yang menentukan sebagai berikut. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *Mipil*, tetapi tercatat di Desa Adat setempat. *Tamiu* adalah orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat. *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan *Krama* Desa Adat.

Pengelompokan penduduk Bali (orang yang bertempat tinggal tetap di Desa Adat) menjadi golongan *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*, tujuannya bukan untuk mendiskriminasi golongan penduduk tertentu, melainkan justru untuk memudahkan dalam memberikan beban tanggung jawab (*swadharma*) yang sesuai dengan golongannya kepada masing-masing penduduk yang dimaksud. Maksudnya demikian.

1. Memberikan kesempatan kepada *Krama* Desa Adat yang memiliki beberapa tempat kediaman/domisili untuk memilih, apakah akan menjadi *Krama* Desa Adat di Desa Adat tempatnya berasal atau menjadi *Krama* Desa Adat di tempatnya berdomisili.
2. Menghindari adanya *Krama* Desa Adat yang melaksanakan tanggung jawab (*swadharma*) ganda/rangkap/*double* terhadap Desa Adat. Melaksanakan tanggung jawab di Desa Adat tempatnya berasal dan melaksanakan tanggung jawab di tempatnya berdomisili.
3. Memberikan beban tanggung jawab (*swadharma*) yang layak/patut kepada *Tamiu* yang berdomisili di Desa Adat. Dalam arti, seorang *Tamiu* yang berdomisili di Desa Adat tertentu, dibebaskan dari tanggung jawab di bidang *Parhyangan* Desa Adat, tetapi mereka wajib melaksanakan tanggung jawab tertentu di bidang *Pawongan* dan tanggung jawab tertentu di bidang *Pelemahan* Desa Adat tempatnya berdomisili.
4. Memudahkan dalam merumuskan dalam *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat terutama yang berhubungan dengan tanggung jawab

(*swadharma*) bagi masing-masing golongan penduduk yang berdomisili di Desa Adat.

Majelis Desa Adat di Bali

Di atas telah dikemukakan bahwa di Provinsi Bali terdapat 1.493 Desa Adat. Seluruh Desa Adat di Bali telah mendeklarasikan diri berada dalam satu wadah organisasi yang disebut Majelis Desa Adat (MDA). Deklarasi Pembentukan MDA di Bali dalam *Paruman Agung I*, pada *Anggara (Selasa) Pon, Langkir*, tanggal 6 Agustus 2019, bertempat di Wantilan Pura Samuhan Tiga, Desa Adat Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Pendeklarasian MDA di Bali dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 72 Perda Desa Adat 2019.

Pasal 72

- (1) MDA dibentuk oleh Desa Adat.
- (2) MDA merupakan persatuan (*pasikian*) Desa Adat sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah sesuai tingkatan, dalam bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, dan ekonomi adat.
- (3) MDA terdiri atas:
 - a. MDA tingkat Provinsi;
 - b. MDA tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - c. MDA tingkat Kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, masa jabatan, dan tata kerja MDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MDA.

Dimaksud Majelis Desa Adat [yang selanjutnya disingkat MDA] adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal

dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat (Pasal 1 nomor urut 24 Perda Desa Adat di Bali 2019).

Pengertian MDA dan struktur MDA sengaja dikutip sesuai aslinya untuk lebih menegaskan bahwa MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di Bali yang dibentuk melalui deklarasi Desa Adat di Bali, dan bukan oleh orang perseorangan atau institusi lain di luar Desa Adat di Bali. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi seluruh Desa Adat di Bali untuk menghormati, memberdayakan, dan mempertahankan MDA. Cara sederhana, antara lain, dengan menghormati dan melaksanakan setiap kesepakatan dan/atau keputusan yang telah diambil sesuai mekanisme organisasi MDA. Penegasan ini penting dikemukakan karena sampai sekarang masih ada pihak-pihak yang mempertanyakan keberadaan MDA dan ada juga beberapa Desa Adat di Bali yang bersikap lain terhadap keberadaan MDA di Bali.

Dalam hubungan dengan tata kerja MDA, khususnya tugas MDA, dalam Pasal 14 Anggaran Dasar MDA ditentukan bahwa *Pajuru* Harian MDA Provinsi Bali bertugas: (a) melaksanakan *Paruman Agung*, *Pasamuhan Agung*, dan *Paruman Madya*; (b) melaksanakan putusan *Paruman Agung* dan putusan *Pasamuhan Agung*; (c) mengayomi, membina, dan mengembangkan adat, tradisi, budaya Bali; (d) memberikan saran, usul, dan pendapat/pertimbangan mengenai masalah-masalah adat dan kearifan lokal kepada Pemerintah Daerah serta berbagai pihak, baik perseorangan, kelompok, maupun lembaga; (e) mendampingi Desa Adat dalam penyuratan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem*; (f) melaksanakan penyuluhan adat istiadat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat adat Bali secara menyeluruh; dan (g) menyelesaikan masalah-masalah strategis yang dihadapi oleh MDA Provinsi. Inilah yang dijadikan acuan oleh MDA Provinsi Bali dalam menyusun buku "Panduan Penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat di Bali".

Sesuai namanya, buku panduan, fungsinya hanya sebagai pemandu atau penuntun pada waktu Desa Adat di Bali menyuratkan *Awig-Awig*. Di samping itu

perlu juga diperhatikan unsur pokok Desa Adat di Bali yang terdiri atas unsur *parahyangan* (tempat suci umat Hindu dan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan agama Hindu); unsur *pawongan* (warga desa yang beragama Hindu); unsur *palemahan* (wilayah desa yang berupa *karang ayahan desa* dan *karang gunakaya* yang diatur sesuai dengan agama Hindu); serta nilai-nilai dan norma agama Hindu yang sebagian di antaranya telah dirumuskan dalam keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dalam bentuk kesatuan tafsir aspek-aspek tertentu dari ajaran agama Hindu. Selain itu peran Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (Dinas PMA) juga sangat penting untuk diperhatikan.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tugas menata Desa Adat di Bali melalui penyuratan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat, *kasukretan* Desa Adat di Bali dan masyarakat Bali pada umumnya, sesungguhnya bukan saja merupakan tugas MDA, melainkan wajib dilakukan secara terkoordinasi antara MDA di Bali, PHDI Provinsi Bali, dan Pemerintah Provinsi Bali.

BAB III

HUKUM ADAT, AWIG-AWIG, DAN TATA HUKUM NASIONAL

Hukum Adat dan Hukum Adat Bali

Sebagian aspek kehidupan masyarakat Bali masih diatur berdasarkan hukum adat dan sebagian lagi diatur berdasarkan hukum nasional. Yang dimaksud hukum adat adalah hukum Indonesia asli, yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana-sini mengandung unsur agama. Dengan demikian, hukum adat bukanlah hukum yang dibuat oleh Negara (Pemerintah), melainkan tumbuh, hidup, dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Di seluruh wilayah Indonesia terdapat beragam suku bangsa dengan tatanan masyarakatnya masing-masing yang beragam pula. Pada masing-masing suku bangsa tersebut berlaku hukum adat yang berbeda-beda. Itu sebab, norma hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah di Indonesia berbeda-beda, walaupun terdapat nilai-nilai dan asas-asas yang sama dan berlaku universal.

Hukum adat yang berlaku bagi masyarakat adat Bali (etnis Bali-Hindu) disebut Hukum Adat Bali. Dalam bahasa sehari-hari, istilah hukum adat Bali tidak terlalu lazim digunakan oleh masyarakat umum. Istilah yang lebih lazim adalah istilah *dresta*, yang secara umum dapat disinonimkan dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. *Dresta* (adat) sendiri meliputi tiga golongan *dresta*, yaitu *gama*, *sima*, dan *cara*. *Gama* adalah adat yang berisi nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman hidup seluruh masyarakat adat Bali. Nilai-nilai yang terkandung dalam *gama* kemudian diimplementasikan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pada masing-masing daerah di Bali. Karena situasi dan kondisi masing-masing daerah berbeda, maka terbuka peluang penerapan nilai-nilai dalam *gama* tersebut menjadi bervariasi atau berbeda-beda. Ketika penerapan nilai-nilai itu menjadi

ajeg pada setiap daerah, maka lahirlah *sima* yang diikuti dan ditaati oleh masyarakat di daerah itu, sehingga ada *Sima Karangasem*, *Sima Buleleng*, *Sima Bangli*, *Sima Klungkung*, *Sima Gianyar*, *Sima Badung*, *Sima Tabanan*, *Sima Jembrana*, dan seterusnya. Pada lingkup yang lebih sempit, kadang-kadang permasalahan konkret yang dihadapi masing-masing tempat (desa) berbeda-beda. Untuk menghadapi dan/atau menyelesaikan permasalahan konkret itu masing-masing tempat kemudian membuat aturan sendiri yang dirumuskan melalui *Paruman* atau *Pasangkepan* (rapat desa/banjar). Hasil *Paruman* ini disebut *Pararem*, sedangkan golongan *dresta* (adat) yang lahir dari *Pararem* ini disebut *cara*. Dari istilah *cara* inilah berkembang istilah *desa mawacara*, yang artinya setiap desa dapat membuat aturannya (*cara*) sendiri.

Tidak semua *dresta* (adat) merupakan hukum adat. Hanya aturan-aturan adat yang mempunyai akibat hukum saja yang dapat digolongkan sebagai hukum adat. Akibat hukum itu dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau hapusnya suatu keadaan hukum; dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau hapusnya suatu hubungan hukum; atau dapat berupa sanksi (hukuman). Contoh keadaan hukum adalah status. Misalnya, seorang gadis yang belum pernah kawin memiliki status "tidak kawin". Ketika gadis itu kawin, maka terjadi perubahan keadaan hukum dari status "tidak kawin" menjadi berstatus "kawin"; dan apabila bercerai gadis itu berstatus "janda". Contoh lain keadaan hukum adalah keadaan hukum dewasa dan belum dewasa. Ketika seorang anak mencapai usia tertentu (19 tahun menurut Undang-Undang Perkawinan), maka lahir keadaan hukum baru sekaligus terjadi perubahan keadaan hukum, di mana anak itu dari keadaan hukum "belum dewasa" (*minderjareg*) menjadi berada dalam keadaan hukum "dewasa" (*merderjareg*), sehingga dapat melakukan perbuatan hukum tanpa perlu bantuan pihak lain. Contoh hubungan hukum adalah hubungan perkawinan, hubungan antara anak dengan orangtua, dan lain-lain. Kalau ada aturan adat (*dresta*) yang dapat menimbulkan akibat hukum seperti itu, maka adat tersebut adalah hukum adat. Di luar hukum adat, banyak sekali terdapat aturan adat yang tidak bersifat hukum karena tidak menimbulkan

akibat hukum, seperti misalnya adat berpakaian, adat menyambut tamu, adat berbahasa, dan lain-lain.

Hukum adat Bali berlaku bagi masyarakat Bali yang beragama Hindu. Walaupun hukum adat Bali tidak dapat disamakan dengan Hukum Hindu, mengingat hukum yang berlaku bagi umat Hindu di berbagai daerah di dunia itu berbeda-beda, tetapi pengaruh agama Hindu Bali terhadap hukum adat yang berlaku bagi masyarakat adat Bali sangat kuat. Demikian kuatnya pengaruh agama Hindu terhadap adat kehidupan orang Bali menyebabkan sulitnya membedakan bagian mana dari kehidupan orang Bali yang bersumber dari kebudayaan, tradisi, dan adat kebiasaan asli Bali dan bagian-bagian mana yang dipengaruhi dan/atau bersumber dari agama. Oleh karena itu, antara adat dan agama Hindu Bali tidak mungkin dapat dipisahkan. Ibarat tubuh manusia, ajaran agama itu adalah jiwa atau roh, sedangkan adat adalah badan kasar yang menjadi wadah dari roh itu. Begitu juga dalam kehidupan hukum orang Bali. Tanpa mengadakan penelitian dan pengkajian yang mendalam dan ilmiah, sangatlah sulit membedakan mana aturan-aturan hukum yang bersumber dari adat (tradisi, kebiasaan-kebiasan masyarakat) dan mana aturan-aturan hukum yang bersumber dari ajaran agama Hindu. Karena itu, dapatlah dikatakan bahwa hukum adat Bali itu dijiwai oleh agama Hindu.

Di manakah hukum adat Bali ditemukan? Untuk bagian-bagian hukum adat Bali yang tidak tertulis, dapat ditemukan dalam adat kebiasaan atau tradisi yang telah lama hidup dalam masyarakat adat Bali (*dresta: kuna dresta, desa dresta, dan loka dresta*). Untuk bagian-bagian hukum adat Bali yang tertulis (tersurat/terdokumentasikan) dapat ditemukan dalam sumber-sumber hukum tertulis, seperti dalam *Awig-Awig, Pararem, sastra dresta* (kitab-kitab hukum agama, seperti *kitab agama, kitab adigama, kitab purwagama*, dan lain-lain), *paswara-paswara* (keputusan) raja-raja, keputusan lembaga adat dan keagamaan, dalam hal ini Majelis Desa Adat (dulu Majelis Desa *Pakraman*) dan Parisada Hindu Dharma.

Perlu dicatat untuk menjadi perhatian bersama bahwa hukum adat, termasuk hukum adat Bali, bersifat dinamis dan fleksibel, selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan karakter hukum adat seperti itu, perlu kehati-hatian dalam menerapkan hukum adat Bali dari sumber-sumber di atas yang berlaku pada masa lalu. Tidak sedikit nilai-nilai, asas-asas, dan norma hukum pada masa lalu tidak dapat lagi diterapkan pada masa sekarang. Contoh, larangan perkawinan beda *wangsa*, *asupunding* dan *alangahi karanghulu*, adat *manak salah*, dan lain-lain. Dalam keniscayaan suatu perubahan, masyarakat adat Bali sesungguhnya sudah memiliki kearifan lokal untuk menyikapi perubahan, yaitu konsep *desa*, *kala*, *patra* di mana penerapan nilai-nilai, asas-asas, dan norma hukum selalu disesuaikan dengan tempat (*desa*), waktu (*kala*), dan keadaan/kondisi yang dihadapi manusia (*patra*).

***Awig-Awig* Desa Adat**

Dilihat dari sumber-sumber Hukum Adat Bali di atas, maka salah satu wujud hukum adat Bali adalah *Awig-Awig* Desa Adat. Dalam Pasal 1 Perda Desa Adat di Bali 2019, dijelaskan: *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau *Banjar Adat* yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.

Awig-Awig berlaku bagi warga (*Krama desa*, *Krama tamiu*, dan *tamiu*) yang bertempat tinggal di wilayah Desa Adat masing-masing. Saat ini di Bali terdapat 1.493 Desa Adat dan setiap Desa Adat tersebut memiliki *Awig-Awig* masing-masing yang belum tentu sama antara Desa Adat satu dengan Desa Adat lain. Peluang terjadi perbedaan itu disebabkan dianutnya asas *desa mawacara* di mana setiap Desa Adat berwenang membuat aturan hukumnya sendiri. Kondisi ini memungkinkan terjadi keadaan tidak pasti (ketidakpastian hukum) mengenai hukum adat yang berlaku terhadap suatu masalah, sehingga dapat menyulitkan pergaulan hidup *Krama* Bali yang berbeda-beda Desa Adat. Kondisi ini disadari oleh pembentuk Perda Desa Adat di Bali 2019, sehingga dibuatkan norma untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui Pasal 24 Perda Desa Adat di Bali 2019,

ditentukan bahwa Desa Adat tidak hanya berwenang mengembangkan kehidupan hukum adat berdasarkan asas *Desa Mawacara*, melainkan juga berdasarkan asas *Bali Mawacara*, yaitu kesamaan hukum adat yang berlaku di Bali, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, di samping terdapat norma-norma hukum adat Bali yang berbeda-beda sesuai konsep *desa, kala, patra* dan asas *desa mawacara*, dalam hal-hal tertentu, sepanjang memungkinkan, dirumuskan norma hukum adat Bali yang berlaku untuk seluruh Bali. Wewenang untuk merumuskan hukum adat Bali yang berasaskan *Bali Mawacara* ada di tangan Majelis Desa Adat, seperti ditentukan dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a: bahwa MDA Provinsi mempunyai wewenang "menemukan, merumuskan, dan menetapkan kesatuan tafsir terkait dengan adat-istiadat dan Hukum Adat Bali".

***Awig-Awig* Desa Adat Tempo Dulu**

Kalau dilihat dari tujuannya, *Awig-Awig* pada zaman dulu atau zaman sekarang, tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan kedamaian (*kasukretan*) Desa Adat. Yang agak berbeda adalah sistematika dan substansinya. Sistematika *Awig-Awig* zaman sekarang (yang dimaksud adalah *Awig-Awig* sesudah tahun 1986 atau sesudah terbentuk Majelis Pembina Lembaga Adat atau MPLA) lebih rapi sehingga lebih mudah dimengerti dibandingkan dengan sistematika *Awig-Awig* zaman dulu (sebelum tahun 1986).

***Awig-Awig* Sekarang dan Akan Datang**

Dimaksud *Awig-Awig* masa sekarang dan masa depan adalah *Awig-Awig* yang dirancang sesudah tahun 2019 atau sesudah berlaku Perda Desa Adat di Bali 2019 atau sesudah terbentuk Majelis Desa Adat di Bali.

Dapat disebut sebagai awal perhatian masyarakat Bali (khususnya Provinsi Bali beserta jajarannya) terhadap pentingnya penulisan *Awig-Awig* adalah pada tahun 1969, yaitu sejak dilaksanakannya Seminar Hukum I, tentang "Pembinaan *Awig-Awig* Desa Dalam Tertib Masyarakat", tanggal 8-9 September 1969, oleh

Fakultas Hukum Universitas Udayana bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Propinsi Bali. Beberapa kesimpulan seminar tersebut, mengisyaratkan agar setiap *Awig-Awig* Desa Adat supaya diberi bentuk tertulis oleh Desa Adat bersangkutan. “*Awig-Awig* yang belum tertulis, dalam waktu singkat supaya diusahakan penulisannya, dengan catatan, sambil menunggu penulisan tersebut, *Awig-Awig* yang tidak tertulis masih tetap mempunyai kekuatan berlaku sebagaimana biasa. Di dalam penulisan *Awig-Awig* oleh desa, supaya diperhatikan sistematika yang menjamin adanya suatu susunan yang mudah dipahami dan dipergunakan” (FH & PM Unud, 1970 : 91)

Setelah terbentuknya Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) tahun 1979, lembaga ini juga ikut melaksanakan tugas pembinaan dan penulisan *Awig-Awig*, bersama instansi/unit kerja terkait yang lain³. Walaupun telah ada Tim Pembina Penulisan *Awig-Awig*, tetapi format *Awig-Awig* tertulis belum seragam, karena belum ada pedoman tentang tata cara penulisan *Awig-Awig*⁴.

Setelah Pedoman/Teknis Penyusunan *Awig-Awig* dan Keputusan Desa Adat berhasil dirumuskan (setelah beberapa kali mengalami penyempurnaan, terakhir diterbitkan oleh Biro Hukum dan HAM Setda Prop. Bali, tahun 2002), baik sistematika maupun sebagian besar substansi pokok *Awig-Awig* tertulis (dikenal dengan sebutan *giying*), tampak seragam di seluruh Bali. Kalau ada beberapa perbedaan, akan tampak pada *Pararem*. Hal ini mudah dimengerti, karena pedoman ini selanjutnya menjadi semacam “buku suci” bagi masyarakat (terutama Tim Pembina Penyusunan *Awig-Awig* di Kabupaten dan Propinsi) pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas.

³ Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Prop. Bali, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali Nomor : 18/Kesra. II/C/119/1979, tanggal 21 Maret 1979. Setelah berlakunya Perda Prop. Bali Nomor : 3/2001 tentang Desa Pakraman, Surat Keputusan Gubernur tentang MPLA, dicabut dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 24/2002, tanggal 22 Oktober 2002.

⁴ Sebagai mahasiswa di FH Unud, pada tahun 1980, Wayan P. Windia dan Komang Pradnyana Sudibya, beruntung diajak bergabung sebagai anggota Tim Pembina Penulisan *Awig-Awig* di Desa Adat Tanjung, Benoa, dipimpin Tjok Raka Dherana, S.H. Ikut dalam tim tersebut, I Gusti Ketut Kaler, A.A. Putu Oka Suetja, S.H. dan Made Pasek Diantha, S.H.

Dewasa ini, sesudah berlaku Perda Desa Adat 2019, Pedoman/Teknis Penyusunan *Awig-Awig* dan Keputusan Desa Adat tahun 2002, tentu tidak dapat dijadikan panduan dalam menyusun *Awig-Awig* Desa Adat karena banyak hal yang tampak kurang sejalan dengan substansi Perda Desa Adat 2019. Selain itu, memperhatikan perkembangan masyarakat, ada baiknya dipikirkan *Awig-Awig* Desa Adat untuk masa depan dirancang dalam bahasa Bali dan bahasa Indonesia serta untuk Desa Adat, tentu juga disertai terjemahan dalam bahasa Inggris.

Pengenaan *Danda* atau Sanksi Adat

Dalam Hukum Adat Bali, termasuk *Awig-Awig* Desa Adat, sanksi itu dikenal dengan sebutan *danda* atau *pamidanda*. Pada dasarnya fungsi *pamidanda/danda* (sanksi adat) adalah untuk memulihkan keseimbangan, baik magis maupun fisik, sehingga keseimbangan material dan spiritual dapat diwujudkan. Dalam *Awig-Awig* Desa Adat, fungsi keseimbangan ini dirumuskan dengan ungkapan "*Ngrajegang kesukretan desa saha pawongannya sakala lan niskala*" (mewujudkan kedamaian di Desa Adat secara nyata/lahir (*sakala*) dan keyakinan/batin (*niskala*). Agar *danda* atau *pamidanda* (sanksi adat) dapat berfungsi sebagaimana tertuang dalam *patitis* (tujuan) *Awig-Awig* seperti disebutkan di atas, kiranya perlu ada kebijaksanaan dalam memilih dan memilih jenis sanksi yang sesuai dengan rasa keadilan sebagian besar warga. Di antara jenis-jenis sanksi yang terdapat dalam *Awig-Awig* tersurat maupun belum tersurat, beberapa di antaranya yang masih layak dipertahankan, antara lain: (1) *Arta danda*, yaitu jenis sanksi yang memiliki nilai ekonomi, seperti: ganti rugi berupa sejumlah uang atas kelalaian dalam melakukan perbuatan tertentu, *dosa* (denda); (2) *Jiwa danda*, yaitu jenis sanksi tertentu yang dibebankan kepada perasaan (*jiwa*), seperti: *ngaksama* (minta maaf) kepada seseorang atau di hadapan *Paruman* (rapat) Banjar Adat atau Desa Adat; (3) *Sangaskara danda*, yaitu jenis sanksi dalam bentuk pelaksanaan upacara tertentu sesuai agama Hindu, seperti: upacara *pamarisuda*, *prayascita*, *pabalik sumpah*.

Selain *ngaksama* (minta maaf) ada juga jenis *jiwa danda* yang berupa *kasepe kang* (pemberhentian sementara sebagai *Krama* Desa Adat) dan *kanorayang* (pemberhentian permanen sebagai *Krama* Desa Adat). Kedua jenis *jiwa danda* ini memang masih dapat ditemui dalam *Awig-Awig* tidak tersurat yang hidup dalam masyarakat adat di Bali (Desa Adat di Bali), tetapi sebaiknya tidak dicantumkan dalam *Awig-Awig* tersurat, karena pengenaan kedua jenis sanksi adat (*danda*) ini cenderung menimbulkan berbagai permasalahan yang lebih rumit dan/atau lebih besar, sesudah sanksi adat ini dijatuhkan.

Kedudukan Hukum Adat dan *Awig-Awig* Desa Adat dalam Tata Hukum Nasional Indonesia

Bagaimana kedudukan hukum adat pada umumnya dan *Awig-Awig* Desa Adat pada khususnya dalam Tata Hukum Nasional Indonesia? Untuk mengetahui, terlebih dahulu harus dijelaskan apa yang dimaksud tata hukum Indonesia. Pada dasarnya, tata hukum adalah semua peraturan hukum yang dibuat oleh suatu negara dan berlaku saat itu bagi warga negaranya. Begitu juga halnya dengan Negara Indonesia memiliki sistem tata hukum sendiri yang disebut Tata Hukum Indonesia. Sistem Tata Hukum Indonesia ini lazim pula disebut Sistem Hukum Nasional Indonesia. Tata hukum Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tersusun secara hirarki (bertingkat) sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah, di dalamnya Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa.

Hukum adat tidak dibuat oleh Negara (Pemerintah), melainkan tumbuh dari bawah. Hukum adat lahir, berkembang, dan dipraktikkan oleh masyarakat pendukungnya, sehingga hanya berlaku lokal pada masyarakat tertentu.

Misalnya, hukum adat Bali hanya berlaku bagi masyarakat adat Bali. Walaupun hukum adat tidak dibuat oleh Negara, tetapi negara mengakui keberadaan hukum adat, termasuk *Awig-Awig* yang merupakan produk hukum kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.

Dalam UUDNRI Tahun 1945, yang menjadi sumber Tata Hukum Indonesia, tidak satu pasal pun yang secara khusus menyebut kedudukan hukum adat. Pada awal kemerdekaan, pengakuan berlakunya hukum adat secara umum dilandasi oleh Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang memberlakukan kembali hukum yang pernah berlaku pada zaman penjajahan, sepanjang belum diadakan yang baru menurut UUD 1945. Setelah UUD 1945 diamandemen menjadi UUD RI Tahun 1945, ketentuan yang sama dinyatakan dalam Pasal I Aturan Peralihan UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan:

“Segala peraturan perundang-undangan yang telah ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Berdasarkan ketentuan inilah, segala peraturan yang telah ada sebelumnya, termasuk peraturan pada zaman penjajahan, tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUDNRI Tahun 1945. Pada zaman penjajahan Belanda, berlaku suatu peraturan yang menggolongkan penduduk di Indonesia (waktu itu disebut Hindia Belanda) menjadi tiga golongan, yaitu penduduk golongan Eropa, penduduk golongan Bumi Putra (Indonesia asli), dan penduduk golongan Timur Asing. Terhadap masing-masing golongan penduduk tersebut berlaku hukumnya masing-masing. Penduduk Golongan Eropa berlaku hukum Barat (Hukum Eropa), sedangkan bagi penduduk golongan Bumiputra (Indonesia asli) berlaku hukum adat (Pasal 131 jo Pasal 163 IS). Atas dasar ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (kemudian menjadi Pasal I Aturan Peralihan UUDNRI Tahun 1945) inilah hukum adat sampai sekarang tetap berlaku bagi warga negara Indonesia yang berasal dari golongan Bumiputra (Indonesia asli), terutama pada bidang-bidang kehidupan yang belum diatur oleh hukum nasional, seperti hukum keluarga dan hukum waris.

Mengenai kedudukan *Awig-Awig* Desa Adat, Negara mengakui secara khusus melalui Pasal 18B ayat (2) UUDNRI Tahun 1945, yang menentukan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Desa Adat di Bali adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak-hak tradisional, antara lain: membuat, melaksanakan, dan menegakkan *Awig-Awig*-nya sendiri. Dengan demikian, kedudukan Desa Adat di Bali diakui dan dihormati oleh Negara. Karena keberadaan Desa Adat dengan *Awig-Awig*-nya diakui oleh Negara melalui UUDNRI Tahun 1945, maka kedudukan *Awig-Awig* Desa Adat diakui keberadaannya dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Dalam tataran lokal, kedudukan *Awig-Awig* Desa Adat semakin kuat setelah Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengakui dan mengatur keberadaan Desa Adat, mulai dari Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, dan sekarang Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

BAB IV

ISI DAN TATA CARA PENYURATAN AWIG-AWIG DESA ADAT

Materi Muatan (Isi) Awig-Awig Desa Adat

Awig-Awig Desa Adat mengatur aspek-aspek *Tri Hita Karana*, yaitu aspek-aspek yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), aspek-aspek yang berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia (*Pawongan*), dan aspek-aspek yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam (*Palemahan*). Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk mewujudkan *kasukretan desa sakala dan niskala*, yang dapat diterjemahkan sebagai suatu suasana kehidupan yang rukun, tertib, dan damai. Hal itu dengan jelas disebutkan dalam Pasal 14 Perda Nomor 4 Tahun 2019 yang menentukan sebagai berikut:

- (1) *Awig-Awig* Desa Adat mengatur *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memelihara kehidupan bersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan damai, serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip *gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya*.

Selanjutnya Pasal 15 menentukan bahwa materi muatan *Awig-Awig* Desa Adat meliputi:

- a. *Sukreta tata parahyangan*;
- b. *Sukreta tata pawongan*; dan
- c. *Sukreta tata palemahan* Desa Adat.

Negara mengakui bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat teritorial di Bali memiliki hak otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri, termasuk dalam menetapkan, melaksanakan, dan menegakkan hukumnya sendiri. Dengan demikian, *Awig-Awig* Desa Adat dapat mengatur semua aspek kehidupan di Desa Adat yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana*. Namun demikian, harus diakui bahwa pengakuan Negara terhadap hak otonomi Desa Adat adalah suatu pengakuan bersyarat, seperti yang ditentukan dalam konstitusi (Pasal 18B ayat (2) UUDNRI Tahun 1945). Oleh karena itu, materi muatan (isi) *Awig-Awig* Desa Adat sepatutnya memenuhi persyaratan-persyaratan materiil sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
2. Tidak bertentangan dengan ajaran agama Hindu;
3. Memperhatikan keharmonisan antara prinsip *Desa Mawacara* dengan prinsip-prinsip *Bali Mawacara*.

Arti Penyuratan *Awig-Awig*

Penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat mengandung arti, antara lain: (1) menyuratkan *Awig-Awig* yang sebelumnya tidak tersurat; (2) merevisi *Awig-Awig* yang sudah tersurat; (3) menyesuaikan sistematika *Awig-Awig* tersurat; dan (4) menyusun buku *Awig-Awig* tersurat.

Menyuratkan *Awig-Awig* yang sebelumnya tidak tersurat dilakukan dengan cara mempelajari *Awig-Awig* yang belum tersurat yang ada dan masih berlaku/ditaati oleh *Krama* Desa Adat, "menilai" apakah *Awig-Awig* tersebut masih sesuai dengan perkembangan zaman ataukah sudah ketinggalan zaman, menyuratkan dengan bahasa hukum yang baik dan benar.

Pada waktu menyurat atau merevisi *Awig-Awig*, perlu "menilai" apakah *Awig-Awig* (tertulis maupun tidak tertulis) yang masih berlaku, sesuai atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman? Yang dapat dijadikan "alat ukur" dalam menilai, antara lain: (1) nilai-nilai luhur agama Hindu; (2) Keputusan MPLA Provinsi Bali, PHDI Pusat, dan PHDI Provinsi Bali, MUDP, MDA Provinsi Bali; (3) Perda Desa Adat di Bali 2019; (4) aturan perundang-undangan yang berlaku di

NKRI, dengan perkecualian hal-hal yang berhubungan dengan hukum keluarga, sebagian hukum tanah, dan hukum agama.

Pentingnya Penyuratan *Awig-Awig*

Penyuratan *Awig-Awig* penting dilakukan. Tujuannya, antara lain, agar Desa Adat memiliki satu buku *Awig-Awig* tersurat, lebih mudah dalam mewujudkan kepastian hukum atau kepastian *Awig-Awig*, adanya warisan (*temon-temon*) berupa *Awig-Awig* tertulis untuk generasi yang akan datang. Manfaatnya antara lain:

1. Memudahkan membaca, mempelajari, dan menemukan hal-hal yang belum diatur dalam *Awig-Awig*.
2. Memudahkan dalam mendiskusikan dan menafsirkan hal-hal yang dirasakan kurang jelas/kabur.
3. Memudahkan dalam menemukan dan menginventarisasi ketentuan yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memudahkan dalam menyelesaikan *wicara* (perkara adat).
5. Memudahkan dalam menciptakan kedamaian (*kasukretan*) Desa Adat.
6. Memudahkan dalam membangun hubungan baik dengan Desa Adat tetangga dan pihak lain di luar Desa Adat.
7. Memudahkan dalam melaksanakan dan mempertahankan nilai-nilai agama Hindu dan budaya Bali dalam kehidupan Desa Adat.

Walaupun demikian bukan berarti *Awig-Awig* tersurat tidak memiliki kelemahan. Kelemahannya antar lain:

1. Cenderung kaku dan sulit disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
2. Dalam beberapa hal juga sulit mendekati rasa keadilan masyarakat tempat *Awig-Awig* itu berlaku.

Sementara itu, *Awig-Awig* yang belum tersurat memiliki sifat sebaliknya. Lebih luwes, sehingga relatif lebih mudah menyesuaikan dengan perkembangan

zaman serta lebih mudah dalam mendekati rasa keadilan masyarakat tempat *Awig-Awig* itu berlaku.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, penyuratan *Awig-Awig* penting dilakukan. Tujuan dan manfaatnya juga sudah dijelaskan. Walaupun demikian, perlu hati-hati dalam menyuratkan *Awig-Awig*. Jangan bermimpi untuk menyuratkan semua *Awig-Awig* yang belum tertulis yang hidup dalam masyarakat (Desa Adat). Apalagi disertai "muatan" kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam hal ini perlu dipahami bahwa tidak semua *Awig-Awig* yang belum tersurat/tertulis dapat disuratkan/ditulis. Ada *Awig-Awig* belum tersurat yang dapat disuratkan, ada yang sulit disuratkan, dan bahkan ada yang tidak mungkin disuratkan. Penyuratan *Awig-Awig* sebaiknya dilakukan apabila *Awig-Awig* yang dimaksud memang dapat dan mudah disuratkan. Ketentuan *Awig-Awig* yang sulit disuratkan sebaiknya dipikirkan saja, sementara *Awig-Awig* yang belum tertulis yang dirasakan tidak mungkin disuratkan atau kalau disuratkan justru dapat menimbulkan masalah, sebaiknya dibiarkan hidup sebagai *Awig-Awig* yang belum tersurat selamanya. Pada akhirnya waktu juga akan menguji, apakah *Awig-Awig* itu bertahan hidup ataukah ditinggalkan oleh masyarakatnya. Terlepas dari kenyataan tersebut, di bawah ini dikemukakan secara singkat rangkaian kegiatan yang patut dilakukan terkait dengan proses penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat di Bali. Uraian akan diawali dengan penjelasan beberapa istilah yang ada hubungan dengan penyuratan *Awig-Awig*.

Beberapa Istilah Perlu Dipahami Sebelum Menyuratkan *Awig-Awig*

Ada beberapa istilah penting yang perlu dipahami lebih awal apabila ingin memahami keberadaan Hukum Adat Bali, Desa Adat di Bali, *Awig-Awig* Desa Adat di Bali, terutama dalam hubungan dengan usaha penyuratan *Awig-Awig*. Istilah yang dimaksud dapat ditemui dalam berbagai kepustakaan dan hasil penelitian tentang Hukum Adat Bali dan dapat pula ditemui pada masing-masing Desa Adat di Bali. Berdasarkan pengalaman penelitian terhadap istilah-istilah

adat dan Hukum Adat Bali dapat diketahui bahwa ada kalanya masing-masing Desa Adat di Bali begitu gigih mempertahankan istilah yang ada dan berlaku di Desa Adat-nya atas dasar prinsip/asas *desa mawacara*. Di lain pihak, Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, menjadikan Bali *mawacara* sebagai salah satu asasnya. Yang dimaksud dengan "*Bali mawacara/kesatuan Bali*" adalah kesamaan hukum adat yang berlaku di Bali, baik tertulis maupun tidak tertulis. Itulah sebabnya beberapa istilah penting yang dituangkan dalam Buku Penuntun ini sebagian besar diambil dari Pasal 1 Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dan sebagian kecil dikutip dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. (Selanjutnya disebut Pergub *Awig-Awig* 2020). Tujuannya untuk menumbuhkan persepsi yang sama mengenai peristilahan yang akan digunakan dalam penyuratan *Awig-Awig*. Berikut kutipan beberapa istilah yang dimaksud.

1. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata *Krama* pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Banjar Adat atau Banjar *Suka Duka* atau sebutan lain adalah bagian dari Desa Adat.
3. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
4. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *Mipil*, tetapi tercatat di Desa Adat setempat.

5. *Tamiu* adalah orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat.
6. *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan *Krama* Desa Adat.
7. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
9. *Bandesa* Adat atau *Kubayan* atau dengan sebutan lain adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
10. *Sabha* Desa Adat adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat.
11. *Kerta* Desa Adat adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat.
12. Perkara Adat/*Wicara* adalah setiap persoalan hukum adat dalam urusan *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* baik atas dasar permohonan maupun sengketa.
13. *Pacalang* Desa Adat atau *Jaga Bhaya* Desa Adat atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut *Pacalang*, adalah satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh Desa Adat yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di *wewidangan* Desa Adat.
14. *Yowana* Desa Adat atau *Daa Taruna* Desa Adat atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut *Yowana* Desa Adat, adalah organisasi *daa-taruna*/pemudi-pemuda di Desa Adat dan/atau Banjar Adat.
15. *Krama Istri* Desa Adat adalah organisasi istri *Krama* Desa Adat.
16. *Sekaa* adalah berbagai organisasi di Desa Adat yang dibentuk oleh Desa Adat dan/atau *Krama* Desa Adat berdasarkan minat, bakat, atau

kebutuhan atas dasar kepentingan yang sama, sesuai dengan yang dimaksud oleh namanya.

17. Majelis Desa Adat, yang selanjutnya disingkat MDA, adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat.
18. *Paruman* Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
19. *Pasangkepan* Desa Adat atau yang disebut dengan istilah lain adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan *Paruman* Desa Adat.
20. *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (*yadnya*).
21. *Sad Kerthi* adalah upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia (*jana kerthi*).
22. *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau *Banjar Adat* yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
23. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat.

24. *Dresta* adalah adat kebiasaan/tradisi yang diwarisi secara turun temurun dan masih ditaati oleh Desa Adat.
25. *Wewidangan* atau *Wewengkon*, yang selanjutnya disebut *Wewidangan* Desa Adat, adalah wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu.
26. *Padruwen* Desa Adat adalah seluruh harta kekayaan Desa Adat baik yang bersifat immateriil maupun materiil.
27. *Labda Pacingkremen* Desa Adat, yang selanjutnya disebut LPD, adalah Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat.
28. *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat, yang selanjutnya disingkat BUPDA, adalah unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat.
29. *Panyarikan* atau *Juru Tulis* atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut *Panyarikan*, adalah *Prajuru* Desa Adat yang mempunyai tugas mencatat segala hal mengenai kegiatan *Krama* Desa Adat.
30. Sekretariat MDA adalah satuan kerja yang mewadahi fungsi pendukung MDA dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi, protokoler, kehumasan, dan kerumahtanggaan MDA.
31. Sarana dan Prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan MDA, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan MDA.
32. Kawasan Perdesaan Desa Adat adalah kawasan lintas Desa Adat yang dapat digunakan dan dimanfaatkan bersama oleh beberapa Desa Adat yang berdampingan untuk melestarikan sumber daya alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui pembangunan infrastruktur,

- peningkatan ekonomi, pengembangan teknologi tepat guna, dan pemberdayaan *Krama* Desa Adat.
33. Pihak Lain adalah perguruan tinggi negeri/swasta, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
 34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
 35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat, yang selanjutnya disebut APB Desa Adat, adalah rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa Adat.
 36. Dinas adalah dinas yang menangani urusan pemajuan masyarakat adat (Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali).

Proses Penyuratan *Awig-Awig*

Proses penulisan *Awig-Awig* dapat dibagi menjadi 5 (lima) tahap, yaitu:

- (1) Tahap Persiapan Penyuratan *Awig-Awig*;
- 2) Tahap Pelaksanaan Penyuratan *Awig-Awig*;
- 3) Tahap Evaluasi Penyuratan *Awig-Awig*;
- 4) Tahap Sosialisasi *Awig-Awig* Tersurat; dan
- 5) Tahap Penyelesaian Penyuratan *Awig-Awig*.

1) Persiapan Penyuratan *Awig-Awig*

Tahap persiapan dapat dikatakan cukup penting untuk diperhatikan sebelum mulai dengan kegiatan penulisan *Awig-Awig*. Dikatakan penting karena berhasil dan tidaknya langkah berikutnya, tergantung dari langkah persiapan. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan pada tahap persiapan, antara lain:

- a) Mengadakan rapat (*samuha*) Desa Adat untuk membahas rencana penyuratan *Awig-Awig* atau merevisi *Awig-Awig* tersurat yang telah ada dan dianggap kurang sesuai dengan perkembangan zaman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Perda Desa Adat 2019 dan Pergub *Awig-Awig* 2020.
- b) Membentuk panitia penyuratan *Awig-Awig*, langsung membentuk kelompok kerja (seksi-seksi), dengan uraian tugasnya masing-masing.
- c) Menggandakan Perda Desa Adat 2019 dan Pergub *Awig-Awig* 2020 untuk masing-masing anggota panitia.
- d) *Matur piuning* (mohon kedamaian dan kelancaran) di pura tertentu.
- e) Menyusun strategi penggalan dana.
- f) Menyusun rencana kerja.
- g) Menyusun kalender kegiatan.

Panitia penyuratan *Awig-Awig* atau revisi *Awig-Awig* tersurat, sebaiknya terdiri atas unsur Desa Adat setempat dan unsur dari luar Desa Adat. Unsur Desa Adat setempat (sebagai panitia tetap), terdiri atas:

- a) Unsur *Prajuru* Desa Adat dan unsur *Prajuru* Banjar Adat.
- b) Unsur tokoh masyarakat (PNS, pengusaha, dan lain-lain).
- c) Unsur tokoh agama (*pamangku*).
- d) Unsur pemuda.
- e) Unsur wanita.
- f) Unsur *Krama tamiu*.

Unsur dari luar Desa Adat setempat (diundang bila dianggap perlu sebagai narasumber, untuk menjelaskan istilah tertentu atau kebijaksanaan tertentu) terdiri atas:

- a) Unsur Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (Dinas PMA) Provinsi Bali.
- b) Unsur MDA Bali.
- c) Unsur ahli agama Hindu/PHDI Bali/Kabupaten/Kota.

- d) Unsur ahli Hukum Adat Bali.
- e) Unsur *Prajuru* Desa Adat tetangga (*nyatur desa*).

2) Pelaksanaan Penyuratan *Awig-Awig*

Apabila langkah persiapan telah dapat dilalui dengan baik, dalam arti seluruh warga Desa Adat sepakat untuk menulis atau merevisi *Awig-Awig*, panitia telah terbentuk dengan uraian tugas yang jelas, lanjutkanlah dengan langkah pelaksanaan.

Langkah selanjutnya yang dilakukan panitia adalah menyelenggarakan pembekalan dan/atau pembinaan terhadap panitia penyuratan *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat. Bila dipandang perlu, pembinaan dilakukan di hadapan seluruh *Krama* Desa Adat. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengadakan koordinasi dengan MDA Kecamatan atau dengan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, sesuai Pasal 9 Pergub *Awig-Awig* 2020 yang menentukan sebagai berikut.

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan pembinaan *Awig-Awig*.
- (2) Dalam melakukan pembinaan *Awig-Awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. MDA di semua tingkatan;
 - d. Parisada Hindu Dharma Indonesia; dan
 - e. Perguruan Tinggi.
- (4) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Sekali lagi diingatkan ada beberapa hal yang perlu dilakukan pada tahap pelaksanaan, antara lain:

- a) Mengadakan koordinasi dengan MDA Kecamatan dan Dinas PMA Provinsi Bali untuk mendapatkan buku "Penuntun Penyuratan *Awig-Awig*" dan calon narasumber.
- b) Menyelenggarakan pertemuan panitia untuk mendapatkan pembekalan mengenai arti, makna, dan pentingnya penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat untuk kebaikan bersama.
- c) Mendapatkan contoh (*imba*) *Awig-Awig* dari Desa Adat lain yang situasi dan kondisi masyarakatnya dan wilayahnya mirip.
- d) Mempelajari dengan cermat *Awig-Awig* tersurat atau belum tersurat yang ada di Desa Adat sendiri, untuk menemukan dan "menilai" ketentuan yang sesuai dan/atau kurang sesuai dengan perkembangan zaman.
- e) Mempelajari dan membandingkan *Awig-Awig* belum tersurat atau *Awig-Awig* yang sudah tersurat yang telah ada di Desa Adat sendiri dengan *Awig-Awig* serupa dari Desa Adat lain, yang situasi dan kondisi desanya mirip.
- f) Menemukan poin-poin yang cocok dari *Awig-Awig* tersebut.
- g) Mendiskusikan poin-poin tersebut dengan kelompok kerja atau panitia, berdasarkan "ukuran" penilaian seperti telah dijelaskan di atas, untuk menemukan rumusan terbaik bagi Desa Adat sendiri.
- h) Mengundang *Prajuru* Desa Adat tetangga pada waktu membahas mengenai batas Desa Adat atau substansi lain yang berhubungan erat dengan Desa Adat tetangga, seperti kependudukan, dan lain-lain.
- i) Mengundang ahli dalam bidang tertentu (ahli hukum adat Bali, ahli agama Hindu, ahli pendidikan, dan lain-lain), untuk memberikan pencerahan mengenai beberapa istilah tentang adat Bali, agama Hindu, dan perkembangan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, baik di Bali, nasional, maupun internasional. Pemahaman tentang

pendidikan sangat penting, karena maju mundurnya masyarakat, tergantung dari pendidikannya. Selain itu, hal ini juga penting artinya pada waktu membahas masalah *ayah-ayahan*, terutama *ayah balu*, *ayah rob kundul*, *ayah newek*, dan lain-lain.

- j) Menulis hasil kesepakatan dalam rapat panitia menjadi sebuah aturan hukum atau ketentuan *Awig-Awig* tersurat.
- k) Menyusun *Awig-Awig* tersurat secara sistematis dalam satu buku *Awig-Awig* tersurat, sehingga mudah dibaca, dipelajari, dimengerti, dan dilaksanakan.

Tata Cara Penyuratan *Awig-Awig*

Tata cara penyuratan *Awig-Awig* diatur dalam Pergub *Awig-Awig* 2020. Substansi *Awig-Awig* tersurat diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Pergub *Awig-Awig* 2020 yang menentukan sebagai berikut.

Pasal 3

- (1) Setiap Desa Adat berkewajiban *menyuratkan Awig – Awig*.
- (2) *Penyuratan Awig-Awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. *aran miwah Wewidangan*;
 - b. *pamikukuh miwah patitis*;
 - c. *sukreta tata parahyangan*;
 - d. *sukreta tata pawongan*;
 - e. *sukreta tata palemahan*;
 - f. *bhaya, wicara, miwah pamidanda*;
 - g. perubahan *Awig-Awig (nguwah-nguwuhin)*; dan
 - h. *pamuput*.
- (3) *Penyuratan Awig-Awig* Desa Adat disusun dalam Bahasa Bali dan Bahasa Indonesia.
- (4) Bahasa Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan aksara Bali dan huruf Latin.

- (5) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan huruf Latin.

Pasal 4

- (1) *Awig-Awig* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus disusun berdasarkan pedoman penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh MDA Provinsi difasilitasi oleh Dinas.

3) Evaluasi Penyuratan *Awig-Awig*

Walaupun panitia penulisan *Awig-Awig* belum menyelesaikan tugas, evaluasi tetap dapat dan perlu diadakan. Yang perlu dievaluasi adalah pekerjaan penyuratan atau revisi *Awig-Awig* yang sudah berhasil diselesaikan, cara kerja panitia dalam menyelesaikan pekerjaannya, serta rencana sosialisasi (*pasobyahan*) untuk minta persetujuan seluruh *Krama* Desa Adat, sebelum dilanjutkan dengan upacara *pasupati*. Evaluasi atas hasil pekerjaan penting dilakukan untuk menghaluskan, merapikan, atau mengoreksi beberapa kesalahan yang sifatnya sangat teknis. Evaluasi cara menyelesaikan pekerjaan oleh panitia penting dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya, selama panitia menjalankan tugas.

Kelemahan biasanya tampak di sekitar kurangnya koordinasi antarsesama anggota panitia dan kekurangan dana untuk mendukung keseluruhan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Apa pun kekurangannya, tidak perlu ragu untuk mengemukakan. Sesudah diketahui dan dimengerti, langsung bergerak untuk berusaha memperbaiki, tanpa perlu menunggu hari baik atau *dewasa ayu*. Kalau tidak memungkinkan untuk diperbaiki langsung, ketua panitia meneruskan kepada *Bandesa Adat*, untuk dibahas dalam rapat (*Paruman*) Desa Adat atau setidaknya dalam rapat *Prajuru* Desa Adat.

4) Sosialisasi *Awig-Awig* Tersurat

Sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat (*Krama desa, Krama tamu* dan *tamui*) oleh panitia penulisan *Awig-Awig*, dapat dikatakan tahap yang cukup penting serangkaian dengan keseluruhan pekerjaan penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat. Dikatakan penting karena betapapun hebat hasil kerja panitia dalam menyiapkan naskah *Awig-Awig*, sebenarnya naskah itu masih dalam bentuk *rarincikan* (konsep). *Awig-Awig* baru akan mengikat seluruh penduduk Desa Adat, setelah disetujui oleh *Krama* Desa Adat dalam suatu *Paruman* (rapat) Desa Adat dan didaftarkan sesuai Pergub *Awig-Awig* 2019.

Walaupun sosialisasi merupakan tahap yang penting, tidak berarti semua isi *Awig-Awig* tertulis harus disosialisasikan. Isi *Awig-Awig* yang disampaikan hanyalah bagian-bagian tertentu yang semula tidak tersurat dan sekarang “diangkat” menjadi *Awig-Awig* tersurat. Hal yang sama juga dilakukan terhadap revisi *Awig-Awig* tersurat. Dalam hubungan dengan kedua hal tersebut di atas, maka yang perlu disampaikan, antara lain:

- a) Membacakan isi ketentuan *Awig-Awig* yang semula belum tersurat atau belum direvisi dan membandingkannya dengan ketentuan yang baru, yang telah tersurat atau telah direvisi.
- b) Menjelaskan latar belakang pemikiran yang menyebabkan disuratkan atau direvisinya ketentuan *Awig-Awig* tersebut. Penjelasan latar belakang tersebut, agar dikaitkan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman sekarang dan kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam hubungan dengan diberlakukannya Perda Desa Adat di Bali 2019.

5) Penyelesaian Penyuratan *Awig-Awig*

Cara menyusun, menyelesaikan, dan mulai memberlakukan *Awig-Awig* dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sebelum diperkenalkannya program penyuratan *Awig-Awig*, penyusunan, penyelesaian, dan pemberlakuan *Awig-Awig* dan/atau berjalan secara tradisional. Sesudah selesai dibahas dan

disepakati dalam *Paruman* (rapat) Desa Adat, lalu hasil kesepakatan yang disebut *Awig-Awig kasobyahang* (diumumkan). *Awig-Awig* mulai berlaku serta mengikat seluruh *Krama* Desa Adat pada saat itu juga.

Suasana agak berbeda sesudah mulai diperkenalkan *Awig-Awig* tersurat/tertulis dan mulai gencar dilaksanakan penyuratan *Awig-Awig* sekitar tahun 1986. Sesudah selesai dibahas dan disepakati dalam *Paruman* (rapat) Desa Adat, *Awig-Awig kasobyahang* (diumumkan) dan mulai berlaku serta mengikat seluruh *Krama* Desa Adat pada saat itu juga. Segera sesudah *pasobyahan* dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara *pasupati* terhadap *Awig-Awig* tersurat yang dirangkaikan dengan penandatanganan *Awig-Awig* tersurat oleh Bupati/Wali Kota dan pendaftaran *Awig-Awig* tersebut pada Bagian Hukum Kantor Bupati/Wali Kota setempat. Terlepas dari pelaksanaan upacara *pasupati* dan penandatanganan oleh Bupati/Wali Kota, *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat mulai berlaku sesudah *kasobyahang* dalam *Paruman*/rapat dan disetujui oleh seluruh *Krama* Desa Adat.

Sekarang, sesudah berlaku Perda Desa Adat di Bali 2019 dan Pergub *Awig-Awig* 2020, berbeda lagi proses penyelesaian penyuratan *Awig-Awig*. Proses perencanaan, pembahasan, dan persetujuannya hampir sama dengan acara sebelumnya. Tetapi ada perbedaan pada acara *pasobyahan* (pengumuman) dan upacara *pasupati Awig-Awig*. Sesudah *Awig-Awig* tersurat disepakati dalam *Paruman* Desa Adat, kemudian didaftarkan di Dinas PMA Provinsi Bali. *Awig-Awig* tersurat mulai berlaku sesudah didaftarkan di Dinas PMA Provinsi Bali, dan selanjutnya *kasobhyahang* dalam *Paruman* Desa Adat.

Tata cara pendaftaran *Awig-Awig* diatur dalam Pasal 5 Pergub *Awig-Awig* 2020 yang menentukan sebagai berikut.

Pasal 5

- (1) *Prajuru* Desa Adat mendaftarkan *Awig-Awig* Desa Adat kepada Dinas.

- (2) *Awig-Awig* Desa Adat yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *Awig-Awig* Desa Adat yang telah disahkan dalam *Paruman* Desa Adat.
- (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 6

Pendaftaran *Awig-Awig* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. Surat permohonan pendaftaran *Awig-Awig* dari *Bandesa* Adat dan/atau *Panyarikan*;
- b. *Awig-Awig* dalam bentuk tercetak (*hard copy*) rangkap 3 (tiga) dan rekaman elektronik (*softcopy*);
- c. berita acara pengesahan *Awig-Awig* Desa Adat; dan
- d. surat keterangan MDA Provinsi yang menyatakan bahwa *Awig-Awig* telah disusun dan ditulis sesuai dengan Pedoman Penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat.

Verifikasi dan pendaftaran *Awig-Awig* tertulis bertujuan, antara lain: (1) memastikan bahwa *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat sudah disuratkan sesuai dengan tata cara dan/atau Penuntun Penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat di Bali; (2) memastikan bahwa substansi *Awig-Awig* Desa Adat tersurat sesuai dengan tipe Desa Adat, warisan tradisi Desa Adat setempat yang masih dihormati dan masih berlaku sampai sekarang, serta sesuai pula dengan budaya Bali yang dijiwai nilai-nilai agama Hindu; (3) memastikan bahwa substansi *Awig-Awig* Desa Adat tersurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan *Awig-Awig* Tersurat

Dalam uraian terdahulu sudah dikemukakan bahwa salah satu tujuan penyuratan *Awig-Awig* adalah untuk menciptakan *kasukretan* Desa Adat. Apakah sesudah Desa Adat memiliki *Awig-Awig* tersurat dengan sendirinya *kasukretan* akan terwujud? Belum tentu. Tergantung dari pelaksanaan *Awig-Awig* yang sudah tersurat. Apabila jajaran *Prajuru* Desa Adat, *Prajuru* Banjar Adat dan seluruh penduduk (*Krama* Desa Adat, *Krama tamiu*, dan *tamiu*) yang ada di Desa Adat menghormati dan menaati *Awig-Awig* yang sudah tersurat (walaupun di sana-sini mungkin masih ada kekurangan), barulah dapat menciptakan *kasukretan* Desa Adat. Sebaliknya, apabila jajaran *Prajuru* Desa Adat, *Prajuru* Banjar Adat, dan seluruh atau sebagian penduduk (*Krama* Desa Adat, *Krama tamiu*, dan *tamiu*) yang ada di Desa Adat tidak menghormati dan tidak menaati *Awig-Awig* yang sudah tersurat, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, akibatnya *Prajuru* Desa Adat akan repot, penduduk Desa Adat akan bingung, dan pada akhirnya sulit menciptakan *kasukretan* Desa Adat.

BUKU DUA

**PENGANTAR TIM PENYUSUN
DAN CONTOH SISTEMATIKA AWIG-AWIG
DESA ADAT DI BALI
DISERTAI BEBERAPA CATATAN**

Pengantar Tim Penyusun

Penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat di Bali oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali baru dimulai secara terprogram dan berkelanjutan sesudah Seminar Hukum Adat yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana bekerja sama dengan Provinsi Daerah Tingkat I Bali pada tahun 1969. Salah satu butir kesimpulan seminar ketika itu menyebutkan bahwa perlu ada upaya penyuratan *Awig-Awig* sebagai salah satu usaha menciptakan *kasukretan* (kedamaian) Desa Adat di Bali.

Mengacu kepada kesimpulan seminar ini kemudian ditindaklanjuti dengan disusunnya beberapa buku mengenai tata cara penyuratan *Awig-Awig*, seperti: "Penuntun *Nyanggra/Midabdabin* Desa Adat di Bali (1971) oleh Dinas Agama Hindu dan Budha Kabupaten Badung"; "*Tata Nuntun Miwah Midabdabin Desa Adat Ring Bali*" (1973) oleh Pjs Kepala Jawatan Agama Hindu dan Budha Propinsi Bali; "*Imba Awig-Awig* Desa Adat Ring Bali" (1973) oleh Pjs Kepala Jawatan Agama Hindu dan Budha Propinsi Bali (Proyek Penyuluhan Agama Propinsi Bali, 1973).

Sesudah terbentuknya Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) di Provinsi Bali dan Badan Pelaksana Pembina Lembaga Adat (BPPLA) di masing-masing Kabupaten/Kota di Bali (1979), Tjokorda Raka Dherana, S.H. memperkuat buku-buku yang sudah ada sebelumnya dengan mengeluarkan buku berjudul "Garis-Garis Besar Penulisan *Awig-Awig* Desa Adat (1982).

Melalui koordinasi MPLA, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali, selanjutnya dilakukan penyesuaian format dan substansi penuntun penyuratan *Awig-Awig* yang sudah ada sebelumnya. Tujuannya agar para anggota Tim Pembina Penyuratan *Awig-Awig* yang ada di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali lebih mudah dalam melakukan tugas pembinaan penyuratan *Awig-Awig* bagi Desa Adat di Bali. Penyesuaian dilakukan beberapa kali. Salah satunya diterbitkan tahun 2002 berjudul "Pedoman/Teknis

Penyusunan *Awig-Awig* dan Keputusan Desa Adat”, yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali Tahun Anggaran 2002.

Kalau dicermati sistematika dan substansi masing-masing buku tersebut, tampak ada perbedaan antara buku-buku yang diusahakan pada awal mulainya kegiatan penyuratan *Awig-Awig* dengan buku “Pedoman/Teknis Penyusunan *Awig-Awig* dan Keputusan Desa Adat”, yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali Tahun Anggaran 2002.

Substansi buku penuntun penyuratan *Awig-Awig* pada awal mulainya usaha penyuratan *Awig-Awig* terkesan lebih menitikberatkan pada ‘arah’ dan ‘tujuan’ pembinaan dan penyuratan *Awig-Awig*. Substansi *Awig-Awig*-nya sendiri diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Desa Adat di Bali untuk merumuskan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yang dikenal dengan ‘*desa mawacara*’.

Adapun buku “Pedoman/Teknis Penyusunan *Awig-Awig* dan Keputusan Desa Adat”, yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali Tahun Anggaran 2002, selain memberikan ‘arah’ dan ‘tujuan’ dalam pembinaan dan penyuratan *Awig-Awig*, sekaligus juga menyertakan *imba* (contoh rancangan) *Awig-Awig* tersurat, yang dapat dicontoh oleh masing-masing Desa Adat dengan penyesuaian seperlunya. Inilah yang selanjutnya dijadikan panduan dan sekaligus contoh bagi Desa Adat di Bali dalam menyuratkan *Awig-Awig* sampai sekarang.

Seperti diketahui, situasi dan kondisi masyarakat sekarang sudah berubah. Perubahan terjadi karena perubahan situasi dan kondisi atau perkembangan dan kemajuan masyarakat yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan peraturan perundangan yang berlaku. Salah satu di antara peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disebut Perda Desa Adat di Bali 2019) sebagai pengganti ketentuan serupa yang berlaku sebelumnya, seperti: Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 Tentang Kedudukan Fungsi dan Peranan

Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa *Pakraman*.

Ada beberapa perbedaan dan/atau perubahan yang tertuang dalam Perda Desa Adat di Bali Tahun 2019 dibandingkan ketentuan serupa yang ada sebelumnya. Perubahan ini membawa konsekwensi perlunya perubahan dan/atau penyesuaian ketentuan *Awig-Awig* tertulis atau *Awig-Awig* belum tertulis yang dimiliki/berlaku pada masing-masing Desa Adat di Bali.

Di antara dua cara yang selama ini digunakan dalam mendorong Desa Adat di Bali menyuratkan atau mengubah *Awig-Awig*, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali condong menjadikan cara pertama sebagai acuan dalam menyesuaikan *Awig-Awig* sesudah diberlakukan Perda Desa Adat di Bali 2019. Dimaksud cara pertama yaitu lebih menitikberatkan pada 'arah' dan 'tujuan' dalam pembinaan dan penyuratan *Awig-Awig*, sedangkan mengenai substansi *Awig-Awig* diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Desa Adat di Bali untuk merumuskan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Cara ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, seperti:

1. Hampir semua Desa Adat di Bali telah memiliki *Awig-Awig* tertulis, sehingga pada dasarnya yang dilakukan bukan membuat *Awig-Awig* tertulis yang baru, melainkan merevisi atau penyesuaian beberapa ketentuan *Awig-Awig* tertulis yang telah ada dengan situasi dan kondisi masyarakat terkini dan/atau menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Merevisi *Awig-Awig* tertulis yang sudah ada dengan cara menitikberatkan pada 'arah' dan 'tujuan' dalam pembinaan dan penyuratan *Awig-Awig*, mengandung arti lebih memberikan keleluasaan kepada masing-masing Desa Adat di Bali untuk menata Desa Adatnya sesuai situasi, kondisi, dan potensi yang ada/dimiliki oleh masing-masing Desa Adat serta sesuai pula dengan adat kebiasaan yang diwarisi secara turun-temurun yang dikenal dengan sebutan '*desa mawacara*'.

Walaupun demikian, tidak berarti bahwa masing-masing Desa Adat di Bali dapat menata Desa Adat-nya dan/atau merumuskan *Awig-Awig* tertulis dengan sepenuhnya mengacu kepada spirit '*desa mawacara*'. Kalau demikian adanya dikhawatirkan dapat memunculkan kesimpangsiuran *Awig-Awig* Desa Adat di Bali yang susah dimengerti karena masing-masing di antara 1.493 Desa Adat di Bali kemungkinan akan memiliki *Awig-Awig* dengan sistematika dan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kenyataan ini selain dapat membingungkan, juga tidak sejalan dengan asas '*Bali mawacara*' seperti yang tercantum dalam Perda Desa Adat di Bali 2019. Yang dimaksud dengan "*Bali mawacara/kesatuan Bali*" adalah kesamaan hukum adat yang berlaku di Bali, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran *Awig-Awig* dan untuk lebih menjamin terwujudnya keseimbangan antara '*desa mawacara*' dan '*Bali mawacara*', dalam buku "Panduan Penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat di Bali oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021" ini ditentukan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merevisi atau menyesuaikan ketentuan *Awig-Awig* tertulis yang telah ada, seperti: (a) perubahan situasi dan kondisi atau perkembangan dan kemajuan masyarakat karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (b) perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan maksud untuk memenuhi tujuan tersebut, buku "Panduan Penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat di Bali" oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Dimulai dengan menyampaikan Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang, Tujuan, dan Manfaat disusunnya buku ini. Dilanjutkan dengan Tinjauan Umum Desa Adat di Bali, *Awig-Awig*, dan Tata Cara Penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat di Bali. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Contoh Sistematika *Awig-Awig* Desa Adat di Bali Disertai Beberapa Catatan yang dituangkan dalam judul Bab (*Sargah*), Bagian (*Palet*), Paragraf (*Indik*), dan Pasal (*Pawos*), tanpa disertai rumusan substansi *Awig-Awig* secara langsung dalam Pasal/*Pawos* masing-

masing. Terakhir dikemukakan Tinjauan Umum Tentang *Pararem* dan Contoh *Pararem* Desa Adat di Bali.

Guna membantu dan sekaligus memudahkan bagi masing-masing Desa Adat di Bali merumuskan substansi *Awig-Awig* yang akan direvisi/disesuaikan, dalam sistematika ini juga disertai beberapa catatan kaki (*foot note*) mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu merumuskan substansi revisi *Awig-Awig*, baik yang berhubungan dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat dewasa ini maupun yang berhubungan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*'Bali mawacara'*). Selain itu dalam buku ini juga disertai dua contoh *Awig-Awig* yang sudah direvisi (disesuaikan dengan Perda Desa Adat di Bali 2001), yaitu (1) *Awig-Awig* Desa Adat Denpasar, 2021, dan (2) *Awig-Awig* Desa Adat Tanglad, Klungkung, 2021.

Dengan cara seperti itu diharapkan masing-masing Desa Adat di Bali memiliki keleluasaan dalam merumuskan substansi revisi *Awig-Awig* dan menata Desa Adatnya sesuai situasi, kondisi, dan potensi yang ada/dimiliki oleh masing-masing Desa Adat serta sesuai pula dengan adat kebiasaan yang diwarisi secara turun-temurun yang dikenal dengan sebutan *'desa mawacara'*.

Dengan cara seperti itu juga diharapkan revisi *Awig-Awig* tertulis yang dilakukan mencerminkan *'desa mawacara'* dan juga mencerminkan *'Bali mawacara'*. Atau dengan kata lain dapat dikemukakan *'desa mawacara'* dan juga *'Bali mawacara'* masing-masing mendapatkan porsi yang patut sesudah *Awig-Awig* tertulis direvisi atau disesuaikan.

Perlu juga dikemukakan, walaupun usaha penyuratan *Awig-Awig* dimaksudkan untuk memudahkan dalam menemukan, mempelajari, dan melaksanakan *Awig-Awig*, tetapi banyak hal yang seharusnya tercantum dalam *Awig-Awig* tersurat ternyata belum disuratkan karena menghadapi berbagai kesulitan dan bahkan ditemui beberapa ketentuan *Awig-Awig* belum tersurat yang memang tidak mungkin untuk disuratkan. Dalam situasi dan kondisi seperti ini diharapkan agar Desa Adat di Bali senantiasa menjadikan *Awig-Awig* belum tersurat yang diwarisi secara turun-temurun sebagai panduan dalam

mewujudkan *kasukretan* Desa Adat, sepanjang *Awig-Awig* yang dimaksud masih sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat dewasa ini dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian beberapa hal yang perlu ditegaskan terkait dengan usaha penyuratan *Awig-Awig* dengan harapan semoga yang disampaikan dalam buku panduan ini memberi manfaat sesuai tujuan disusunnya buku ini.

Ketua Tim Penyusun,

Wayan P. Windia

**CONTOH SISTEMATIKA AWIG-AWIG
DESA ADAT DI BALI
DISERTAI BEBERAPA CATATAN**

SARGAH I **ARAN, WEWIDANGAN, TIPE, MIWAH STATUS DESA ADAT**

Pawos
(Mengatur tentang nama/*Aran* Desa Adat)

Pawos
(Mengatur tentang wilayah/*Wewidangan* Desa Adat)⁵

Pawos
(Mengatur tentang Tipe Desa Adat)⁶

Pawos
(Mengatur tentang Status Desa Adat)⁷

⁵ Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu merevisi/menyesuaikan *Awig-Awig* yang berhubungan dengan batas Desa Adat, seperti:

- (1) Hindari membuat/menetapkan batas Desa Adat oleh masing-masing Desa Adat, tanpa persetujuan Desa Adat bertetangga.
- (2) Batas Desa Adat hendaknya ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis dengan Desa Adat bertetangga.
- (3) Kesepakatan tertulis mengenai batas Desa Adat diusahakan agar sesuai dengan batas yang diwarisi secara turun temurun dan diusahakan agar batas Desa Adat dibuat/ditetapkan relatif pasti, seperti: jalan, sungai, pangkung, dll, sesuai kesepakatan. Lebih bagus lagi bila dilampirkan Peta Geospasial *Wewidangan* Desa Adat dengan titik-titik koordinat yang jelas.

⁶ Berdasarkan buku-buku mengenai Desa Adat di Bali, dapat diketahui ada tiga tipe Desa Adat di Bali, kalau dilihat dari asal-usulnya, sistem ke-*Prajuru*-an, dan beberapa tradisi lain yang diwarisi secara turun-temurun. Ketiga tipe tersebut, yaitu: (1) Desa Adat *Bali Aga* (dikenal pula dengan sebutan Desa Adat Tua), yaitu Desa Adat yang diperkirakan sudah ada sebelum kehadiran Kerajaan Majapahit di Bali, dengan sistem ke-*Prajuru*-an yang dikenal dengan *Dulu Desa/Ulu Apad* serta tata kelola berdasarkan adat kebiasaan yang khas Desa Adat Bali Aga; (2) Desa Adat *Apanaga*, yaitu Desa Adat yang pada umumnya berlokasi di daerah dataran dan diperkirakan baru ada sesudah kehadiran Kerajaan Majapahit di Bali, dengan sistem ke-*Prajuru*-an dan tata kelola yang banyak dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit; dan (3) Desa Adat *Anyar*, yaitu Desa Adat yang kemunculannya relatif baru karena adanya transmigrasi lokal di Bali. Desa Adat ini umumnya berada di Kabupaten Jembrana.

Keberadaan Desa Adat *Bali Aga* (Desa Adat Tua) masih diakui berdasarkan Pasal 53 Perda Desa Adat di Bali Tahun 2019. Oleh karena itu, dalam melakukan revisi *Awig-Awig* berdasarkan Perda Desa Adat di Bali 2019, sistem ke-*Prajuru*-an dan beberapa tradisi lain yang diwarisi secara turun-temurun sebagai konsekwensi Desa Adat Tua, perlu diperhatikan/dipertahankan sepanjang tidak menimbulkan permasalahan bagi Desa Adat setempat.

⁷ Desa Adat di Bali berkedudukan di wilayah Provinsi Bali dan berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Perda Desa Adat di Bali 2019. Untuk lebih memahami arti dan makna "Desa Adat di Bali berstatus sebagai subyek hukum", agar dibaca dengan cermat penjelasana Pasal 4 dan Pasal 5 Perda Desa Adat di Bali 2019.

SARGAH II **PEMIKUKUH MIWAH PETITIS DESA ADAT**

Pawos
(Mengatur tentang dasar/*Pamikukuh* Desa Adat)⁸

Pawos
(Mengatur tentang tujuan/*Patitis* Desa Adat)

⁸ *Pamikukuh* Desa Adat di Bali adalah

1. Pancasila.
2. *Tri Hita Karana* manut Agama Hindu.
3. Kesepakatan *Paruman* Desa Adat yang dilaksanakan pada hari, tanggal Kesepakatan yang dimaksud pada nomor 3 ini dibuat berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam wadah NKRI, sepanjang yang berhubungan dengan keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau Desa Adat di Bali.
 - b. Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.
 - c. Pergub Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

SARGAH III

AWIG-AWIG, PARAREM, MIWAH PERATURAN LAIN DESA ADAT⁹

Palet 1

Indik *Awig-Awig* Desa Adat

Pawos

(Mengatur wewenang Desa Adat membuat *Awig-Awig*, tatacara pembuatan *Awig-Awig*, bahwa *Awig-Awig* tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan NKRI, daya berlaku *Awig-Awig*, dan *Awig-Awig* wajib didaftarkan di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat/DPMA)

Palet 2

Indik *Pararem* Desa Adat¹⁰

Pawos

(Mengatur wewenang Desa Adat membuat *Pararem*, jenis-jenis *Pararem* yang dapat dibuat oleh Desa Adat, tatacara pembuatan *Pararem*, *Pararem* tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan RI, daya berlaku *Pararem*, *Pararem* wajib didaftarkan di DPMA)

Palet 3

Indik Peraturan Lain Desa Adat

Pawos

⁹ Ketentuan Bab III menitikberatkan pada tata cara merencanakan, menyusun, dan menetapkan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan peraturan lain di Desa Adat. Dalam hubungan dengan revisi *Awig-Awig* yang terkait dengan Bab III, secara umum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti:

- (1) *Awig-Awig*, *Pararem*, atau sebutan lain, yang selama ini sudah ada dan masih berlaku di Desa Adat setempat, baik tertulis maupun belum tertulis, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi Desa Adat setempat (*'desa mawacara'*).
- (2) Memperhatikan ketentuan Pasal 13–17 (untuk *Awig-Awig*), Pasal 18—19 (untuk *Pararem*), dan Pasal 20 (untuk peraturan lain) Perda Desa Adat di Bali 2019.
- (3) Memperhatikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disebut Pergub Pelaksana Perda Desa Adat di Bali 2019).
- (4) Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam NKRI, sepanjang mengenai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) atau Masyarakat Hukum Adat (MHA), Desa Adat, dan Desa Adat di Bali.

¹⁰ Lebih lanjut tentang hal-hal yang berhubungan dengan *Pararem* lihat BUKU TIGA

SARGAH IV SUKRETA TATA PARAHYANGAN DESA ADAT

Palet 1 *Indik Parahyangan Desa Adat*¹¹

¹¹ Pada waktu merevisi atau menyesuaikan *Awig-Awig* dan *Pararem* tertulis mengenai *Parahyangan* Desa Adat (*Kahyangan Tiga*, *Kahyangan Tiyosan*, dan *Pamangku Kahyangan* masing-masing), *Ngwangun Kahyangan*, maupun *Indik Yadnya*, secara umum ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, seperti:

- (1) *Awig-Awig*, *Pararem* atau sebutan lain yang selama ini sudah ada dan masih berlaku di Desa Adat setempat, baik tertulis maupun belum tertulis, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi Desa Adat setempat (*'desa mawacara'*).
- (2) Pasal 7 Perda Desa Adat di Bali 2019 dan Pergub Pelaksana Perda Desa Adat di Bali 2019.
- (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan. Terutama ketentuan Pasal 5, yang, antara lain, menentukan: (1) Pura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi: a. Pura Sad Kahyangan; b. Pura Dang Kahyangan; c. Pura Kahyangan Jagat; d. Pura Kahyangan Desa; e. Pura Swagina; dan f. Pura Keluarga (*Kawitan*, *Sanggah/Merajan*). Lebih lanjut mengenai penjelasan masing-masing Pura sebagaimana tercantum pada ayat (1) diuraikan pada ayat (2), ayat (3), dan seterusnya.
- (4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat.
- (5) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Sk.556/Dja/1986 Tentang Penunjukan Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah.
- (6) Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 11/Kep/I/PHDIP/1994 Tentang Bhisama Kesucian Pura.
- (7) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang *Subak*.
- (8) Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali 13 September 2013 Nomor: 003/SK/MUDP Bali/IX/2013 Tentang Tuntunan Sesana Pecalang.
- (9) Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010, Dikeluarkan Berdasarkan Keputusan *Pasamuhan* Agung III Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali, Diselenggarakan 15 Oktober 2010, Bertempat di Gedung Wiswasabha, Kantor Gubernur Provinsi Bali.
- (10) Hasil-hasil *Pasamuhan* Agung Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali, 2018. Dikeluarkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali, Tahun 2018.
- (11) Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu I – XV, Pemerintah Provinsi Bali, 2003.

Apakah wisatawan akan diizinkan untuk mengunjungi Utama Mandala (*Jeroan Pura*) atau cukup sampai di *Jaba Sisi*, ada baiknya memperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan. Dalam mana, antara lain, ditentukan: (1) Pemeliharaan Pura dilakukan untuk mencegah *Cuntaka* atau *Sebel*, kerusakan, alih fungsi, dan/atau musnahnya Pura. Atas dasar hal tersebut Tim Penyusun Buku Pedoman *Awig-Awig* berpendapat sebaiknya tidak diizinkan memasuki *utama mandala* Pura.

Kahyangan Desa¹²

Pawos

(Mengatur tentang jenis-jenis *Kahyangan* Desa, baik *Kahyangan Tiga* dan/atau *Kahyangan* Desa lainnya, lokasinya, pangemponnya)

Palet 2

Indik Kasukertan Kahyangan

Pawos

(Mengatur tentang pihak yang boleh dan tidak boleh memasuki [*ngeranjing*] ke *Kahyangan* Desa [dikaitkan dengan pura bukan objek wisata melainkan daya tarik wisata], pakaian memasuki [busana *ngeranjing* ke *Kahyangan* Desa], perbuatan/prilaku yang tidak boleh dilakukan di arel *Kahyangan* [*parilaksana sane tan kapatutang ring Kahyangan*], dan sanksi kalau ketentuan di atas dilanggar)

Pawos

(Mengatur tentang *kacuntakan*, mulai dari jenis-jenis *cuntaka*, *sengker*/batas waktu *kacuntakan*, pihak yang tidak kena (*tan keneng*) *cuntaka*, seperti sulinggih, dan lain-lain)

Pawos

(Mengatur tentang bencana yang menimpa *Kahyangan*)

Pawos¹³

(Mengatur hal-hal lain, kalau dipandang perlu, misalnya kalau dipandang perlu mengatur tentang *kerauhan ring Kahyangan*, misalnya jika ada orang pura-pura *kerauhan*)

Palet 3

Indik Ngewangun Kahyangan

Pawos

(Mengatur tentang tatacara *ngewangun*/memperbaiki pura, mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan, biaya-biaya, dan lain-lain)

¹² Yang perlu diatur antara lain: jenis-jenis Pura *Kahyangan* Tiga, lokasinya, *odalannya*, *pangemponnya*. Demikian pula halnya dengan *Kahyangan* lainnya.

¹³ *Pawos* ini dapat dibuat kalau menurut Desa Adat setempat ada hal-hal lain yang perlu diatur berkaitan dengan *Kasukertan Kahyangan*.

Bagian 3
Indik Yadnya

Kaping 1
Dewa Yadnya

Pawos
(Mengatur tentang upacara Dewa Yadnya di Desa Adat)

Kaping 2
Resi Yadnya

Pawos
(Mengatur tentang upacara Resi Yadnya di Desa Adat)

Kaping 3
Pitra Yadnya

Pawos
(Mengatur tentang upacara Pitra Yadnya di Desa Adat)

Kaping 4
Manusa Yadnya

Pawos
(Mengatur tentang upacara Manusa Yadnya di Desa Adat)

Kaping 5
Bhuta Yadnya

Pawos
(Mengatur tentang upacara Buta Yadnya di Desa Adat)

SARGAH V

SUKRETA TATA PAWONGAN DESA ADAT

Palet 1

Indik Pawongan Desa Adat ¹⁴

Indik 1
*Krama*¹⁵

Pawos
(Mengatur tentang jenis-jenis status *Krama* dan pengertian masing-masing)

Pawos¹⁶
(Mengatur tentang *ngawit dados Krama, panumaya tedun makarama*, tentang warga luar yang menjadi *Krama* Desa Adat)

Pawos

Indik 2
Swadharna miwah *Swadikara Krama* Desa Adat ¹⁷

¹⁴ Secara umum perlu dikemukakan agar revisi *Awig-Awig* mengenai *Pawongan* Desa Adat hendaknya memperhatikan kewenangan Desa Adat sebagaimana diatur dalam Pasal 21–27 Perda Desa Adat di Bali 2019.

¹⁵ Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan dengan ketentuan mengenai *Pawongan* Desa Adat, seperti:

- (1) *Awig-Awig, Pararem* atau sebutan lain yang selama ini sudah ada dan masih berlaku di Desa Adat setempat, baik tertulis maupun belum tertulis, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi Desa Adat setempat (*'desa mawacara'*).
- (2) Pasal 8 dan Pasal 9 Perda Desa Adat di Bali 2019 dan Pergub Pelaksana Perda Desa Adat di Bali 2019.

¹⁶ Selain itu mengelompokkan *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*, ada baiknya juga dicantumkan mengenai *Krama Balu* dan *Krama Daa Tua*, termasuk *Krama Mulih Daa* (bagi yang melangsungkan perkawinan *biasa* dan perkawinan *nyentana*) terutama berkaitan dengan kewajiban dan hak masing-masing *krama* yang dimaksud.

Permasalahan biasanya muncul pada waktu merumuskan *swadharna* (kewajiban) dan *swadikara* (hak) masing-masing *krama* Desa Adat, seperti disebutkan di atas. Dalam hal ini diingatkan bahwa tujuan penyuratan *Awig-Awig*, antara lain, untuk menciptakan *kasukretan* (kedamaian) Desa Adat dan bukan untuk yang lain. Oleh karena itu, setiap perumusan ketentuan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* hendaknya diarahkan untuk menciptakan *kasukretan* Desa Adat setempat.

¹⁷ Menghindari tumpang tindih *swadharna* antara *krama* Desa Adat dengan *krama subak*, ada baiknya sebelum merumuskan *swadharna krama* Desa Adat diawali dengan membaca Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang *Subak*.

Pawos

(Mengatur tentang *swadharna/tetegenan/kewajiban Krama* sesuai status *Krama*, dispensasi (*Krama Desa kadadosang*))

Pawos

(mengatur *swadikara/hak-hak Krama*)

Pawos

(Mengatur tentang berhenti menjadi *Krama*: kapan berhenti menjadi *Krama* serta kewajiban/hak *Krama* yang berhenti)

Indik 3

Indik Panyangran Karya Suka Duka

Pawos

(Mengatur *panyangran Krama* Desa Adat saat salah satu *Krama* menyelenggarakan *Karya Suka Duka*: hak *Krama* yang melaksanakan *karya*, kewajiban *Krama* Desa Adat dalam hal salah satu *Krama* menyelenggarakan *karya*)

Palet 2

Indik Tata Pemerintahan Desa Adat ¹⁸

Indik 1

Prajuru / Paduluan Desa Adat

Pawos

(Mengatur tentang penyelenggara pemerintahan Desa Adat dan Banjar Adat, misalnya: Desa Pakraman X *kaenter olih Prajuru sane kapucukin olih Bandeda*), Struktur pemerintahan Desa Adat, serta tugas dan fungsi masing-masing struktur

¹⁸ Dalam hubungan dengan perumusan Tata Pemerintahan Desa Adat dalam *Awig-Awig* Desa Adat, ada beberapa ketentuan yang perlu mendapat perhatian, seperti:

- (1) *Awig-Awig, Pararem*, atau sebutan lain yang selama ini sudah ada dan masih berlaku di Desa Adat setempat, baik tertulis maupun belum tertulis, yang dirumuskan demikian rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi Desa Adat setempat (*'desa mawacara'*).
- (2) Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 sampai Pasal 34 Perda Desa Adat di Bali 2019.

Pawos
(Mengatur tatacara *ngadegang/ngentosin Prajuru/Paduluan* Desa Adat dan *masa ayahan/masa jabatan*)

Pawos
(Mengatur *swadharma* miwah *swadikara Prajuru*)

Pawos
(Mengatur *swadikara/olih-olihan Prajuru*)

Pawos
(Mengatur tentang pemberhentian/pergantian *Prajuru*)

Indik 2
Shaba Desa¹⁹
Pawos
(Mengatur tentang pengertian, tugas, dan fungsi Sabha Desa)

Pawos
(mengatur tentang tatacara *ngadegang*, syarat-syarat, serta masa jabatan/*masa ayahan* Sabha Desa)

Pawos
(Mengatur struktur Sabha Desa)

Pawos
(Mengatur *sasana, swadharma*, dan *swadikara* anggota Sabha Desa)

Pawos
(Mengatur pemberhentian/pergantian anggota Sabha Desa)

Indik 3
Kerta Desa²⁰

Pawos
(Mengatur tentang pengertian, tugas, dan fungsi Kerta Desa)

¹⁹ Dalam merumuskan ketentuan mengenai Sabha Desa dalam *Awig-Awig* Desa Adat, perlu memperhatikan dan menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 34 ayat (1) – Pasal 35 Perda Desa Adat di Bali 2019.

²⁰ Dalam merumuskan ketentuan mengenai Kerta Desa dalam *Awig-Awig* Desa Adat, perlu memperhatikan dan menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 18, Pasal 34 ayat (2) – Pasal 37 Perda Desa Adat di Bali 2019.

Pawos
(mengatur tentang tatacara *ngadegang*, syarat-syarat, serta masa jabatan/*masa ayahan* Kerta Desa)

Pawos
(Mengatur struktur Kerta Desa)

Pawos
(Mengatur *sasana*, *swadharna*, dan *swadikara* anggota Kerta Desa)

Pawos
(Mengatur pemberhentian/pergantian anggota Kerta Desa)

Palet 3 **Indik Lembaga Pengambil Keputusan**

Indik 1
Paruman Desa Adat ²¹

Pawos
(Mengatur jenis-jenis *Paruman* yang ada di Desa Adat serta waktu [*panumaya*] masing-masing)

Pawos
(Mengatur tatacara *Paruman*, syarat quorum, tatacara pengambilan keputusan [*gilik saguluk*, jalan keluar apabila tidak tercapai *gilik saguluk*], kewajiban *Krama* untuk taat kepada putusan *Paruman* serta sanksi apabila mengingkari keputusan *Paruman* yang sudah disepakati)

Pawos
Mengatur hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam *Paruman* [seperti: berkata tidak sopan, meninggalkan *Paruman* tanpa izin *Prajuru* [*tan pasadok*], serta sanksi [*danda*] apabila melanggar ketentuan larangan dalam *Paruman*)

Indik 2
Pasangkepan Krama Desa Adat

²¹ Mengenai perumusan Lembaga Pengambil Keputusan dalam *Awig-Awig* Desa Adat, ada beberapa ketentuan yang perlu mendapat perhatian, seperti:

- (1) *Awig-Awig*, *Pararem*, atau sebutan lain yang selama ini sudah ada dan masih berlaku di Desa Adat setempat, baik tertulis maupun belum tertulis, yang dirumuskan demikian rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi Desa Adat setempat ('*desa mawacara*').
- (2) Pasal 28 ayat (3) Perda Desa Adat di Bali 2019.

Pawos
(Mengatur jenis-jenis *pasangkepan* yang ada di Desa Adat serta waktu [*panumaya*] masing-masing)

Pawos
(Mengatur tatacara *pasangkepan*, syarat quorum, tatacara pengambilan keputusan [*gilik saguluk*, jalan keluar apabila tidak tercapai *gilik saguluk*], kewajiban *Krama* untuk taat kepada putusan *pasangkepan* serta sanksi apabila mengingkari keputusan *pasangkepan* yang sudah disepakati)

Pawos
Mengatur hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam *pasangkepan* [seperti: berkata atau berperilaku tidak sopan, meninggalkan *pasangkepan* tanpa izin *Prajuru* [tan pasadok], serta sanksi [danda] apabila melanggar ketentuan larangan dalam *pasangkepan*)

Palet 5 Indik Lembaga Adat²²

Indik 1
*Paiketan Pamangku*²³

Pawos
(Mengatur bahwa masing-masing pura memiliki *Pamangku*, struktur *Pamangku* dan tugas masing-masing *Pamangku* sesuai struktur)

Pawos
(Mengatur tatacara *ngadegang/ngentosin*, syarat-syarat *Pamangku* dan pembiayaan dalam *ngadegang Pamangku*)

Pawos
(Mengatur *sasana*, *swadharma*, dan *swadikara Pamangku*)

Pawos
(Mengatur tentang pemberhentian *Pamangku*)

Pawos
(Mengatur *Paiketan Pamangku*)

²² Rumusan ketentuan *Awig-Awig* mengenai Lembaga Adat, agar memperhatikan ketentuan Pasal 43 dan seterusnya sampai Pasal 52 Perda Desa Adat di Bali 2019.

²³ Perhatikan ketentuan Pasal 44 Perda Desa Adat di Bali 2019.

Indik 2
*Paiketan Serati*²⁴

Pawos
(Mengatur bahwa masing-masing pura memiliki *Serati*)

Pawos
(Mengatur tatacara *ngadegang/ngentosin*, syarat-syarat *Pamangku* dan pembiayaan dalam *ngadegang Pamangku*)

Pawos
(Mengatur *sasana*, *swadharma*, dan *swadikara Serati*)

Pawos
(Mengatur pemberhentian *Serati*)

Pawos
(Mengatur *Paiketan Serati*)

Indik 3
*Paiketan Wredha*²⁵

(Desa Adat wajib memberikan perhatian kepada para *Wredha* di Desa Adat)

Pawos
(Mengatur *Paiketan Wredha*)

Indik 4
*Pacalang*²⁶

Pawos
(Mengatur tentang pengertian, tugas, dan fungsi *Pacalang*)

²⁴ Perhatikan ketentuan Pasal 45 Perda Desa Adat di Bali 2019.

²⁵ Perhatikan ketentuan Pasal 46 Perda Desa Adat di Bali 2019.

²⁶ Perhatikan ketentuan Pasal 47 Perda Desa Adat di Bali 2019.

Selain itu ketentuan Perda Desa Adat di Bali 2019 seperti tersebut di atas, jangan lupa memperhatikan ketentuan *Awig-Awig*, *Pararem* atau sebutan lain yang selama ini sudah ada dan masih berlaku di Desa Adat setempat, baik tertulis maupun belum tertulis, yang dirumuskan demikian rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi Desa Adat setempat (*'desa mawacara'*).

Pawos
(mengatur tentang tatacara *ngadegang*, syarat-syarat, serta masa tugas *Pacalang*)

Pawos
(Mengatur *Paiketan* dan struktur *Pacalang*)

Pawos
(Mengatur *sasana*, *swadharna*, dan *swadikara* anggota *Pacalang*)

Pawos
(Mengatur pemberhentian/pergantian anggota *Pacalang*)

Indik 5
Yowana Desa Adat²⁷

Pawos
(Mengatur pengertian *Yowana*, bahwa di Desa Adat terdapat *Paiketan Yowana*)

Pawos
(Mengatur tentang kepengurusan *Paiketan Yowana*, tatacara *ngadegang* pengurus, syarat-syarat, dan masa bhakti/*masa ayahan* pengurus *Yowana*)

Pawos
(Mengatur tentang *swadharna* dan *swadikara Paiketan Yowana*)

Pawos
(Mengatur pemberhentian pengurus *Yowana*)

Indik 6
Paiketan Krama Istri Desa Adat²⁸

Pawos
(Mengatur pengertian *Krama Istri*, bahwa di Desa Adat terdapat *Paiketan Krama Istri*)

Pawos
(Mengatur tentang kepengurusan *Paiketan Krama Istri*, tatacara *ngadegang* pengurus, syarat-syarat, dan masa bhakti pengurus *Krama Istri*)

²⁷ Perhatikan ketentuan Pasal 48 Perda Desa Adat di Bali 2019.

²⁸ Perhatikan ketentuan Pakis Pasal 49 Perda Desa Adat di Bali 2019.

Pawos
(Mengatur tentang *swadharma* dan *swadikara Paiketan Krama Istri*)

Pawos
(Mengatur pemberhentian pengurus *Krama Istri*)

Indik 7
*Pasraman*²⁹

Pawos
(Desa Adat memfasilitasi pembentukan *Pasraman*)

Paiketan Pasraman

Pawos
(hanya perlu kalau dalam Desa Adat ada lebih dari satu *Pasraman*, atau *Paiketan Pasraman* lintas Desa Adat)

Indik 8
*Sekaa Miwah Lembaga Adat Tiyosan*³⁰

Pawos
(*Krama* desa dapat membentuk *sekaa* atau lembaga serupa yang lain dan setiap pembentukannya melaporkan/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat)

Palet 6 **Indik Kulawarga**³¹

²⁹ Perhatikan ketentuan Pasal 50 Perda Desa Adat di Bali 2019.

³⁰ Perhatikan ketentuan Pasal 51 Perda Desa Adat di Bali 2019.

³¹ Bagian ini dapat mengacu kepada ketentuan *Awig-Awig, Pararem* atau sebutan lain yang selama ini sudah ada dan masih berlaku di Desa Adat setempat, baik tertulis maupun belum tertulis, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi Desa Adat setempat (*desa mawacara*), yaitu *Sarga Pawongan*, sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut masih berlaku dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Ketentuan lain yang juga perlu mendapat perhatian, seperti:

- (1) *Bhisama* Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Tanggal 29 Oktober 2002, Nomor: 03/Bhisama/Sabba Pandita Parisada Pusat/X/2002 Tentang Pengamalan Catur Warna.
- (2) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali Nomor: 10/D.P.R.D, tanggal 12 Juli 1951. Isinya, antara lain: Menetapkan Pasuaran Penghapusan Adat Yang Disebut "*Manak Salah*" Atau *Buncing*.
- (3) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali Nomor: 11/D.P.R.D, tanggal 12 Juli 1951. Isinya, antara lain: Mencabut *paswara* tahun 1910 yang diubah dengan beslit Residen Bali dan Lombok tgl 13 April 1927 No. 532 sepanjang yang mengenai "*Asu Pundung*" dan "*Anglangkahi Karang Hulu*".

Indik 1
Pawiwahan

Pawos

(Mengatur pengertian perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan yang dibenarkan di Desa Adat bersangkutan [*nganten* biasa, *nyeburin*, dan/atau pada *gelahang*], cara perkawinan yang dibenarkan [*pepadikan* ataukah *ngerorod*], syarat-syarat perkawinan)

Pawos

(Mengatur sahnya perkawinan [sampun kamargiang *makalan-kalaan* dengan *tri upasaksi*], kewajiban mencatatkan perkawinan)

Pawos

(Mengatur tentang prosedur perkawinan, mulai dari *masadok* kepada *Prajuru*, dan seterusnya)

Indik 2
Nyapian/Wusan Merabian

Pawos

(mengatur bubarnya perkawinan: karena kematian atau perceraian)

-
- (4) Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali 13 September 2013 Nomor: 003/SK/MUDP Bali/IX/2013 Tentang Tuntunan Sesana Pecalang
 - (5) Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010, Dikeluarkan Berdasarkan Keputusan *Pasamuhan* Agung III Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali, Diselenggarakan 15 Oktober 2010, Bertempat di Gedung Wiswasabha, Kantor Gubernur Provinsi Bali.
 - (6) Hasil-hasil *Pasamuhan* Agung Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali, 2018. Dikeluarkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali, Tahun 2018.

Perlu ditambahkan bahwa Pasal 2 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali Nomor: 11/D.P.R.D, tanggal 12 Juli 1951 menentukan sebagai berikut. “Yang disebut *Asu Pundung* ialah: Gadis (wanita) dari kasta Brahmanawangsa dikawini oleh laki-laki dari kasta Ksatria, Wesya, dan Sudrawangsa”. Pasal 3 menentukan sebagai berikut. “(a) Gadis (wanita) dari Ksatriyawangsa dikawini oleh laki-laki dari kasta Wesya, Sudrawangsa. (b) Gadis (wanita) dari kasta Wesyawangsa dikawini oleh laki-laki dari kasta Sudrawangsa”. Pasal 4 menentukan sebagai berikut. “Hukum adat yang disebut *Asu Pundung* dan *Anglangkahi Karang Hulu*, termuat pada Pasal 2 dan 3 dihapuskan”.

Pawos

(mengatur akibat hukum putusnya perkawinan karena kematian, menyangkut status suami-istri yang masih hidup [*balu*] dan pemeliharaan anak)

Pawos

(Mengatur jenis-jenis *balu* [*balu lanang/balu luh*], swadharmaning balu, sanksi apabila melalaikan *swadharmaj kapatutan balu*)

Pawos

(mengatur akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian, menyangkut kedudukan suami-istri, kedudukan anak, kedudukan harta perkawinan, serta sanksi adat [kalau ada])

Pawos

(Mengatur prosedur perceraian [secara adat & hukum negara], saat terjadinya perceraian berkaitan dengan *ayahan* Banjar/Desa Adat], dan lain-lain)

Indik 3

Sentana

Pawos

(Mengatur pengertian *sentana* [penerus keturunan], jenis-jenis *sentana* [*pratisentana*/anak kandung dan *sentana paperasan*/anak angkat], dimungkinkannya anak kandung perempuan dikukuhkan menjadi *sentana* [*sentana rajeg*] dan lain-lain)

Pawos

(Mengatur prosedur pengangkatan anak, mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan kewajiban mengurus penetapan Pengadilan)

Pawos

(Mengatur kedudukan anak luar kawin)

Indik 4

Pewarisan

Pawos

(Mengatur pengertian pewarisan, unsur-unsur pewarisan [ada pewaris, warisan, ahli waris])

Pawos

(Mengatur pengertian pewaris)

Pawos
(Mengatur pengertian dan jenis-jenis warisan)

Pawos
(Mengatur pengertian ahli waris dan pihak yang berstatus ahli waris, kedudukan janda, kedudukan anak perempuan yang kawin ke luar, *daa/taruna tua, mulih daha/mulih teruna, swadharmaning* ahli waris, akibat hukum apabila ahli waris tidak melaksanakan *swadharma, ninggal kedaton*)

SARGAH VI SUKRETA TATA PALEMAHAN DESA ADAT

Palet 1 Tanah Miwah Lingkungan Alam Desa Adat³²

³² Secara umum diingatkan agar pada waktu merevisi/menyesuaikan *Awig-Awig* mengenai *Palemahan* Desa Adat, hendaknya memperhatikan dengan baik substansi *Awig-Awig, Pararem*, atau sebutan lain, yang selama ini sudah ada dan masih berlaku di Desa Adat setempat, baik tertulis maupun belum tertulis, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi Desa Adat setempat (*'desa mawacara'*).

Selain itu juga agar memperhatikan ketentuan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Perda Desa Adat di Bali 2019.

- Peraturan perundang-undangan lain yang juga perlu diperhatikan, seperti:
- (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
 - (2) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Sk.556/Dja/1986 Tentang Penunjukan Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah.
 - (3) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang selanjutnya diubah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
 - (4) Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/Kep-19.2/X/2017 Tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai Subyek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah, yang selanjutnya diubah berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 575/SK-HR.01/X/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/Kep-19.2/X/2017 Tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai Subyek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah. Yang diubah adalah nomenklatur Subjek Hak Komunal atas Tanah di Provinsi Bali yang semula Desa Pakraman menjadi Desa Adat.
 - (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang *Subak*.
 - (6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali.

Indik 1
Tanah Desa Adat

(Mengatur bahwa di wilayah/ *wewidangan* Desa Adat terdapat tanah dengan beragam status, misalnya: tanah milik desa, tanah milik pribadi, tanah negara, dan lain-lain)

Pawos

(Mengatur aspek-aspek tanah milik Desa Adat, seperti; jenis-jenis tanah milik Desa Adat, letak dan luas masing-masing, pengelolaan masing-masing, dan pensertifikatan tanah milik Desa Adat, seperti PKD, AyDs, tanah teba, dan lain-lain)

Indik 2
Lingkungan Alam Desa Adat

Pawos

(mengatur mengenai *telajakan* Desa Adat, kewajiban setiap *Krama* melestarikan *telajakan* Desa Adat)

Pawos

(mengatur aspek-aspek lain berkaitan dengan lingkungan alam Desa Adat, misalnya hutan Desa Adat, mengenai sampah)

Palet 2
Karang miwah Tegal

Pawos

(mengatur kewajiban *Krama* membuat batas-batas yang jelas mengenai *karang* dan *tegal*, dan siapa yang wajib membuat serta memelihara batas-batas tersebut, misalnya, batas barat dan *kelod* oleh siapa, utara dan timur oleh siapa (sesuai prinsip *magaleng ka ulu, magaleng ka teben*)

Pawos

(mengatur *karang kabebeng/kabembeng*)

Pawos

(Mengatur bahwa *Krama* tidak boleh *ngalah-alah tegal/karang, margi, tegak kahyangan*, dan lain-lain)

(7) Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 11/Kep/I/PHDIP/1994 Tentang Bhisama Kesucian Pura.

Palet 3

Wewangunan, Wewalungan, Miwah Pepayonan

Indik 1
Wewangunan

Pawos
(Mengatur tatacara membangun, seperti *masadok* kepada *Prajuru*, *wewangunan ngenenin wates*, *nyayubin pisaga*, pembuangan limbah, dan lain-lain serta sanksi apabila ketentuan itu dilanggar)

Pawos
(Perlu diatur syarat-syarat khusus bagi orang yang bukan *Krama* Desa yang membangun di wilayah Desa Adat untuk mengantisipasi *Krama tamu* atau *tamiu* (investor) membangun di wilayah Desa Adat)

Indik 2
Wewalungan

Pawos
(Mengatur kewajiban setiap *Krama* yang memiliki *wewalungan*, baik binatang ternak (sapi, babi, kambing, dan lain-lain) maupun binatang piaraan (anjing, kucing, dan lain-lain) untuk menjaga ternak atau piaraannya supaya tidak menimbulkan kerugian bagi *Krama* lain serta sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar)

Pawos
(Perlu diatur larangan-larangan yang berkaitan dengan pelestarian binatang liar, seperti tidak boleh berburu burung, meracuni ikan di lingkungan wilayah Desa Adat)

Indik 3
Pepayonan

Pawos
(Mengatur syarat-syarat menanam pohon (*tanem tuuh*) dari batas tegal/pekarangan, dahan pohon yang *ngungkulin*, *nyayubin* dan sanksi apabila ketentuan dilanggar)

Pawos
(Diatur apabila ada *dresta* larangan menebang pohon tertentu di wilayah Desa Adat atau di tanah milik Desa Adat atau hutan adat/negara)

Palet 4
Kawasan Perdesaan Desa Adat

Indik 1
Nglestariang Palemahan miwah kawasan Perdesaan Desa Adat

Pawos

SARGAH VII
PADRUWEN, UTAHA, MIWAH PENGANGGARAN DESA ADAT

Palet 1
Padruwen Desa Adat³³

Pawos
(Mengatur/mendeskripsikan milik Desa Adat,
baik dalam hubungan dengan *parahyangan* maupun *palemahan*)

³³ Dalam hal ini perlu memperhatikan ketentuan Perda Desa Adat di Bali 2019, terutama: (a) Ketentuan Pasal 55 dan Pasal 59 Perda Desa Adat di Bali 2019; (b) Ketentuan *Awig-Awig, Pararem*, atau sebutan lain, yang selama ini sudah ada dan masih berlaku di Desa Adat setempat, baik tertulis maupun belum tertulis, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi Desa Adat setempat (*'desa mawacara'*), sepanjang mengenai *padruwen* Desa Adat.

Selain memperhatikan Pasal 55 dan Pasal 59 Perda Desa Adat di Bali 2019, dalam hubungan dengan *padruwen* Desa Adat bidang *palemahan*, perlu memperhatikan beberapa ketentuan hukum positif terkait, seperti:

- (1) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Sk.556/Dja/1986 Tentang Penunjukan Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah.
- (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang selanjutnya diubah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- (3) Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/Kep-19.2/X/2017 Tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai Subyek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah, yang selanjutnya diubah berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 575/SK-HR.01/X/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/Kep-19.2/X/2017 Tentang Penunjukan Desa Pakraman Di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah. Yang diubah adalah nomenklatur Subjek Hak Komunal atas Tanah di Provinsi Bali yang semula Desa Pakraman menjadi Desa Adat.

Palet 2
Indik Usaha Desa Adat

Pawos

(Mengatur tentang usaha-usaha yang dimiliki oleh Desa Adat, seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD), *Bhaga Usaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA), dan lain-lain)

Palet 3
Indik Penganggaran Desa Adat

Pawos

(Mengatur sumber-sumber pendapatan untuk anggaran Desa Adat, prosedur penganggaran Desa Adat, dan lain-lain)

SARGAH VIII
TATA HUBUNGAN,
KERJASAMA MIWAH MAJELIS DESA ADAT

Palet 1
Tata Hubungan Kerjasama Desa Adat³⁴

Pawos

(Mengatur kerjasama antara Desa Adat satu dengan Desa Adat lain dalam berbagai program dan kegiatan)

Palet 2
Majelis Desa Adat³⁵

Pawos

(Mengatur pernyataan bahwa Desa Adat ini mengikatkan diri dalam wadah persatuan Desa Adat [MDA] dan menyatakan setia kepada MDA, Desa Adat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan MDA sesuai tingkatan, Desa Adat taat kepada putusan MDA)

³⁴ Perlu memperhatikan ketentuan Pasal 81 sampai Pasal 85 Perda Desa Adat di Bali 2019.

³⁵ Perlu memperhatikan ketentuan Pasal 72, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 78, dan pasal 79 Perda Desa Adat di Bali 2019.

Ketentuan lain yang juga perlu diperhatikan, seperti: (1) Kode Etik Organisasi MDA Bali; (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MDA Bali.

SARGAH IX BAYA, KULKUL, WICARA, MIWAH DANDA

Palet 1 Indik Baya³⁶

Pawos

(Mengatur jenis *baya*, kewajiban *Krama* dalam hal terjadi *kapancabayan*, tugas *Prajuru* dalam hal terjadi *kapancabayan*)

Palet 2 Indik Kukul

Pawos

(Mengatur fungsi *kukul* sebagai sarana komunikasi di Desa Adat, jenis-jenis *kukul* di Desa Adat, *tabuh tetepakan* [*tetengeran*] *kukul* sesuai keperluan [untuk *parum*, *patedunan ngayah*, *tetengeran* kematian, *kapancabayan*, dan lain-lain], pihak yang berwenang *nepak kukul*, sanksi apabila *kukul katepak* oleh orang tidak berwenang dan lain-lain]

³⁶ Mengenai *Baya*, *Kukul*, *Wicara*, dan *Danda*, perlu memperhatikan dan/atau menjadikan panduan ketentuan *Awig-Awig*, *Pararem*, atau sebutan lain, yang selama ini sudah ada dan masih berlaku di Desa Adat setempat, baik tertulis maupun belum tertulis, yang dirumuskan demikian rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi Desa Adat setempat ('*desa mawacara*').

- Selain itu ada beberapa ketentuan yang juga perlu diperhatikan, seperti:
- (1) Hasil *Pasamuhan* Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali Ke-17 Tanggal 27 Februari 1997 Pedoman Pelaksanaan *Pananjung Batu*.
 - (2) Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali 13 September 2013 Nomor: 003/SK/MUDP Bali/IX/2013 Tentang Tuntunan *Sesana Pacalang*.
 - (3) Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Nomor: 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010, Dikeluarkan Berdasarkan Keputusan *Pasamuhan* Agung III Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali, Diselenggarakan 15 Oktober 2010, Bertempat di Gedung Wiswasabha, Kantor Gubernur Provinsi Bali.
 - (4) Hasil-hasil *Pasamuhan* Agung Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali, 2018. Dikeluarkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali, Tahun 2018.
 - (5) Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat.

Palet 3 **Indik Wicara**

Pawos

(Mengatur jenis-jenis *wicara* yang terjadi di Desa Adat [*wicara* adat, non adat], Desa Adat berwenang menyelesaikan *wicara* adat, *wicara* non-adat diserahkan kepada pihak berwenang dengan tetap memberi kesempatan kepada pihak yang *mawicara* meminta penyelesaian secara adat atas dasar sukarela)

Pawos

(Mengatur lembaga yang berwenang menyelesaikan *wicara*, baik di tingkat Banjar Adat maupun Desa Adat)

Pawos

(mengatur tatacara penyelesaian *wicara* adat)

Pawos

(Mengatur tentang dimungkinkannya upaya hukum [keberatan] terhadap keputusan penyelesaian *wicara* di tingkat Desa Adat dengan memohon penyelesaian kepada MDA sesuai tingkatan, serta batas waktu untuk mengajukan keberatan dihitung sejak putusan Desa Adat)

Pawos

(Mengatur pelaksanaan [eksekusi] putusan/kesepakatan penyelesaian *wicara* yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, siapa yang melaksanakan, dan sanksi bagi pihak yang tidak menaati hasil penyelesaian *wicara* yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap)

Palet 4 **Indik Danda**

Pawos

(Mengatur kewenangan Desa Adat menjatuhkan sanksi adat [*pamidanda*] jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak yang dinyatakan bersalah [mulai dari sanksi yang paling ringan, sedang, dan terberat] dikaitkan dengan *wicara* di bidang *pawongan*, *palemahan*, *parahyangan*; serta pengertian masing-masing jenis sanksi tersebut)

Pawos

(Mengatur tahapan dan prosedur penjatuhan sanksi dari yang ringan, sedang, dan terberat, serta batas waktu [*sengker*, *waneng*] masing-masing tahapan)

Pawos

(Mengatur tentang pihak/lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi)

SARGAH X
PEMBANGUNAN DESA ADAT
MIWAH PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DESA ADAT

Pawos
(Mengatur mengenai Pembangunan Desa Adat)³⁷

Pawos
(Mengatur mengenai Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat)³⁸

SARGAH XI
PEMBINAAN LAN PENGAWASAN, PEMBERDAYAAN,
MIWAH PELESTARIAN DESA ADAT

Palet 1

Indik 1
Pembinaan
Pawos

Indik 2
Pengawasan³⁹

Pawos
(Mengatur tentang peran Desa Adat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan adat di Desa Adat)

³⁷ Perlu memperhatikan ketentuan Pasal 87 sampai Pasal 89 Perda Desa Adat di Bali 2019.

³⁸ Perlu memperhatikan ketentuan Pasal 90 sampai Pasal 92 Perda Desa Adat di Bali 2019.

Selain memperhatikan pasal-pasal Perda Desa Adat di Bali 2019 seperti telah disebutkan di atas, dalam hubungan dengan pembangunan Desa Adat dan Kawasan Perdesaan Desa Adat, perlu juga memperhatikan:

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 95/Lembaga Adat Desa dan Pasal 96 sampai 102/Penataan Desa Adat.
- (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
- (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak.
- (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali.
- (5) Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 11/Kep/I/PHDIP/1994 Tentang Bhisama Kesucian Pura.

³⁹ Perlu memperhatikan ketentuan Pasal 93 dan pasal 94 Perda Desa Adat di Bali 2019.

**Palet 2
Indik 1
Pemberdayaan**

Pawos

**Indik 2
Pelestarian⁴⁰**

Pawos

(Mengatur tentang peran Desa Adat dalam melakukan Pemberdayaan dan Pelestarian Kelembagaan Adat di Desa Adat)

**SARGAH XII
NGUWAH NGUWUHIN AWIG-AWIG MIWAH PARAREM⁴¹**

Pawos

(Mengatur tatacara perubahan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem*)

⁴⁰ Perlu memperhatikan ketentuan Pasal 95 Perda Desa Adat di Bali 2019.

Selain kedua catatan kaki di atas, perlu juga memperhatikan *Awig-Awig*, *Pararem*, atau sebutan lain, yang selama ini sudah ada dan masih berlaku di Desa Adat setempat, baik tertulis maupun belum tertulis, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi Desa Adat setempat (*desa mawacara*). Hal ini dimaksudkan agar dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberdayaan dan pelestarian Desa Adat, tetap diupayakan dengan cara-cara yang sesuai adat kebiasaan setempat (senantiasa menjunjung kesopanan dan kesantunan).

⁴¹ Tidak gampang merumuskan dan menyusun *Awig-Awig* dan *Pararem* tersurat. Merevisi atau menyesuaikan ketentuan *Awig-Awig* dan *Pararem* tersurat juga tidak dapat dianggap enteng. Bukan berarti *Awig-Awig* dan *Pararem* yang sudah tersurat dan juga sudah *kapasupati*, tidak dapat diubah atau direvisi. *Awig-Awig* dan *Pararem* yang sudah tersurat dan juga sudah *kapasupati*, dapat diubah, direvisi, atau disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Hanya saja, disarankan untuk tidak 'terlalu rajin' dalam mengubah, merevisi, atau menyesuaikan *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat, agar energi tidak terkuras hanya untuk mengubah atau merevisi *Awig-Awig* dan *Pararem*.

Sekali lagi perlu dikemukakan, bahwa usaha menyuratkan *Awig-Awig* Desa Adat mengandung arti, antara lain: (1) menyuratkan *Awig-Awig* yang sebelumnya tidak tersurat; (2) merevisi *Awig-Awig* yang sudah tersurat; (3) menyesuaikan sistematika *Awig-Awig* tersurat; dan (4) menyusun buku *Awig-Awig* tersurat.

Semua dilakukan dengan memperhatikan:

- (1) Ajaran agama Hindu.
- (2) *Awig-Awig*, *Pararem*, atau sebutan lain, yang selama ini sudah ada dan masih berlaku di Desa Adat setempat, baik tertulis maupun belum tertulis, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi Desa Adat setempat (*desa mawacara*).
- (3) Aturan perundang-undangan yang berlaku dalam wadah NKRI.

SARGAH XIII PAMUPUT

Pawos

(Mengatur saat berlakunya *Awig-Awig* [saat *kasungkemin*], pernyataan mengenai hal-hal yang belum diatur akan berlaku *dresta* yang sudah berjalan didahului dengan *Pararem*)

Pawos

(mengatur aturan peralihan)⁴²

Pawos

Ketentuan Penutup

⁴² Untuk lebih memahami substansi yang patut dicantumkan dalam Bab Penutup *Awig-Awig* tersurat, agar mencermati ketentuan Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 Perda Desa Adat di Bali 2019. Selain itu perlu ditegaskan, bahwa sesudah *Awig-Awig* tersurat berhasil disusun, tidak berarti bahwa semua ketentuan *Awig-Awig* yang belum tersurat (adat kebiasaan tidak tertulis yang telah diwarisi secara turun temurun) dinyatakan tidak berlaku. Atau dengan kata lain dapat dikemukakan: walaupun Desa Adat sudah memiliki *Awig-Awig* tersurat, ketentuan *Awig-Awig* yang belum tersurat (adat kebiasaan tidak tertulis yang telah diwarisi secara turun-temurun) tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam *Awig-Awig* tersurat, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : *Buda Umanis, Julungwangi*, 27 Oktober 2021

PASAMUHAN AGUNG II
MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI
Pimpinan *Pasamuhan*

Patengen Agung,



Ir. I Gede Arya Sena, M.Kes

a.n. *Bandesa Agung,*
Patajuh Bidang Kelembagaan



Dr. Drs. I Made Wena, M.Si

Panyarikan Agung,



I Ketut Sumarta

LAMPIRAN 1

Contoh Awig-Awig Desa Adat Denpasar

အပိုကပိုကျ
AWIG-AWIG



၇၃၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀
DESA ADAT DENPASAR

ហតិក្សត្សធិបិកិ

ហតិក្សត្សធិបិកិ	ក្រ
ឌុំដំបូង	៣
ប្រមាណស្កន្ត	ហរក្សត្សធិបិកិ	៣១
គ្រិស្ណស្កន្ត	បិទិទិស្កន្តធិបិកិ	ក្រ១
ស្វាយស្កន្ត	ស្កន្តធិបិកិ	ក្រក្រ
	បញ្ចសិ ក្រ ហិក្សត្សធិបិកិ	ក្រក្រ
	បញ្ចសិ ក្រ ហរក្សត្សធិបិកិ	ក្រក្រ
	បញ្ចសិ ក្រ ហិក្សត្សធិបិកិ	ក្រក្រ
	បញ្ចសិ ៣ ហិក្សត្សធិបិកិ	ក្រ៣
	បញ្ចសិ ១ ហិក្សត្សធិបិកិ	ក្រក្រ
ស្កន្តស្កន្ត	ស្កន្តធិបិកិ	ក្រក្រ
	បញ្ចសិ ក្រ ហិក្សត្សធិបិកិ	ក្រក្រ
	បញ្ចសិ ក្រ ហិក្សត្សធិបិកិ	ក្រ៣
	បញ្ចសិ ក្រ ហិក្សត្សធិបិកិ	ក្រ៣
	បញ្ចសិ ៣ ហិក្សត្សធិបិកិ	ក្រ៣
	បញ្ចសិ ១ ហិក្សត្សធិបិកិ	ក្រក្រ
បញ្ចស្កន្ត	ស្កន្តធិបិកិ	៣ក្រ
	បញ្ចសិ ក្រ ហិក្សត្សធិបិកិ	៣ក្រ
	បញ្ចសិ ក្រ ហិក្សត្សធិបិកិ	៣ក្រ
	បញ្ចសិ ក្រ ហិក្សត្សធិបិកិ	៣ក្រ
	បញ្ចសិ ៣ ហិក្សត្សធិបិកិ	៣ក្រ
	បញ្ចសិ ១ ហិក្សត្សធិបិកិ	៣ក្រ
ស្កន្តស្កន្ត	ស្កន្តធិបិកិ	៣ក្រ
	បញ្ចសិ ក្រ ហិក្សត្សធិបិកិ	៣ក្រ
	បញ្ចសិ ក្រ ហិក្សត្សធិបិកិ	៣ក្រ
	បញ្ចសិ ក្រ ហិក្សត្សធិបិកិ	៣ក្រ
	បញ្ចសិ ៣ ហិក្សត្សធិបិកិ	៣ក្រ
	បញ្ចសិ ១ ហិក្សត្សធិបិកិ	៣ក្រ
	បញ្ចសិ ១ ហិក្សត្សធិបិកិ	៣ក្រ
	បញ្ចសិ ក្រ ហិក្សត្សធិបិកិ	៣ក្រ

Daging Buku Awig-Awig

Daging Buku Awig-Awig	1
Murda Citta.....	3
Prathamas Sargah: Aran lan Wewidangan Désa	4
Dwityas Sargah: Petitis lan Pamikukuh	10
Tretiyas Sargah: Sukerta Tata Pakraman	11
Palet 1 Indik Krama	11
Palet 2 Para Yogya Désa	17
Palet 3 Indik Kulkul	22
Palet 4 Indik Paruman	24
Palet 5 Indik Druwén Désa	27
Caturthas Sargah: Sukerta Tata Agama	29
Palet 1 Indik Déwa Yadnya	29
Palet 2 Indik Rsi Yadnya	31
Palet 3 Indik Pitra Yadnya	31
Palet 4 Indik Manusa Yadnya	38
Palet 5 Indik Bhuta Yadnya	39
Pancamas Sargah: Sukerta Tata Pawongan	41
Palet 1 Indik Pawiwahan	41
Palet 2 Indik Nyapihan	42
Palet 3 Indik Sentana	43
Palet 4 Indik Warisan	45
Sad Sargah: Sukerta Tata Palemahan	48
Palet 1 Karang, Tegal, lan Carik	48
Palet 2 Papayonan	49
Palet 3 Wawangunan	50
Palet 4 Wawalungan	51
Palet 5 Indik Karesikan utawi Kabresihan	52
Palet 6 Indik Dusta lan Bhaya	52
Palet 7 Indik Panyanggran Karyan Krama	54

ສະຫຼຸບສູນທຳ ບໍລິຫານທຳລາຍຜູ້ ແລະ ທຳລາຍຜູ້ ແລະ ທຳລາຍຜູ້ ໑໓໑

ບຸກຄົນ ທຳ ບໍລິຫານທຳລາຍຜູ້ ແລະ ທຳລາຍຜູ້ ໑໓໑

ບຸກຄົນ ທຳ ບໍລິຫານທຳລາຍຜູ້ ແລະ ທຳລາຍຜູ້ ໑໓໑

ສະຫຼຸບສູນທຳ ທຳລາຍຜູ້ບໍລິຫານທຳລາຍຜູ້ ແລະ ທຳລາຍຜູ້ ໑໓໑

ສະຫຼຸບສູນທຳ ທຳລາຍຜູ້ ແລະ ທຳລາຍຜູ້ ໑໓໑

Saptamas Sargah: Wicara lan Pamidanda	54
Palet 1 Indik Wicara	54
Palet 2 Indik Pamidanda	55
Astamas Sargah: Nguwah-nguwuhin Awig-Awig	57
Nawamas Sargah: Samapta	57

MURDA CITTA

Om Swastyastu,

Om Nama Siwa ya, Om Sri Pasupatastra, Om Awighnamastu Nama Swaha.

Mangkana panamaskaran mami kabéh ri Sang Hyang Parama Wisésa siddha amanggih dirghayuûa tan kataman lara wighna pinakang hulun kabéh krama Désa Adat Dénpasar. Sembah bhakti miwah pangastawan krama majeng ring paduka bhatara bhatari sesuwunan sami, riantukan wantah malarapan antuk panghyang ning kalih pasuécan Ida Hyang Widhi Aasa, asung kreta wara nugraha nresti jagat jangkep rawuhing sadagingnya sami, mawinan wénten kahuripan sakala niskala ring bhuwana agung miwah bhuwana alit.

Manut dresta, désané kamanggehang dados pasayuban krama désa rawuhing kulawarga pawongania sami, mawastu raris désané kamanggehang pinaka pawakan bhuwana agung, pawongannya kamanggehang pinaka pawakan bhuwana alit. Sotaning pawakan bhuwana agung, désané taler kamanggehang pinaka pawakan bhawa mahurip, sané kacirénin antuk kawéntenan pakilitan Tri Hita Karana sané tan dados pasahang, luihé:

- ha. Parhyangan, inggih punika sahanan parhyangan panyiwian désa, genah ngarcana prabhawan Ida Hyang Parama Wisésa, pinaka jiwa pramanan désané;
- na. Pawongan, inggih punika gebogan krama rawuhing warga désa maka sami pawakan Tri Kaya pinaka bayu pramanan désané, mawinan désané prasida masolah prawreti;
- ca. Palemahan, inggih punika sahananing pakarangan, tegal, carik, miwah sétra sakekuwuban désa adat, pinaka sthula sariran désané.

Putusing paruman krama Désa Adat Dénpasar, gumawé awig-awig désa adat, désa mawa cara wastu kasiddhan prayojanan mami kabéh kateka tekéng dlaha, prasama pada sumungkem muwang ngamanggehaken kadi linging awig-awig iki. Awig-awig puniki puput kararemin nemoning rahina, Anggara Pon Merakih tanggal 1 Juni 2021 Maséhi (Saka warsa 1943)

Om Santih, Santih, Santih, Om

ប្រមាណស្រី
ហោរាគ្រូប្រិមាពាក្យគ្រូ

ហោរាសិក្រ

ក្រ រាជាណាមកស្រីនិមម្មរាជាណាមកស្រី

ក្រ ក្រីក្រស្រីប្រិមាពាក្យគ្រូ
សិរិសិក្រី ៖ រាជាណាមកស្រី
រាជាណាមកស្រី
រាជាណាមកស្រី

សិរិសិក្រី ៖ រាជាណាមកស្រី
រាជាណាមកស្រី
រាជាណាមកស្រី

សិរិសិក្រី ៖ រាជាណាមកស្រី

សិរិសិក្រី ៖ រាជាណាមកស្រី
រាជាណាមកស្រី

ក្រ រាជាណាមកស្រីប្រិមាពាក្យគ្រូ រាជាណាមកស្រី រាជាណាមកស្រី រាជាណាមកស្រី

ហ ប្រិមាពាក្យគ្រូ រាជាណាមកស្រី

ក រាជាណាមកស្រី រាជាណាមកស្រី រាជាណាមកស្រី រាជាណាមកស្រី

ស រាជាណាមកស្រី រាជាណាមកស្រី

ក រាជាណាមកស្រី

ក រាជាណាមកស្រី

ក រាជាណាមកស្រី

១ រាជាណាមកស្រី រាជាណាមកស្រី រាជាណាមកស្រី រាជាណាមកស្រី រាជាណាមកស្រី

ហ រាជាណាមកស្រី

ក រាជាណាមកស្រី

ក រាជាណាមកស្រី

Prathamas Sargah
Aran lan Wewidangan Désa
Pawos 1

1. Désa adat puniki mewasta **Désa Adat Dénpasar**
2. Jebar kakuwub wawidangannya mawates nyatur désa :
 - Sisi Kangin : Désa Adat Pagan,
Désa Adat Yangbatu,
Désa Adat Panjer.
 - Sisi Kelod : Désa Adat Ssetan,
Désa Adat Pedungan,
Désa Adat Kuta.
 - Sisi Kauh : Désa Adat Padang Sambian
 - Sisi Kaja : Désa Adat Ubung,
Désa Adat Peguyangan.
3. Sané kamanggehang ngranjing dados kekuwub wawidangan Désa Adat Dénpasar, manut dresta, lwiré:
 - ha. Pupulan karang paumahan sané sinanggeh palemahan désa adat
 - na. Setra, carik miwah tegal sané wenten ring kakuwub wawidangan désa adat puniki sajabaning palemahan désa adat manggeh ngranjing dados talajakan Désa,
 - ca. Manut trilingganing désa, kekuwub wewidangan;
 1. Utama Mandala
 2. Madya Mandala
 3. Nista Mandala
4. Désa adat puniki ngawidangin 4 Kecamatan, 5 Kelurahan, 10 Désa Dinas, kaepah dados 105 Banjar Adat, luire :
 - ha. Ring Kecamatan Dénpasar Utara
 - I. Désa Pemecutan Kaja
 1. Banjar Margajati

- ១១ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង
- ១២ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុងក្រុង
- ១៣ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុងក្រុង
- ១៤ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង
- ១៥ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង
- ១៦ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង
- ១៧ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង
- ១៨ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង
- ១៩ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង
- ២០ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង
- ២១ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង
- ២២ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង
- ២៣ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង
- ២៤ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង
- ២៥ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង

- ២៦ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង
- ២៧ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង
- ២៨ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង
- ២៩ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង
- ៣០ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង
- ៣១ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង

- ៣២ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង
- ៣៣ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង
- ៣៤ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង
- ៣៥ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង
- ៣៦ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង
- ៣៧ ក្រា ក្រុងក្រុងក្រុង

2. Banjar Balun
3. Banjar Belong Gede
4. Banjar Belong Menak
5. Banjar Panti Sari
6. Banjar Panti Gede
7. Banjar Gerenceng
8. Banjar Tulang Ampiang
9. Banjar KertaJati
10. Banjar Mekar Manis
11. Banjar KertaSari
12. Banjar Semila Jati
13. Banjar Merta Yasa
14. Banjar Tunggul Aji
15. Banjar Kusumajati

II. Désa Dangin Puri Kaja.

1. Banjar Tainsiat
2. Banjar Kaliungu Kaja
3. Banjar Kalanganyar
4. Banjar Umasari
5. Banjar Lumbungsari

III. Désa Dauh Puri Kaja

1. Banjar Lumintang
2. Banjar Wangaya Kaja
3. Banjar Wangaya Kelod
4. Banjar Lelangon
5. Banjar Mekarsari

- ១ រុក្ខជាតិកំពូកកំពូក
- ក កង្កែបកង្កែប
- ខ កង្កែបកង្កែប
- គ កង្កែបកង្កែប
- ឃ កង្កែបកង្កែប
- ង កង្កែបកង្កែប

- ២ រុក្ខជាតិកំពូកកំពូក
- ក កង្កែបកង្កែប
- ខ កង្កែបកង្កែប
- គ កង្កែបកង្កែប
- ឃ កង្កែបកង្កែប
- ង កង្កែបកង្កែប
- ច កង្កែបកង្កែប
- ដ កង្កែបកង្កែប

- ៣ រុក្ខជាតិកំពូកកំពូក
- ក កង្កែបកង្កែប
- ខ កង្កែបកង្កែប

- ៤ រុក្ខជាតិកំពូកកំពូក
- ក កង្កែបកង្កែប
- ខ កង្កែបកង្កែប
- គ កង្កែបកង្កែប
- ឃ កង្កែបកង្កែប
- ង កង្កែបកង្កែប
- ច កង្កែបកង្កែប
- ដ កង្កែបកង្កែប

IV. Désa Dangin Puri Kauh

1. Banjar Tampakgangsul
2. Banjar Belaluan
3. Banjar Belaluan Sadmerta
4. Banjar Tengah
5. Banjar Pucak Sari

na. Ring Kecamatan Dénpasar Timur

I. Kelurahan Dangin Puri

1. Banjar Kayumas Kelod
2. Banjar Bun
3. Banjar Kaliungu Kelod
4. Banjar Abasan
5. Banjar Tegal Sari
6. Banjar Batu Mas

ca. Ring Kecamatan Kuta

I. Kelurahan Kuta

1. Banjar Abianbase

ra. Ring Kecamatan Dénpasar Barat

I. Désa Dauh Puri Kangin

1. Banjar Titih Kelod
2. Banjar Titih Tengah
3. Banjar Titih Kaler
4. Banjar Gemeh
5. Banjar Suci

- ២១ ឆ័រព្យាហាត្តហ្សប្បវិះ
- ក៧ កេត្តាបិឆម្ពិកេតិ។
- ២១ កេត្តាសម្បបញ្ញា។
- ២១ កេត្តាបិវិហារាវាវិ។

- ២១ កុដាតាហ្សប្បវិឆិកុលាភិះ
- ក៧ កេត្តាភេទ្យោត្តិ។
- ២១ កេត្តាភុមិភាត្តិ។
- ២១ កេត្តាណតោល។
- ១ កេត្តាសញ្ញ។
- ១១ កេត្តាភុមិសាវិ។
- ៤១ កេត្តាភុមិហត្ថិ។

- ១១ កុដាតាហ្សប្បវិឆាហ្សរុះ
- ក៧ កេត្តាបិកិយសេតិ។
- ២១ កេត្តាហោត្ថិកេតិ។
- ២១ កេត្តាភិរកេតិ។
- ១១ កេត្តាសុឡ។
- ១១ កេត្តាសិកេតិ។
- ៤១ កេត្តាតិមទេ។
- ៧១ កេត្តាភុមិវិដ្ឋិ។

- ១១ កុដាតាបិមិសុទោត្តិកុលាភិះ
- ក៧ កេត្តាភិកេត្តាភិកេតិ។
- ២១ កេត្តាភិកេត្តិកុដា។
- ២១ កេត្តាភិកេត្តិកេតិ។
- ១១ កេត្តាភិកេត្តិកេតិ។
- ១១ កេត្តាភិកេត្តិកេតិ។
- ១១ កេត្តាភិកេត្តិកេតិ។

II. Kelurahan Dauh Puri

1. Banjar Pekambangan
2. Banjar Catur Panca
3. Banjar Pelita Sari

III. Désa Dauh Puri Kelod

1. Banjar Batu Bintang
2. Banjar Bumi Santhi
3. Banjar Eka Sila
4. Banjar Sanglah
5. Banjar Bumi Sari
6. Banjar Bumi Asri

IV. Désa Dauh Puri Kauh

1. Banjar Pengiasan
2. Banjar Abian Tegal
3. Banjar Beraban
4. Banjar Sumuh
5. Banjar Sebelanga
6. Banjar Jematang
7. Banjar Bumi Werdi

V. Désa Pemecutan Kelod

1. Banjar Tegal Baler Geria
2. Banjar Tegal Gede
3. Banjar Tegal Agung
4. Banjar Tegal Kawan
5. Banjar Tegal Dukuh Anyar

6. Banjar Tegal Langon
7. Banjar Monang Maning
8. Banjar Sampingbuni
9. Banjar Tenten
10. Banjar Batan Nyuh
11. Banjar Buagan
12. Banjar Pekandelan
13. Banjar Sadingsari
14. Banjar Abiantimbul
15. Banjar Margaya
16. Banjar Teges Mas Jati

VI. Kelurahan Pemecutan

1. Banjar Penyaitan
2. Banjar Kerandan
3. Banjar Pemedilan
4. Banjar Busung Yeh Kangin
5. Banjar Busung Yeh Kauh
6. Banjar Alangkajeng Gede
7. Banjar Alangkajeng Menak
8. Banjar Puri
9. Banjar Pemeregan
10. Banjar Celagi Gendong
11. Banjar Gelogor
12. Banjar Tegal Linggah
13. Banjar KertaPura
14. Banjar KertaDharma
15. Banjar Mertha Jaya

໙໑ ກຸທາທຳເກີດສູ່ເອະ

- ໙໑ ກຸທຳເກີດສູ່ເອະ
- ໙໒ ກຸທຳເກີດສູ່ເອະ
- ໙໓ ກຸທຳເກີດສູ່ເອະ
- ໙໔ ກຸທຳເກີດສູ່ເອະ
- ໙໕ ກຸທຳເກີດສູ່ເອະ
- ໙໖ ກຸທຳເກີດສູ່ເອະ
- ໙໗ ກຸທຳເກີດສູ່ເອະ
- ໙໘ ກຸທຳເກີດສູ່ເອະ

໙໒ ກຸທາທຳເກີດສູ່ເອະ

- ໙໒ ກຸທຳເກີດສູ່ເອະ
- ໙໓ ກຸທຳເກີດສູ່ເອະ
- ໙໔ ກຸທຳເກີດສູ່ເອະ
- ໙໕ ກຸທຳເກີດສູ່ເອະ
- ໙໖ ກຸທຳເກີດສູ່ເອະ
- ໙໗ ກຸທຳເກີດສູ່ເອະ
- ໙໘ ກຸທຳເກີດສູ່ເອະ

໙໓ ກຸທາທຳເກີດສູ່ເອະ

- ໙໓ ກຸທຳເກີດສູ່ເອະ

- ໑໑ ກຸທຳເກີດສູ່ເອະ
- ໑໒ ກຸທຳເກີດສູ່ເອະ
- ໑໓ ກຸທຳເກີດສູ່ເອະ

VII. Désa Tegal Kerta

1. Banjar Graha Shanti
2. Banjar Manut Negara
3. Banjar Mertha Gangga
4. Banjar Bhuana Sari
5. Banjar Bhuana Asri
6. Banjar Muliawan
7. Banjar Panca Kerta
8. Banjar Tegal Wangi

VIII. Désa Tegal Harum.

1. Banjar Sari Buana
2. Banjar Asta Buana
3. Banjar Tegal Sari
4. Banjar Cemara Agung
5. Banjar Sanga Agung
6. Banjar Buana Merta
7. Banjar Sapta Bumi

IX. Kelurahan Padang Sambian

1. Banjar Penamparan

5. Adat ring Désa Adat Dénpasar taler manggeh Témpek Désa.
6. Kelihan Banjar Adat ring Désa Adat taler kawastanin Kelihan Témpekan Désa.
7. Awig-awig, pararem miwah sahanan pasuaran désa, manggeh kajejerang ring jebar kakuwub wawidangan Désa Adat Dénpasar.

Pawos 2

1. Wates palemahan wewidangan banjar adat, kapikukuh antuk pamutus paruman krama désa adat.
2. Manut ring munjuk lungsur cacah jiwaan pawongannyané, pah pahan banjar adat rauhing wewidangannyané wenang kaepah malih manut pamutus paruman krama désa adat.
3. Sowang-sowang banjar adat patut madruwé piranti piranti, pamekasnyané; balé banjar, parhyangan, kulkul, miwah sané lianan,
4. Krama banjar adat wenang kaepah dados témpék manut pamutus paruman krama banjar sowang-sowang.

Pawos 3

1. Sowang-sowang banjar adat wenang ngardi awig-awig, pararem pararem maka pamikukuh banjar adatnyané sowang-sowang.
2. Awig-awig, pararem pararem banjar adat tan wenang lémpas ring awig-awig Désa Adat Dénpasar.
3. Awig-awig, pararem banjar adat taler patut kalinggatanganin antuk Bandésa maka pamikukuh kandugi dados kalaksanayang.
4. Sahanan témpékan tan wenang ngardi pararem, saantukan témpékan punika wantah sinanggeh pah pahan banjar adat.

Dwityas Sargah

Patitis lan Pamikukuh

Pawos 4

Désa Adat Dénpasar ngamanggehang pamikukuh, minakadi :

- ha. Pancasila.
- na. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pamekas pasal 18 ayat 6, Pasal 18 huruf B
- ca. Tri Hita Karana, manut sad acara Agama Hindu.
- ra. Hak Azasi Manusia utawi HAM.
- ka. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Désa Adat.

បុរាណសាស្ត្រ

ក្របខណ្ឌនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

១. គោលបំណងនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

២. វិធានការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

៣. ក្របខណ្ឌនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

៤. ក្របខណ្ឌនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

៥. ក្របខណ្ឌនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

ស្នេហាសិក្សា
ស្នេហាសិក្សាស្រាវជ្រាវ

បុរាណសាស្ត្រ

សិក្សាស្រាវជ្រាវ

បុរាណសាស្ត្រ

(ក) សហគមន៍នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ
នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

(ខ) គ្រឹះស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវ ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

១. គ្រឹះស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវ ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ
នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

២. គ្រឹះស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវ ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ
នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

៣. គ្រឹះស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវ ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ
នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

Pawos 5

Luir petitis Désa Adat Dénpasar:

- ha. Mikukuhin miwah ngrajegang Sang Hyang Agama;
- na. Ngutamayang tata prawretining magama;
- ca. Ngrajegang kasukretan désa saha pawongannyané sakala lan niskala;
- ra. Ngrajegang tata sangskaraning pawongannyané, pamekas sané ngiket pakulawargan;
- ka. Ngrajegang kasukretan saraja brana druwén désa, druwén pawongannyané sami.

Tretiyas Sargah Sukerta Tata Pakraman

Palet 1 Indik Krama

Pawos 6

Sahananing sang jenek mapaumahan ring wewengkon wewidangan désa adat puniki sinanggeh krama Désa Adat Dénpasar.

(2) Krama désa inucap ring ajeng, linggihnyané wénten 3 (tigang) soroh:

- ha. Krama ngarep / wed, magama Hindu, sampun tedun mabanjar adat, mipil tur sareng nyungkemin Kahyangan Désa Désa Adat Dénpasar;
- na. Krama tamiu, sané tan ngarep saking dura Désa Adat Dénpasar, magama Hindu, nénten mipil sakéwanten sareng nyungkemin Kahyangan Désa Désa Adat Dénpasar;
- ca. Tamiu, sané nénten magama Hindu, wantah sareng nyungkemin pawongan, palemahan Désa Adat Dénpasar.

Pawos 7

Krama désa adat:

- (1) Sahanan krama désa sané sampun marabian, patut ngawit tedun makrama.
- (2) Satunggil krama, manut linggih kulawargannya, patut keni sinalih tunggil ayah-ayahan:
 - ha. Ayahan utama (prakulit, pamangku);
 - na. Ayahan ngarep;
 - ca. Ayahan balu / pangélé;
 - ra. Ayahan daha truna.
- (3) Sasengker ngawit tedun ngayah :
 - ha. Marep ring krama désa sané mawit saking pawiwahan, nem sasih saking puput makalakalaan;
 - na. Marep ring krama désa sané mawit saking ngarangin, kasulurang manut pararem.
- (4) Nangken panumaya ngétang gebogan krama, kelihan banjar patut ngwantunin nyacah jiwa miwah mastikayang gebogan krama rawuhing ayah-ayahannyané ring wewidangan banjar adat sowang-sowang.
- (5) Mastikayang cacah jiwa, gebogan krama rawuhing ayah-ayahannyané kapikukuhang antuk pamutus paruman krama banjar adat sowang-sowang kandugi kéngin kalaksanayang.
- (6) Pamutus inucap digelis kasurat ring likita pawongan utawi pipil krama.
- (7) Krama désa ngarep / wed wenang nyada sané mateges mademang ayahan, yan sampun kapastika luihé:
 - ha. Sungkan tahunan;
 - na. Yan sampun maderbé pangentos utawi panyledihi;
 - ca. Risampun mayusa 60 warsa yan tan maderbé panyledihi;
 - ra. Pinunas ngraga.
- (8) Sang saking séwosan désa yan sareng tedun makrama désa ring Désa Adat Dénpasar patut keni batu-batu utawi pamogpog, agengnyané kasulurang manut pararem.
- (9) Yan wénten krama saking séwosan désa sareng ngranjing makrama désa ring Désa Adat Dénpasar patut kadulurin antuk surat katerangan sané jangkep.

Pawos 8

- (1) Sahananing warga désa sané sampun munggah daha / truna, sowang-sowang patut sareng ngayah sané kawastanin ayah daha / truna.
- (2) Ayah daha / truna punika kapupulang sajeroning sekaa truna.
- (3) Sekaa truna punika patut wénten ring sowang-sowang banjar adat.
- (4) Paiketan Yowana kaadegang ring Désa Adat.
- (5) Paiketan Pangistri (Pakis) kaadegang ring Désa Adat.

Pawos 9

- (1) Swadharmaning krama désa, luiré:
 - ha. Satinut ring sadaging awig-awig, pararem, pasuara miwah geguat-geguat désa adat;
 - na. Tan maren sareng mautsaha mangda désané prasida nyujur petitis, sakadi sané munggah ring pawos 4, ring ajeng.
 - ca. Sayaga sareng natakin panes tis kértiyasan désa adat.
- (2) Sang sinanggeh krama tamiu, patut:
 - ha. Satinut ring tetiwak désa adat ngeninin indik ngupadi kasukretan désa adat ring sakala, niskala.
 - na. Tan kéngin nungkasin kértiyasan désa adat.
- (3) Sang sinanggeh tamiu, patut:
 - ha. Satinut ring tetiwak désa adat ngeninin indik pawongan lan palemahan.
 - na. Tan kéngin nungkasin kértiyasan désa adat.

Pawos 10

- (1) Krama désa rawuhing kulawargannya wenang polih pangayoman prajuru manut dresta, ngeninin:
 - ha. Sangskaraning kauripannya sané mabuat, minakadi mastikayang paiketan sulur pakulawargan.
 - na. Kasukretan miwah kasucian déwék, parhyangan, miwah karangnyané.
 - ca. Kasukretan padruwénnyané sowang-sowang.

- ra. Nyarengin paruman krama désa, saha wenang sareng mastikayang pamutus paruman krama désa.
- (2) Sahanan krama désa rawuhing sang sinanggeh krama tamiu, wenang polih pangayoman ngamanggehang kasukretan sikian, rawuhing padruwénia sowang-sowang.

Pawos 11

- (1) Sahanan krama sané ngerobang utawi ngajak anak lian boya wénten paiketan pakulawangan, upami ngajak wong duduk dudukan, patut atur supéksa ring kelihan banjar.
- (2) Krama sané ngarobang, patut *samakula* negenang lampah sang kaajak, marep ring sukretan désa adat.
- (3) Kelihan banjar ngunggahang pasadok punika ring likitan pawongan banjar, saha nyiarang sajeroning paruman krama banjar.

Pawos 12

Wusan dados krama désa, luiré:

- (1) Sangkaning:
- ha. Séda.
- na. Pinunas ngraga.
- ca. Kanorayang, malantaran piwal ring awig-awig miwah pararem krama désa, utawi tan satinut ring pituduh prajuru sajeroning indik nyupat sikian, minakadi nénten prasida ngeséhin prawrertinia.
- ra. Tata titi niténin wusan dados krama désa inucap ring ajeng, kasulurang manut pararem.
- (2) Sang wusan dados krama désa tan polih pahpahan druwén désa utawi banjar, sawawaning pahpahan sané mawit saking utsahan désa utawi banjar manut pararem, tur tan polih pasayuban malih sajeroning ala ayu.
- (3) Sang kanorayang kéngin malih tedun makrama désa malarapan antuk katerima ring banjar adat sowang-sowang, maweweh pamogpog batu-batu manut pararem.

Pawos 13

Sahanan krama désa, patut keni tetegenan utawi ayah-ayah, luiré:

- (1) Ayahan ngarep, mapiteges paturunan, peson-peson miwah ayahan mamungkul saking krama ngarep.
- (2) Ayahan balu, luiré:
 - ha. Balu rémban, sané pianaknyané kantun alit-alit, punika keni ayahan Balu rémban, sané kasulurang manut pararem;
 - na. Balu nglintik, keni ayahan balu manut balunnyané, yan lanang keni ayahan lanang, yan istri keni ayahan istri.
- (3) Ritatkala ngardi wewangunan marep kabuatan désa adat, kramané sajabana keni ayahan manut Pawos 7, taler keni paturunan sakadi ring sor:
 - ha. Paturunan sama wibhaga manut pararem.
 - na. Dana punia, manut kalascaryan sang madana punia.
- (4) Krama désa, kadadosang:
 - ha. Mapuankid utawi tan tedun ngayah / parum;
 - (1) Rikala nangun yadnya, kaluwasan masengker déwasa.
 - (2) Keni dedawuhan saking guru wisésa.
 - (3) Kapialang, luiré sungkan, matepetin, kalayusekaran lan sakancan ipun.
 - na. Dados ngwakilang ring krama tiosan sané sampun menék daha / truna.
 - ca. Dados mogpog utawi nutug ayahan antuk artha brana utawi ngampel.
 - ra. Dados nyadé utawi nyuksukin krama ngarep yan sampun munggah daha truna utawi sampun mrasidayang nganutin krama.

Pawos 14

Kapatutan krama tamiu, tamiu miwah kapatutan krama sané nampi tamiu:

- (1) Krama tamiu, tamiu, patut madana punia ring désa / banjar adat manut pararem.
- (2) Krama tamiu, tamiu patut polih pasayuban marupa pamitulung rikanjekan katibén pancabhaya,

- (3) Krama sané nampi krama tamiu, tamiu jantos marerepan:
 - ha. Sakancan krama tamiu, tamiu saking dura désa, mangda kasadokang pinih kasep arahina saking ngawit marerepan ring genah sang nerima.
 - na. Yéning krama tamiu, tamiu punika madunungan jantos asasih, kelihan banjar patut nuréksain kabuatannyané madunungan, kaadungang ring surat katerangan sané ninasang kabuatan ipuné.
- (4) Yan kabuatannyané tan manut ring sané madunungan jantos asasih, kelihan banjar wenang ngwaliang krama tamiu, tamiu inucap.
- (5) Yéning krama tamiu, tamiu punika jenek rawuhing nem sasih taler durung kasadokang, krama sané nampi patut keni pamidanda manut pararem.
- (6) Sinalih tunggil krama désa tan kadadosang ngajak wong wadon tuna susila ngranjing miwah ngrerep ring wewidangan Désa Adat Dénpasar, sapisira ugi sané piwal, patut keni pamidanda manut pararem.
- (7) Krama, krama tamiu, tamiu tan kadadosang makta, nganggén, madruwé sarana, sané sampun tan manut, tan kopicayang olih guru wisésa, lempas utawi nepas uger-uger sané kamedalang olih guru wisésa, sapisira ugi sané piwal, patut keni pamidanda manut pararem.

Paturunan miwah Leluputan

Pawos 15

- (1) Paturunan miwah peson-peson sajeroning ngulati kasukretan désa / banjar adat, kapitegesang ring krama désa / banjar adat.
- (2) Prajuru désa / banjar wenang mawéh leluputan ayahan miwah peson-peson ring sang sané kainggilang linggih miwah sang kawelasarsan.
- (3) Sor singgih leluputan miwah bacakan sang polih leluputan, kaungghang sajeroning pararem.

បញ្ជី ១
បញ្ជី ១
បញ្ជី ១

បញ្ជី ១

- ១. បញ្ជី ១
- ២. បញ្ជី ១
- ៣. បញ្ជី ១
- ៤. បញ្ជី ១
- ៥. បញ្ជី ១
- ៦. បញ្ជី ១
- ៧. បញ្ជី ១
- ៨. បញ្ជី ១

បញ្ជី ១
បញ្ជី ១

- (១) បញ្ជី ១
- (២) បញ្ជី ១
- (៣) បញ្ជី ១
- (៤) បញ្ជី ១
- (៥) បញ្ជី ១
- (៦) បញ្ជី ១
- (៧) បញ្ជី ១
- (៨) បញ្ជី ១

Palet 2
Parayogya Désa

Pawos 16

Parayogya Désa Adat Dénpasar inggih ipun:

- ha. Tedung Désa;
- na. Panglingsir Désa;
- ca. Prajuru Désa;
- ra. Sabha Désa;
- ka. KertaDésa;
- da. Kasinoman;
- ta. Pecalang / Langlang;
- sa. Prajuru Banjar Adat.

Tedung Désa lan Panglingsir Désa

Pawos 17

- (1) Tedung Désa Adat Dénpasar inggih punika Ida Cokorda Puri Pemecutan lan Ida Cokorda Puri Dénpasar.
- (2) Swadharmannia, dados pangayom lan paneduh désa gumanti prasida ngwetuang karahayuan, kasukretan krama maka sami.
- (3) Kawenangannia, ngicénin dharma tetimbang mantuka ring prajuru, ritatkala wénten pikobet.
- (4) Swadharman Panglingsir Désa, wenang mapaica saluiring dharma tetimbang ring Prajuru Désa.
 - ha. Indik nibakang padéwasan.
 - na. Indik bebantenan, pamargin upakara.
 - ca. Indik ngupapira parhyangan.

Sabha Désa

Pawos 18

- (1) Sabha Désa, inggih punika pamucuk désa sané sampun wikan ring indik dharmaning agama lan dharmaning negara.
- (2) Swadharman Sabha Désa, ngicénin dharma tetimbang majeng ring Prajuru Désa, lwirnya:
 - ha. Ngardi awig-awig lan utawi pararem Désa Adat.
 - na. Ngrincikang pawangunan Désa Adat.
 - ca. Ngrincikang olih-olihan lan prabia Désa Adat.
 - ra. Nglaksanayang pangrencana Désa Adat.

Tata Cara Ngadegang Sabha Désa

Pawos 19

- (1) Sabha Désa akwéhnya 5 (limang) nyantos 9 (sanga) diri.
- (2) Sané dados kaadegang Sabha Désa lwirnya.
 - ha. Mawiwit saking krama ngarep, naenin dados Prajuru Désa utawi Prajuru Banjar, turmaning kautus olih Kelihan Banjar Adat.
 - na. Sang sané sampun sinanggeh wikan ring tata cara, sastra, budaya Bali lan dresta.
 - ca. Sang sané sampun sinanggeh uning ring indik bebantenan miwah caru, manut linging Tatwa Wrespati Kalpa, Widhi Sastra, Mpu Lutuk miwah sapanunggalannia,
 - ra. Sang sané sampun sinanggeh uning ring padéwasan manut wariga,
 - ka. Sang sané siyosan ring punika, sané ngawinang désané makrama rahayu,
 - da. Ritatkala kacawis, mayusa nénten langkungan ring 70 (pitung dasa) warsa,
 - ta. Kapilih olih Prajuru Désa.

Kerta Désa

Pawos 20

- (1) Kerta Désa inggih punika genah Prajuru Désa lan krama désa nunas dharma tetimbang yéning wénten nepasin daging awig-awig.
- (2) Swadharma Kerta Désa, wenang mapaica saluwiring dharma tetimbang ring Prajuru Désa.
 - ha. Indik Prajuru Désa sané singsal ngamargiang awig-awig.
 - na. Indik nguwah nguwuhin Awig-awig Désa Adat.
 - ca. Indik kawéntenan byuta ring désa adat sané kasengguh perkara.
- (3) Kawenangannia, ngicénin dharma tetimbang lan ngawantu Prajuru Désa lan krama désa yéning wénten pikobet indik pamargin awig-awig lan sané kasengguh perkara.

Tata Cara Ngadegang Kerta Désa

Pawos 21

- (1) Kerta Désa akwéhnya 3 (tigang) diri nyantos 5 (limang) diri.
- (2) Sané dados kaadegang KertaDésa luihé:
 - ha. Mawiwit saking krama ngarep, naenin dados Prajuru Désa utawi Prajuru Banjar.
 - na. Wikan ring daging sastra agama, hukum adat lan hukum Nasional.
 - ca. Ritatkala kacawis, mayusa nénten langkungan ring 70 (pitung dasa) warsa.
 - ra. Kapilih olih Prajuru Désa.

Prajuru Désa

Pawos 22

- (1) Sané kasinanggeh Prajuru Désa nggih punika:
 - ha. Bandésa.
 - na. Patajuh Bandésa.
 - ca. Panyarikan.
 - ra. Patengen.
- (2) Prajuru Désa patut:

- ha. Mawiwit saking krama ngarep, naenin dados Kelihan / Prajuru Banjar.
- na. Waras lan tan céda angga, tan céda pramana.
- ca. Maparilaksana becik lan tan cacad hukum.
- ra. Jujur, pradnyan, wicaksana, maderbé pangunadika, lascarya ngayah.
- ka. Ritatkala kasudi mayusa ten langkung ring 70 (pitung dasa) warsa.

Tata Cara Ngadegang Prajuru Désa

Pawos 23

- (1) Prajuru kaadegang malantaran antuk pamilihan sajeroning paruman krama banjar adat wewidangan désa adat, sané kasulurang manut swala patra prajuru banjar.
- (2) Prajuru Désa kadegang 5 (limang) warsa apisan malarapan paruman agung désa adat.
- (3) Prajuru sané wawu kapilih kaupasaksiang ring Pura Kahyangan Désa.
- (4) Sajawaning wénten parindikan siosan, sang sampun puputing panumaya dados prajuru, kéngin kapilih malih.
- (5) Bendésa sané sampun puput panumaya dados bendésa, kéngin kapilih malih apisan.
- (6) Tata cara ngadegang prajuru nginutin kasumanggeman, manut pamutus pararem désa.
- (7) Désa Adat Dénpasar, kaénter antuk Prajuru Désa Adat, kamanggala antuk Bandésa.
- (8) Tépék désa/ banjar kaénter antuk prajuru tépék désa/ banjar, kamanggala antuk Kelihan Tépék Désa/ Kelihan Banjar Adat.

Pawos 24

- (1) Bandésa, kawantu antuk:
 - ha. Patajuh, pinaka wakil Bandésa.
 - na. Panyarikan, pinaka juru surat.
 - ca. Patengen, pinaka pangemong utawi juru raksa druwén désa.
 - ra. Kelihan-kelihan Tépék Désa / Banjar Adat wewidangan Désa Adat Dénpasar.
 - ka. Kasinoman utawi juru arah ring sowang-sowang Tépék Désa / Banjar.
 - da. Pecalang / Langlang Désa.

- (2) Sajeroning ngénterang kasukretan niskala, Bandésa patut kawantu lan masinggihang pamangku Kahyangan Désa.

Pawos 25

- (1) Swadharma Bandésa, luiré:
- ha. Ngénterang Paruman Désa Adat.
 - na. Ngénterang pamargi sadaging awig-awig miwah pamutus paruman krama désa, sané sinanggeh pararem.
 - ca. Ngraksa miwah nudonang tata titiné migunayang saraja brana druwén désa.
 - ra. Nuntun saha ngénterang krama désa rawuhing warga désa sami, ngupadi kasukretan sakala lan niskala.
 - ka. Nuntun saha nyaksinin upacara sangaskaraning kahuripan sané mabuat, minakadi sané ngilitang sulur pakulawargan.
 - da. Nuntun saha ngénterang warga désa, nginggilang Sang Hyang Agama, kasucian parhyangan, kasucian palemahan, kasucian pawongan, miwah tata titine migunayang sétra.
 - ta. Mawosin miwah niwakang pamutus marep ring wicaran warga désa.
 - sa. Ngwalanin désa adat, nyeledihi matemuang bawos ring sapasira ugi.
 - wa. Lan sané siosan sané wénten pakilitannya ring désa adat.
- (2) Tata titiné nglaksanayang swadharma inucap ring ajeng, tan maren patut satinut ring daging awig-awig, pararem, dresta miwah pamutus paruman krama désa adat.
- (3) Pangalaksanané ring ajeng patut kasiarang ring paruman désa adat, kapungkur ipun.
- (4) Sumanggup natak pamutus paruman krama désa adat, ngeninin swadharman sowang-sowang prajuru.
- (5) Panyarikan Désa, ngwantu Bandésa ngaryanin saluwir swalaptra tur nyuratang saluwiring pamutus paruman désa.
- (6) Patengen Désa ngwantu Bandésa ngaryanin utawi ngrincikang sakaluir pangranjing miwah pamedal jinah désa adat lan ngupapira druwén désa.
- (7) Kesinoman Désa, ngwantu Bandésa nyobyahang swalaptra utawi pamutus paruman désa.
- (8) Pacalang / Langlang Désa ngwantu Bandésa nreptiang pamargin upakara yadnya, dharmaning agama lan dharmaning negara.

Pawos 26

Prajuru Banjar Adat

Prajuru Banjar Adat kaadegang manut dresta soang soang Banjar.

Pawos 27

Petias utawi olih-olihan lan leluputan Parayogya Désa Adat, manut pamutus pararem.

Pawos 28

- (1) Wusan dados Parayogya Désa Adat, sangkaning:
 - ha. Lina;
 - na. Pinunas ngraga malantaran / jalaran sané pastika;
 - ca. Swadharmannya sampun puputing sengker;
 - ra. Kawusanang / kanorayang olih krama désa dwaning iwang pamargi, menawi nilar sesana.
- (2) Ngentosin, nguwusanang utawi nganorayang Parayogya Désa Adat, patut kamargiang sajeroning Paruman Agung Désa Adat.

Palet 3

Indik Kulkul

Pawos 29

- (1) Dudonan kulkul ring Désa Adat Dénpasar, luihé :
 - ha. Kulkul Désa magenah ring Pura Désa.
 - na. Kulkul Banjar magenah ring sowang-sowang balé banjar.
 - ca. Kulkul Sekaa-sekaa magenah ring banjar.
- (2) Kulkul désa / banjar adat, kamanggehang pinaka piranti utawi sarana tengeran maka wangsit, ring wewengkon wewidangan désa / banjar adat.
- (3) Kulkul désa / banjar adat, tan wenang katepak yan tan manut kadi daging awig-awig puniki:

- ha. Tengeran upacara yadnya ring désa utawi banjar.
 - na. Tengeran wénten sinalih tunggil warga désa kalayusekaran.
 - ca. Tengeran ngawit nglaksanayang pakaryan sakadi sané sampun kaarahang utawi kasiarang.
 - ka. Tengeran wénten sinalih tunggil krama désa kamalingan.
 - da. Tengeran wénten sinalih tunggil krama désa kaamuk, kabégal, utawi bhaya pati siosan.
 - ta. Tengeran wénten sinalih tunggil warga désa mawiwaha.
 - sa. Tengeran siosan manut dresta.
- (4) Kulkul désa / banjar tan wenang katepak sajawaning wantah tengeran sané patut katiwakang ring krama désané sami, upami: yadnya ring désa, paruman, pakaryan krama désa miwah bhaya pati.
- (5) Swaran tetepakan kulkul inucap nganutin tengeran, sahanan yadnya, kalayusekaran, pawiwahan, pancabhaya, miwah sané siosan sakadi ring sor puniki:
- ha. Suaran kulkul atuludan lambat, tengeran tedun ngayah wiadin parum.
 - na. Suaran kulkul bulus, tengeran kapancabhaya, minakadi kamalingan, kabégal, kaamuk, bhaya pati, miwah bhaya siosan.
 - ca. Suaran kulkul nguntit, tengeran wénten geni bhaya.
 - ra. Suaran kulkul limang klentungan lambat, tengeran wénten pawiwahan.
 - ka. Suaran kulkul tigang klentungan lambat, tengeran wénten kalayusekaran.

Pawos 30

- (1) Kulkul désa / banjar adat, tan wenang katepak yan tan sangkaning pituduh prajuru, sajawaning tengeran kapancabhayan.
- (2) Sang nepak kulkul désa / banjar adat, tan sangkaning pituduh prajuru, patut digelis atur supéksa maka buatan panepaké; yan piwal, sang mamurug wenang katibakin danda, manut pararem.
- (3) Kulkul sekaa-sekaa miwah kulkul pondokan, tan kalugra nyawerin utawi matehin sukat miwah tetepakan kulkul désa / banjar adat, pradé mamurug, sang mamurug taler wenang katibakin danda, manut pararem.
- (4) Sahanan kulkul banjar sawewidangan Désa Adat Dénpasar, patut sareng katepak pradé wénten sinalih tunggil kulkul banjar, nyihnayang wénten kapancabhayan, minakadi; alapati, bhayapati, lan sakancan punika.

Pawos 31

- (1) Suaran kulkul tengeran makarya, patut katedunin antuk ayahan manut daging dedawuhan utawi sesiar.
- (2) Suaran kulkul tengeran kapancabhayan, patut katedunin antuk sahanan krama rawuhing trunané saha makta gegawan pamitulung, manut kawéntenan bhayané.

Palet 4

Indik Paruman

Pawos 32

- (1) Dudonan paruman ring Désa Adat Dénpasar, luihé :
 - ha. Paruman krama désa;
 - na. Paruman krama banjar;
 - ca. Paruman prajuru, kawéntenang ritatkala ngrincikang pamargi lan utsaha désa adat;
 - ra. Paruman sekaa-sekaa.

- (2) Sahanan paruman wawu kéngin kakawitin sasampuné katedunin antuk pinih kedik atenga lintang saking sang patut ngamiletin paruman, kariyinin antuk tengeran suaran kulkul, mabusana adat madya, tan kalugra makta gegawan sakaluwiré, saha ngarcana Bhagawan Panyarikan, majalaran widhi widhana lan cané.
- (3) Maka pangawit, kalaksanayang panyacah krama, karuntutin antuk nyacah dedosan, wawu kalanturang antuk parum; sasampun parumané puput, patut kacacah malih, tur sané kasép, sang ninggal paruman tan pasadok miwah sané dosa, wenang katibakin danda, ageng alit ipun kasulurang manut pararem.
- (4) Sajeroning paruman tan kalugra ngwetuang, masuara ghora minakadi ngardi biota. Sang sané mamurug, wenang keni pamidanda béa pacamil, sakadi dandaning anguman-uman ring paseban, sané kasulurang manut pararem.
- (5) Pamutus bebawos sané briuk sapanggul utawi ingkup, punika sané kaaptiang tur kamanggehang. Pradé nénten prasida, suarané sané makéhan sinanggeh pamutus paruman.

Pawos 33

Sahanan ayah ngarep miwah ayah balu patut nyarengin paruman désa / banjar adat, tur wenang sareng mastikayang pamutus paruman.

Pawos 34

- (1) Paruman désa, kawéntenang sanistannia 6 (nem) sasih apisan.
- (2) Paruman prajuru, kawéntenang 3 (tigang) sasih apisan.
- (3) Paruman krama banjar, kawéntenang manut banjar sowang-sowang.
- (4) Paruman sekaa-sekaa, kawéntenang manut kabuatan.

Pawos 35

- (1) Sajeroning paruman désa, Bandésa patut nyiarang pamarginé ngénterang désa pamekas ngeninin indik:
 - ha. Munjuk lungsur gebogan krama adat saha ayah-ayahnyané;
 - na. Indik panelas prabéan yadnya, wewangunan, miwah sané lianan, pamekas indik

- sulur artha brana druwén désa;
- ca. Pamargin usaha désa sané mabuat;
 - ra. Sahanan wicara saha pamutusnyane;
 - ka. Daging pararem miwah paswara sané mabuat;
 - da. Pangrencana prajuru, ngeninin usaha désané kapungkur;
 - ta. Miwah sané lianan.
- (2) Sahanan sané kasobyahang Bandésa ring ajeng patut katiténin saha katiwakin pamutus antuk paruman désa.
 - (3) Pamutus paruman désa inucap ring ajeng patut katinutin antuk krama désa sami, pamekas antuk prajuru.

Pawos 36

- (1) Paruman désa wenang ngamedalang pararem, maka pamitegep panglaksanaan awig-awig.
- (2) Daging sahana pararem patut satinut ring daging miwah dudonan panyacah awig-awig, siosan ring pararem panyahcah awig-awig, taler patut kakardinin :
 - ha. Pararem Pengelé inggih punika pararem sané kakardinin sané nénten munggah ring pararem panyahcah awig-awig.
 - na. Pararem Panepas Wicara inggih punika ngeninin indik pamutus wicara ring Désa Adat.
 - ca. Pararem-pararem inucap patut kasobyahang ring krama désa lan kasadokan ring guru wisésa jagat Bali.
- (3) Sané patut kaunggahang sajeroning pararem, minakadi:
 - ha. Murdha citta pararem sané kakardinin;
 - na. Étangan panyahcah daging pararem;
 - ca. Agung alit pamidanda, panikel lan sakancan ipun;
 - ra. Tata sulur ngamargiang awig-awig;
 - ka. Miwah indik siosan sané kangkat kaanggén negepin daging awig-awig.
- (4) Paruman désa sinanggeh ngawisésa sajeroning mastikayang tata cara ngénterang Désa Adat.

Pawos 37

- (1) Paruman inucap patut katuntun antuk Bandésa,
- (2) Sahanan Prajuru Désa, wenang tur patut nyarengin Paruman Prajuru Désa.
- (3) Paruman Prajuru Désa, kawenangang wantah ngrincikang pangrencana marep ring kabuatan désané kapungkur.
- (4) Paruman Prajuru Désa Adat, tan kawenangang ngamedalang tetegenan ring krama désa, sadéréng kaingkupin antuk krama désa.

Pawos 38

- (1) Paruman Prajuru taler wenang ngamedalang pasuara maka pamitegep pamargin awig-awig.
- (2) Daging paswara tan maren patut:
 - ha. Manut pituduh Sang Ngawa Rat / Guru Wisésa.
 - na. Utawi manut pamutus sané pecak sampun dados pararem krama désa.

Palet 5

Indik Druwén Désa

Pawos 39

- (1) Sané kamanggehang dados druwén Désa Adat Dénpasar luihé:
 - ha. Kahyangan Tiga minakadi : Pura Désa / Bale Agung, Pura Puseh, lan Pura Dalem Kahyangan Badung.
 - na. Palemahan Désa.
 - ca. Utsaha Désa marupa LPD, Pasar Désa lan utsahan désa sané tiosan.
 - ra. Wewangunan minakadi balé désa.
 - ka. Tanah Sétra :
 - 1) Sétra Agung Badung.

- da. Tanah laba pura manut lepihan;
 - 1) Laba Pura Dalem Kahyangan Badung.
 - 2) Laba Pura Désa, lan
 - 3) Laba Pura Puseh.
- ta. Tanah tanah Sétra siosan sané wénten ring wewidangan Désa Adat Dénpasar makadi: Sétra Pemecutan Kelod, Sétra Lumintang, Sétra Penamparan, Sétra Sumuh / Simpang Nem, Sétra Sebelanga, Sétra Pekandelan, kadruwé olih Banjar Adat utawi Dalem Khayangan / Prajapati soang-soang ring wewidangan inucap.

Pawos 40

- (1) Olih-olihan Désa Adat Dénpasar, mawit saking:
 - ha. Cecingkrem krama.
 - Na. Cecingkrem krama tamiu.
 - Ca. Paturunan utawi punia tamiu.
 - Ra. Pah-pahan LPD lan usaha sané tiosan.
 - Ka. Paican Guru Wisésa.
 - Da. Dana punia tiosan sané patut.
- (2) Nyabran paruman krama désa, Bandésa patut nyiarang munjuk lungsur sapanunggalannya sané sinanggeh druwén désa.
- (3) Sahanan olih-olihan inucap ring ajeng sané sinanggeh druwén désa, kaanggén prabéa piodalan miwah wewangunan ring pura, taler prabéa siosan marep ring kabuatan désa adat.
- (4) Sakaluwiring druwén désa patut wénten likitannia sané pastika, lan patut kawigunayang manut pararem.
- (5) Tan kalugra ngadol utawi ngésahang druwén désa / pura yan tan kacumponin antuk krama désa sami.

Caturthas Sargah
Sukerta Tata Agama

Palet 1
Indik Déwa Yadnya

Pawos 41

- (1) Pura Kahyangan, pura amongan désa, pura / palinggih panyiwian krama Désa Adat Dénpasar, luiré:
- ha. Dang Kahyangan.
 - 1. Pura Maospahit Gerencéng.
 - 2. Pura Tambangan Badung.
 - na. Kahyangan Tiga, amongan krama Désa Adat.
 - 1. Pura Désa / Balé Agung, lan Pura, sané magenah ring Banjar Wangaya Kelod (Jalan Gajah Mada).
 - 2. Pura Puseh, sané magenah ring Banjar Jematang (Jalan Nusa Kambangan).
 - 3. Pura Mrajapati lan Pura Dalem Kahyangan sané magenah ring Banjar Gelogor (Jalan Gunung Batukaru).
 - ca. Pura / palinggih siosan.
 - 1. Pura Majelangu Gerencéng.
 - 2. Pura Majapahit Munang Maning.
 - 3. Pura Jagatnatha.
 - 4. Palinggih Tirta Hening ring Banjar Wangaya Kaja.
 - 5. Pura Para Sanak Pura Désa, lan Pura Para Sanak Pura Tambangan Badung manut lepihan.
- (2) Piodalan ring Pura Kahyangan Tiga Désa Adat Dénpasar sakadi ring sor puniki:
- ha. Pura Désa / Balé Agung (Banjar Wangaya Kelod), nyabran Anggara Kliwon Wuku Tambir.
 - na. Pura Puseh (Banjar Jematang), nyabran Redité Umanis Wuku Langkir.
 - ca. Pura Dalem Kahyangan (Banjar Gelogor), nyabran Budha Umanis Medangsia.

- (3) Pamargin pangaciné ring Pura Kahyangan Tiga inucap ring ajeng, manut kecap sastra agama, dresta saha kalaksanayang nista, madhya, utama.
- (4) Rikala piodalan ring parhyangan sané dados panyungsungan désa adat, wenang krama désa lanang istri pedek maaturan ka parhyangan inucap, sajawaning sang sané kacuntakan.
- (5) Ritatkala piodalan ring parhyangan, wenang sang sané tangkil nganutin tata cara mabusana luihé:
 - ha. Lanang, mawastra, makampuh, masabuk, lan madéstar;
 - na. Istri, mawastra, maubed-ubed utawi seléndang wiyadin masenteng.
- (6) Wong sunantara wenang ngranjing ka pura, sakéwanten mangda ipun mapanganggé nganutin tata cara sané kamanggehang.

Pawos 42

- (1) Ring sowang-sowang Pura Kahyangan Tiga, patut kaadegang Pamangku Gedé lan pamangku sané tiosan.
- (2) Pidabdabé ngadegang Pamangku Gedé lan pamangku sané tiosan, nganutin sinalih tunggil:
 - ha. Mawiwit saking turunan utawi ngwaris.
 - na. Malantaran nyanjan utawi nuhur ring pura sané pacang ngadegang pamangku.
 - ca. Majalaran kapilih antuk krama désa.
- (3) Sang sané tan wenang kaadegang dados Pamangku Gedé lan pamangku sané tiosan, luihé:
 - ha. Céda angga, luihé; pécéng, pérot, cungh lan sapanunggalannyané.
 - na. Nandang sakit ila, ayan, buduh miwah sungkan sané tan sida katambanin.
 - ca. Sang maderbé parilaksana nénten becik.
 - ka. Sapasira ugi sané nénten kapatutang manut sastra agama lan dresta.
- (4) Prabéa ngadegang Pamangku Gede ring Pura Kahyangan Tiga lan Pamangku sané tiosan:
 - ha. Prabéa Adiksa Widhi utawi ngwintenang Pamangku Gede ring Pura Kahyangan Tiga kamedalang miwah kalaksanayang antuk Désa Adat Dénpasar.

- na. Prabéa Adiksa Widhi utawi ngwintenang pamangku sané tiosan ring Pura Kahyangan Tiga, kalaksanayang olih prajuru pura sowang-sowang manut dresta.
 - ca. Pitra yadnya Pamangku Gede ring Pura Kahyangan Tiga riwekas, kalaksanayang antuk kulawarga Pamangku Gede inucap turmaning kasanggra antuk Désa Adat, sanistannya brahma prayascita (ngabén) manut pararem.
 - ra. Indik prabéan pitra yadnya, yan pamangku tiosan séda riwekas, prajuru pura sowang-sowang patut mawéh dana punia manut dresta.
- (5) Pamangku, patut ngamanggehang sesana miwah agem ageman pamangku.

Pawos 43

Swadharmaning Pamangku Pura Kahyangan Tiga luwirnya:

- ha. Ngénterang upacara piodalan ring Pura Kahyangan Tiga, tur mangda mabusana sarwa putih lan madestar kapamangkuan.
- na. Munggah tedun ring palinggih Pura Kahyangan Tiga miwah ngiyasin Pralinggaan Ida Bhatara.
- ca. Ritatkala piodalan ring Pura Kahyangan Tiga, pamangku Pura Parasanak, Pura Dadia, lan pamangku siosan kéngin ngaturang ayah, sakéwanten patut masadok pinih rihin ring Pamangku Gedé utawi Paiketan Pamangku sowang-sowang.
- ra. Yan pamangku sampun tigang rahina ngayah ring pura, kancit wénten kulawargannyané kalayusekaran, pamangku inucap tan kenéng cuntaka, sakéwanten nénten kéngin budal salami piodalan.
- ka. Pradé sinalih tunggil Pamangku Pura Kahyangan Tiga kapialang utawi cuntaka, pamangku sané ngabih utawi pamangku tiosan kéngin ngamargiang sané patut kalaksanayang olih pamangku sané kapialang utawi kapiambeng punika.

Pawos 44

Petias utawi olih-olihan Pamangku Pura Kahyangan Tiga, luiré:

- ha. Panyolasan (panuwuran) miwah sarin canang aturan krama manut dresta.
- na. Luput pakaryan miwah luput pepeson sané lianan manut pararem sowang-sowang banjar.

Pawos 45

- (1) Pamangku kagentosin riantukan;
 - ha. Séda.
 - na. Pinunas ngraga, manawi sungkan-sungkakan lan sapanunggalannyané.
 - ca. Kawusanang antuk krama riantukan nilar sesananing pamangku.
- (2) Pradé pamangku kawusanang sangkaning malaksana asta dusta, keni pamidanda manut pararem.

Pawos 46

Indik kasukretan kahyangan kadudonang sakadi ring sor puniki :

- (1) Sané nénten kalugra ngranjing ka pura, luiré.
 - ha. Sang katiban cuntaka, minakadi sebel ngraga.
 - 1) Sebel kandel ngarajaswala, salami dérém mabersih.
 - 2) Sebel antuk ngembasang putra miwah karuron salami 42 rahina.
 - 3) Sebel panganténan, sadérem mabiakala utawi makala-kalaan.
 - 4) Sebel kalayusekaran, manut sengker.
 - na. Makta sahananing bebaktan sané sinanggeh ngletehin, manut kecap sastra agama.
 - ca. Sato ageng minakadi wewalungan suku pat, sajawaing rikala mapepada.
 - ra. Anak alit sadérem mayusa tigang sasih.
 - ka. Mabusana sané tan manut kadi tata caraning ngranjing ka pura sadérem polih pituduh saking Prajuru Désa Adat.
- (2) Tata busanané ngranjing ka pura, kasulurang manut pararem.

- (3) Pratingkahé tan wenang ring pura, luiré:
- ha. Masumpah utawi macoran, sajawaning wit saking pituduh Prajuru Désa Adat utawi Pararem Désa.
 - na. Ngamedalang wak parusia, minakadi mamisuh, marebat, majaljal, mabawos banggras sané ngwetuang rebat lan sakancan ipun.
 - ca. Mabanyu, makoratan, masesenengan, makolem dados asiki lanang wadon, nyangsang busana.
 - ra. Ngias raga minakadi maculang wastra, maculang pusungan lan sakancan ipun, sajawaning sang sulinggih miwah pinandita.
 - ka. Masusuin anak alit.
 - da. Mungguh tedun ring palinggih.
- (4) Siosan ring pamangku tan kalugra mungguh tedun ring palinggih, sajawaning wit saking pituduh Prajuru Pura utawi Prajuru Désa Adat.
- (5) Sang sané mamurug kecap ring ajeng, wenang keni déwa danda, manut pamutus pararem.

Pawos 47

- (1) Yan wénten jadma karauhan ring pura, boya sangkaning nyanjan tur ngawinang kramané biapara, wenang keni déwa danda lan artha danda sané kasulurang manut pararem.
- (2) Pradé Kahyangan Tiga keni durmanggala minakadi kapancabhayan, pamangku patut digelis masadok ring Prajuru Pura kalanturang ka Prajuru Désa Adat.
- (3) Indik upakara lan upacara pamahayu kadurmanggalan Kahyangan Tiga inucap, manut kecap sastra agama, sané kasungkemin olih Prajuru Pura lan Prajuru Désa Adat.

បញ្ជី ១៧
ហិរញ្ញវត្ថុប្រយោជន៍

បទប្បញ្ញត្តិ ១៤៥

- (ក) ដំបូងគេគឺត្រូវបំពេញបន្ទាប់ពីការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗទៀតនៃក្របខណ្ឌនៃការងារនេះ។
- (ខ) ប្រសិនបើមានការប្រកួតប្រជែងគ្នា រវាងបទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះ គ្រប់គ្រងនឹងយកបទប្បញ្ញត្តិដែលមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លាជាងគេមកអនុវត្ត។
- (គ) គ្រប់គ្រងនឹងមានសិទ្ធិប្រកាសបទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះឱ្យមានសុពលភាព ឬបំបាត់សុពលភាព។
- (ឃ) ដំបូងគេគឺត្រូវបំពេញបន្ទាប់ពីការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗទៀតនៃក្របខណ្ឌនៃការងារនេះ។

បទប្បញ្ញត្តិ ១៤៦

- (ក) ដំបូងគេគឺត្រូវបំពេញបន្ទាប់ពីការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗទៀតនៃក្របខណ្ឌនៃការងារនេះ។
- (ខ) គ្រប់គ្រងនឹងមានសិទ្ធិប្រកាសបទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះឱ្យមានសុពលភាព ឬបំបាត់សុពលភាព។
- (គ) ដំបូងគេគឺត្រូវបំពេញបន្ទាប់ពីការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗទៀតនៃក្របខណ្ឌនៃការងារនេះ។

បញ្ជី ១៨
ហិរញ្ញវត្ថុប្រយោជន៍

បទប្បញ្ញត្តិ ១៤៧

- (ក) បទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះនឹងមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃចេញផ្សាយនេះតទៅ។
- (ខ) បទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះនឹងមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃចេញផ្សាយនេះតទៅ។
- (គ) បទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះនឹងមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃចេញផ្សាយនេះតទៅ។

Palet 2
Indik Resi Yadnya

Pawos 48

- (1) Sang pacang madeg sulinggih utawi madwijati patut masadok ring Prajuru Désa Adat miwah Parisada Hindu Dharma.
- (2) Prajuru Désa Adat patut ngawas lan niténin tur wenang mialangin, pradé kacihna wénten indik sané tan manut kecap sastra agama, tur sareng nyaksinin upacara padwijatiannia, saha nglantur nyiarang sajeroning paruman krama désa.
- (3) Krama désa patut madana punia sapamadeg miwah ring lebar sang sulinggih ri wekas, katuntun antuk Prajuru Désa.
- (4) Sang sulinggih wenang polih leluwatan ayahan miwah peson-peson manut pararem sowang-sowang banjar.

Pawos 49

- (1) Sajeroning muput yadnya, sang sulinggih patut ngutamayang muput yadnya ring wewengkon Désa Adat Dénpasar.
- (2) Krama désané sami, patut sareng ngawas lan niténin katuntun antuk Prajuru Désa Adat.
- (3) Sahanan yadnya sané kalaksanayang olih sowang-sowang krama désa, patut kapuput olih sulinggih utawi pinandita manut kawenangannia sowang-sowang.

Palet 3
Indik Pitra Yadnya

Pawos 50

Dudonan pamargin pitra yadnya:

- (1) Pangupakaran sang séda luwirnya.
 - ha. Mendem utawi ngeseng, makacihna pakingsan ring ibu pertiwi utawi ring Bhatara Brahma.
 - na. Pangabénan utawi palebon.
- (2) Upacara Pitra Yadnya ri wusan pangabenan utawi palebon kamargiang ngroras utawi mamukur (atma wedhana), kalanturang nglinggihang Déwa Pitara.

Pawos 51

Swadharmaning désa utawi banjar adat luwirnya:

- (1) Banjar adat ring wewidangan Désa Adat Dénpasar, patut sareng nyanggra yan wénten sinalih tunggil krama sané nglaksanayang upacara pitra yadnya.
- (2) Indik panyanggrannyané kasulurang manut pararem banjar adat.
- (3) Pamargin sawa, saha upacara ka sétra patut mangda dabdab tur antar, tan kéngin masuara ghora (ngarap), yan mamurug keni pamidanda manut pararem.
- (4) Sang pacang nglaksanayang upacara Pitra Yadnya minakadi kalayusekaran, mangda masadok ring Prajuru Banjar Adat, sang sané nglaksanayang upacara ring Sétra Agung Badung keni prabéya mareresik akéhnyané manut pararem. Sétra-sétra sané siosan manut pararem sowang-sowang.

Pawos 52

- (1) Sinalih tunggil krama Désa Adat Dénpasar yan katekaning pati, wenang mendem, ngeseng, palebon ring Sétra Agung Badung manut pawosan.
- (2) Yan wénten sinalih tunggil krama désa sané durung madruwé sétra pawosan, yan katekaning pati, wenang mendem, ngeseng, palebon ring Sétra Bugbugan, manut pituduh prajuru lan sané kawenangang wantah nglangkir, nglungah.
- (3) Yan wénten krama tamiu sané maagama Hindu padgatakala taler kadadosang nganggén Sétra Bugbugan kadulurin antuk pasadok ring Prajuru Désa Adat Dénpasar, sakéwanten kadadosang wantah makingsan ring geni lan palebon kéwanten. Antuk punika sang sané madruwé karya patut ngaturang pananjung batu ka Désa Adat Dénpasar akwéhnyané manut pararem.
- (4) Yan wénten krama saking dura désa ngiring utawi matempung ngabén ring wewengkon Désa Adat Dénpasar, wenang sang kairing utawi sang katempungin punika ngaturang jinah pangelét sétra ka Désa Adat Dénpasar, akéhnia manut pararem.
- (6) Tan kadadosang mendem sawa, ngentas sawa, ngeseng sawa ring wewengkon Sétra Agung Badung Désa Adat Dénpasar rikalaning:
 - ha. Rerahinan Jagat.
 - na. Piodalan ring Pura Kahyangan Tiga.
 - ca. Prawani, Purnama Tilem.

- ra. Semut Sedulur, Kala Gotongan;
 - ka. Budha Manis, lan Kajeng Kliwon, sadurung puput pangilén ilén ring Pura Dalem Kahyangan;
 - da. Yan wénten mamurug, banjar sané ngarepin wenang kadanda akéhnya manut pararem.
- (7) Ritatkala dina Budha Manis lan Kajeng Kliwon wenang sawané kapendem nyoréang sawatara galah 18.00, tan hana pamidanda.
 - (8) Yan sawa raré durung ketus untu, wenang mendem ring rahina sakadi ring ajeng (6) tan hana pamidanda.
 - (9) Tan kalugra nginepang bangbang lan pamalungan, nglangkir lan nglungah.
 - (10) Sapasira ugi sané pacang nganggén Sétra Agung Badung siosan ring upakara pitra yadnya, patut polih pamutus Paruman Désa Adat, turmaning keni panukun sétra, manut pararem.
 - (11) Désané mawéh galah ring sang sané maderbé kalayusekaran sajeroning pitung rahina kéngin mendem miwah ngabén, sajawaning wénten senger uger-uger manut Pawos 52 kaping (6) ring ajeng.

Pawos 53

- (1) Sang lampus salah pati, ulah pati lan ngulah pati, minakadi anyud, kelem lan sapanunggalannia, dados bakta budal tur kapratéka sakadi patut, sakéwanten kadulurin antuk upacara panebusan lan pangulapan, wawu polih panyanggran désa.
- (2) Yan wénten jadmia istri padem tur kantun ngadut manik, tan wenang kapendem sadéréng bobotannia embas, manik punika patut kamedalang rihin utawi antuk operasi olih dokter.
- (3) Yan wénten jadmia padem ring wewidangan Désa Adat Dénpasar, tur tan keni antuk ngélingin, patut kaatur uningayang ring Guru Wisésa.

Pawos 54

- (1) Yéning sinalih tunggil krama nyukserahang karya pangabénan, nista, madya, lan utama ring désa, indik sengkernyané mangda kaunadika olih prajuru.
- (2) Tan dados ngutang sawa makirim miwah nyandung.
- (3) Tan dados nglangkar watang ring banjar tunggal margi ka sétra, sadurung wénten upakara pamelas margi.

Pawos 55

- (1) Désa Adat Dénpasar, ngamanggehang indik cuntaka, manut ring Pamutus Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- (2) Tatacara nyulurang kacuntakan, manut kecap sastra agama, kaanutang ring dresta sané kaingkupin sajeroning pararem.
- (3) Sinalih tunggil krama sané cuntaka, yan durung buntas, tan kalugra nyarubin genah suci druwén désa miwah druwén sowang-sowang krama.
- (4) Sang mamurug, patut keni déwa danda manut pararem.
- (5) Sengker cuntaka manut kawéntenannia, kasulurang sakadi ring sor puniki:
 - ha. Kalayusekaran, cuntakannia kaanutang ring dresta sané mamargi ring désa miwah sastra dresta;
 - na. Ngrajaswala, cuntakannia tigang rahina ngawit saking ngrajaswala, utawi salami ngrajaswala;
 - ca. Ngembasang putra, abulan pitung rahina ngawit saking putrané embas, ngantos kamargiang upakara tutug kambuhan;
 - ra. Karuron, cuntakannia abulan pitung rahina ngawit saking karuron, ngantos ngamargiang pamrayascitta;
 - ka. Pawiwahan, cuntakannia ngantos sampun makala kalaan;
 - da. Gamia gamana, cuntakannia ngantos sampun kapalasang, karuntutin antuk mrayascitta sikian, banjar adat, désa adat miwah kahyangan désa;
 - ta. Salah timpal, cuntakannia kapuputang manut kecap sastra agama miwah dresta sané mamargi ring désa;
 - sa. Anak istri mobot malantaran lokika sanggraha kandugi pecak nénten ngamargiang upakara pabiakawonan, sané cuntaka anaké istri sané mobot punika;
 - wa. Anak istri ngembasang putra malantaran lokika sanggraha kandugi pecak nénten ngamargiang upakara pabiakawonan miwah widhi widhana, sané cuntaka:
 - 1) Sang ngembasang putra;
 - 2) Putrané sané kaembasang.
 - la. Mamitra ngalang, sané cuntaka sang nglaksanayang mamitra ngalang punika;
 - ma. Sad atatayi, sané cuntaka sang nglaksanayang sad atatayi punika.
- (8) Sang tan kenéng cuntaka, luihé:

ហ។ ລິບຸນິຕິກຳ ຕັກຊຸດ

ສ។ ບຸກຄົນທີ່ມີສິດທິ ກຳລັງກຳລັງສາມາດສ້າງສັນສິດທິມາດຕະຖານ
ກຳລັງກຳລັງສາມາດສ້າງສັນສິດທິມາດຕະຖານ

ບາບສີ່໑໒

- (ກ) ບໍ່ມີສິດທິສາກທາງຕາມສິດທິສາມາດສ້າງສັນສິດທິມາດຕະຖານ
ກຳລັງກຳລັງສາມາດສ້າງສັນສິດທິມາດຕະຖານ
- (ຂ) ບໍ່ມີສິດທິສາກທາງຕາມສິດທິສາມາດສ້າງສັນສິດທິມາດຕະຖານ
ກຳລັງກຳລັງສາມາດສ້າງສັນສິດທິມາດຕະຖານ
- (ຕ) ບໍ່ມີສິດທິສາກທາງຕາມສິດທິສາມາດສ້າງສັນສິດທິມາດຕະຖານ

ບາບສີ່໑໓
ບາບສີ່໑໔

ບາບສີ່໑໕

- (ກ) ສິດທິສາກທາງຕາມສິດທິສາມາດສ້າງສັນສິດທິມາດຕະຖານ
ກຳລັງກຳລັງສາມາດສ້າງສັນສິດທິມາດຕະຖານ
- (ຂ) ສິດທິສາກທາງຕາມສິດທິສາມາດສ້າງສັນສິດທິມາດຕະຖານ
- (ຕ) ສິດທິສາກທາງຕາມສິດທິສາມາດສ້າງສັນສິດທິມາດຕະຖານ
- (ສ) ສິດທິສາກທາງຕາມສິດທິສາມາດສ້າງສັນສິດທິມາດຕະຖານ
- (ຊ) ສິດທິສາກທາງຕາມສິດທິສາມາດສ້າງສັນສິດທິມາດຕະຖານ

ha. Sang sulinggih, Bandésa.

na. Pamangku Kahyangan Tiga rikala piodalan tur sampun ngayah tigang rahina ring pura sané kaemponin utawi sampun ngalang sasih utawi ngalang tengah.

Pawos 56

- (1) Pamargin upacara pangabénan kalaksanayang manut kecap sastra agama miwah dresta sané mamargi ring désa.
- (2) Patus pangabénan kasulurang manut dresta lan pararem sané wénten ring sowang-sowang bebanjaran.
- (3) Panginguné ring krama banjar, kasulurang manut pararem.

Palet 4

Indik Manusa Yadnya

Pawos 57

- (1) Krama désa minakadi krama banjar patut sareng nyanggra miwah nitenin yan wénten krama ngalaksanayang upacara Manusa Yadnya sané mabuat.
- (2) Tatacara panyanggrané inucap ring ajeng kasulurang manut pararem.
- (3) Sang pacang ngalaksanayang upacara Manusa Yadnya sané mabuat, mangda masadok ring prajuru.
- (4) Manusa Yadnya inggih punika, upacara dharmaning kahuripan manusa, ngawit saking patemoning kama bang lawan kama petak sajeroning garbha, ngantos lampus ri wekas.
- (5) Upacara inucap ring ajeng kamargiang nista, madya lan utama, manut kecap sastra agama miwah dresta.

Palet 5
Indik Bhuta Yadnya

Pawos 58

- (1) Désa Adat Dénpasar nglaksanayang Bhuta Yadnya, marep ring kabuatan Désa Adat Dénpasar.
- (2) Pidabdab pamargin Bhuta Yadnya inucap ring ajeng, manut kecap sastra agama, lan dresta sané kapikukuhang antuk pararem.
- (3) Krama désa minakadi krama banjar patut sareng nyanggra yan wénten krama sané nglaksanayang upacara Bhuta Yadnya sané mabuat.
- (4) Sang pacang nglaksanayang upacara Bhuta Yadnya sané mabuat, mangda masadok ring prajuru.

Pawos 59

- (1) Bhuta Yadnya, inggih punika; upakara pabiakala utawi labaan miwah pacaruan sarwa prani katur ring prethiwi, ring pura, sanggah / mrajan, ring manusa, miwah ring bebutan;
ha. Yadnya sésa minakadi banten jotan nyabran wusan ngratengan.
na. Masapuh sapuh ritatkala ngaturang pujawali ring pura.
- (2) Ring Sasih Kanem, kamargiang aturan caru ring catus pata Désa Adat Dénpasar.

Pawos 60

Upakara Tawur Kasanga rikalaning Tilem Kasanga.

- (1) Dudonan panglaksanaan ipun:
 - ha. Ring pangelong ping 13, Ida Bhatara Bhatari ring désa miwah sowang-sowang prasanak sawewidangan Désa Adat Dénpasar kairing antuk krama, mapupul ring Balé Agung, salanturnia kairing lunga malasti ka segara.
 - na. Ring pangelong ping 14 Sasih Kasanga, Ida Bhatara bhatari nyejer ring Balé Agung, tur kakemitin antuk prajuru lan pangempon Pura Prasanak.
 - ca. Ring Tilem Sasih Kasanga, Ida Bhatara bhatari sadurung mantuk ka payogan Ida sowang-sowang, katuran lan napak caru ring natar Balé Agung.

- (2) Upakara Tawur Kasanga, kamargiang ring Tilem Sasih Kasanga manut dudonan:
- ha. Pacaruan kawéntenang ring catus pata désa.
 - na. Ring kulawarga sowang-sowang, mabiakala ring natar paumahan.
 - ca. Kalanturang antuk ngrupuk minakadi mabuhu buhu.
 - ra. Yén pradé wénten krama Désa Adat Dénpasar sané makarya ogoh-ogoh rikala rahina pangrupukan, risampuné puput kaidarang patut kageseng.
 - ka. Tan kalugra ngrupuk jantos langkungan ring tengah wengi, réh ning rahina inucap sampun nampih rahina sipeng.
- (3) Upakara Tawur Kasanga jantos puput Panyepian marep ring kabuatan Désa Adat Dénpasar, sami kasanggra miwah kaprabéanin antuk Désa Adat Dénpasar.

Pawos 61

- (1) Rikalaning Nyepi utawi sipeng ring pananggal Ping Pisan Sasih Kadasa, sowang-sowang krama désa patut ngamargiang Catur Brata Panyepian, inggih punika :
- ha. Amati geni, tan kéngin maapi api, sajawaning :
 - 1) Ring genah raré sané durung mayusa 3 sasih;
 - 2) Ring genah matepetin anak sungkan;
 - 3) Ring genah layon sang kalayusekaran.
 - na. Amati karya, tan kéngin nyambut karya, sajawaning pecalang désa lan prajuru désa, miwah sang sané polih uwak-uwakan marupa lekita pastika saking Sang Ngawa Rat.
 - ca. Amati lelungan, tan kéngin malelungan mrika-mriki.
 - ra. Amati lelangan, tan kéngin maoneng-onengan, ngwijilang suara ghora, nabuh gegambelan, lan sakancannia.
- (2) Nangken Panyepian ring Désa Adat Dénpasar, kaadegang Pecalang utawi Langlang Désa.
- (3) Krama désa sané madruwé anak alit, matepetin anak sungkan, miwah madruwé layon, ring pamedalannia mangda kadagingin sawén antuk embotan pandan maka cihna wénten kapialang.
- (4) Catur Brata Panyepian punika kamargiang saking semeng jantos semeng rahina bénjangné.

- (5) Bénjangnyané ring pananggal ping kalih Sasih Kadasa, kawastanin Ngembak Geni, sané mapiteges panglebaran yoga samadhi. Sowang-sowang krama patut saling ngaksamayang sané kawastanin sima krama utawi dharma santi.

Pancamas Sargah
Sukerta Tata Pawongan

Palet 1
Indik Pawiwahan.

Pawos 62

- (1) Pawiwahan inggih punika patemoning purusa lawan pradana, malarapan panunggalan kayun suka citta madulurin upasaksi sakala niskala.
- (2) Krama désa minakadi krama banjar, patut sareng nyanggra miwah niténin yan wénten krama sané nglaksanayang upacara pawiwahan.
- (3) Pamargin pawiwahan, luihé :
- ha. Malantaran papadikan.
 - na. Malantaran ngrorod, mrangkat rihin wawu kakrunayang.
 - ca. Malantaran nyentana utawi nyeburin.
- (4) Indik Pawiwahan ring Désa Adat Dénpasar, kamanggehang manut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, miwah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 indik Pawiwahan.
- (5) Tatacara panglaksanannia, manut kecap sastra agama, miwah dresta sané kapikukuh manut pararem.
- (6) Sinalih tunggil krama sané pacang nglaksanayang upacara pawiwahan, mangda masadok ring prajuru.
- (7) Pawiwahan sané kapatutang ring Désa Adat Dénpasar inggih punika:
- ha. Sampun ngamargiang pabyakalan manut sastra agama lan catur dresta.
 - na. Kaupasaksi antuk prajuru banjar utawi prajuru désa lan guru wisésa.
- (8) Parabian sané tan manut kadi ring ajeng, sinanggeh tan patut.

Palet 2
Indik Nyapihan

Pawos 63

- (1) Prajuru désa minakadi prajuru banjar adat, wenang sareng mawosin miwah nitenin yan wénten krama sané mapikayun pacang palas marabian, mangda nénten kadurusan dados nyapihan.
- (2) Yan krama inucap kukuh ring pikarsannyané, désa minakadi banjar adat, nénten sumangem ring pamarginnyané, patut kalanturang ring sang rumawos.
- (3) Sadéréngé pastika polih pamutus saking sang ngawawenang minakadi sang rumawos (Pengadilan Negeri), krama inucap manggeh keni tetegenan krama sakadi nguni.

Pawos 64

- (1) Tatacara palas marabian, madudonan sakadi ring sor:
 - ha. Nahur prabéa pasaksi sami matenga.
 - na. Pagunakayan polih pahan pada.
 - ca. Pabekel, tadtadan sowang-sowang kakuwasayang niri-niri, sakéwanten indik warisan kakuwasayang antuk purusa.
 - ra. Ngariwuwu miwah ngupajiwa pratisentana manut swadharmaning guru rupaka;
 - ka. Nahur pamidanda marupa panukun suaran kulkul manut pararem utawi manut dresta.
 - da. Ngelung jinah bolong manut panglokikan prajuru utawi manut dresta.
 - ta. Mapamit saking mrajan sang maraga purusa.
- (2) Pradé ri wekas sang palas marabian punika kacihnayang adung malih, patut ngamargiang upacara pawiwahan malih sakadi nguni.

ບາງບາລີ 149

- (ກ) ປຸມສູນປັບປຸງຄຸນສົມບູນ ສາມາດສ້າງ ຍົກສູງຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທາງດ້ານການຄ້າ
- (ຂ) ຕາມຄຳສັ່ງຂອງລັດ ທາງດ້ານການຄ້າ
 - 1. ຕາມຄຳສັ່ງຂອງລັດ ທາງດ້ານການຄ້າ ທາງດ້ານການຄ້າ
 - 2. ຕາມຄຳສັ່ງຂອງລັດ ທາງດ້ານການຄ້າ ທາງດ້ານການຄ້າ
- (ຄ) ສູນຄຸ້ມຄອງຄ້າ ທາງດ້ານການຄ້າ
 - 1. ຕາມຄຳສັ່ງຂອງລັດ ທາງດ້ານການຄ້າ ທາງດ້ານການຄ້າ
 - 2. ຕາມຄຳສັ່ງຂອງລັດ ທາງດ້ານການຄ້າ ທາງດ້ານການຄ້າ
 - 3. ຕາມຄຳສັ່ງຂອງລັດ ທາງດ້ານການຄ້າ ທາງດ້ານການຄ້າ
 - 4. ຕາມຄຳສັ່ງຂອງລັດ ທາງດ້ານການຄ້າ ທາງດ້ານການຄ້າ
- (3) ຕາມຄຳສັ່ງຂອງລັດ ທາງດ້ານການຄ້າ
 - 1. ຕາມຄຳສັ່ງຂອງລັດ ທາງດ້ານການຄ້າ ທາງດ້ານການຄ້າ
 - 2. ຕາມຄຳສັ່ງຂອງລັດ ທາງດ້ານການຄ້າ ທາງດ້ານການຄ້າ
 - 3. ຕາມຄຳສັ່ງຂອງລັດ ທາງດ້ານການຄ້າ ທາງດ້ານການຄ້າ

ບາງບາລີ 150

ບາງບາລີ 151

ບາງບາລີ 152

- (ກ) ສູນຄຸ້ມຄອງຄ້າ ທາງດ້ານການຄ້າ ທາງດ້ານການຄ້າ
- (ຂ) ຕາມຄຳສັ່ງຂອງລັດ ທາງດ້ານການຄ້າ ທາງດ້ານການຄ້າ
- (ຄ) ຕາມຄຳສັ່ງຂອງລັດ ທາງດ້ານການຄ້າ ທາງດ້ານການຄ້າ
- (3) ຕາມຄຳສັ່ງຂອງລັດ ທາງດ້ານການຄ້າ ທາງດ້ານການຄ້າ

Pawos 65

- (1) Wusan mapikuren riantukan sinalih tunggil lampus, kawastanin balu, minakadi balu lanang utawi istri.
- (2) Balu, kabinayang dados:
 - ha. Balu istri wit sentana rajeg miwah balu istri boya sentana rajeg.
 - na. Balu lanang kapurusa miwah balu lanang nyeburin.
- (3) Swadharmaning balu inucap, patut:
 - ha. Ngamanggehang patibrata tan patut ngamargiang paradara utawi drati krama.
 - na. Ngwasayang waris pagunakaya, tan dados ngadol, ngadéang, makidihang lan siosan ring punika, sajawaning polih kabébasan saking pianak utawi kulawarga pinih tampek saking rabiné, pradé okané kantong alit-alit.
 - ca. Kéngin ngidih sentana pradé kacumponin antuk kulawarga kapurusa.
 - ra. Kawenangang mawiwaha malih, pradé wénten kabébasan saking kulawarga kapurusa.
- (4) Balu kaucap tan pageh, sakadi ring sor:
 - ha. Paradara utawi drati krama.
 - na. Matilar saking pakubon tan pasadok salami awarsa.
 - ca. Lémpas ring swadharma siosan minakadi nénten prasida ngeséhin salah prawreti marep ring pituduh kulawarga kapurusa.

Palet 3

Indik Sentana

Pawos 66

- (1) Sentana wénten kalih pawos, sané kaucap prati sentana miwah sentana peperasan.
- (2) Prati sentana, inggih punika sentana sané embas saking pawiwahan sané kapatut.
- (3) Pradé pawiwahané tan ngwetuang sentana, kéngin ngidih sentana antuk upasaksi sakala niskala sané kawastanin sentana peperasan.
- (4) Pradé pawiwahané tan kapatut ngwetuang sentana, mangda tan kantong kawastanin panak bebinjat, patut kadulurin antuk panyangaskara.

- (១) ដំនួនករិត្តិយសបូជនីយដ្ឋាន ឬទិដំនួនភូមិភាគ(ប្រទេស) ដកគណនក្នុងហិរញ្ញវត្ថុ(ប្រាជ្ញ) ទៀត
គោលការណ៍សំខាន់ៗសម្រាប់បទប្បញ្ញត្តិ លក្ខណៈបញ្ញត្តិ ក្របខ័ណ្ឌ
- (៤) ដំនួនករិត្តិយសដំនួនភូមិភាគបូជនីយដ្ឋាន(១) រឺហិរញ្ញវត្ថុ ហិរញ្ញវត្ថុនោះ
ហេតុ ឬទិដំនួនភូមិភាគបូជនីយដ្ឋានបូជនីយដ្ឋានបូជនីយដ្ឋាន ឬទិដំនួនភូមិភាគ(ប្រទេស) ឬទិដំនួនភូមិភាគ
ឬទិដំនួនភូមិភាគបូជនីយដ្ឋាន
គេ អាចប្រើប្រាស់ដំនួនភូមិភាគបូជនីយដ្ឋាន
ដេ គោលការណ៍សំខាន់ៗសម្រាប់បទប្បញ្ញត្តិ លក្ខណៈបញ្ញត្តិ ក្របខ័ណ្ឌ ឬទិដំនួនភូមិភាគបូជនីយដ្ឋាន
ហេតុ ឬទិដំនួនភូមិភាគបូជនីយដ្ឋានបូជនីយដ្ឋានបូជនីយដ្ឋាន ឬទិដំនួនភូមិភាគ(ប្រទេស) ឬទិដំនួនភូមិភាគ
ឬទិដំនួនភូមិភាគបូជនីយដ្ឋាន

បទប្បញ្ញត្តិ ៤៧

- (៧) ករិត្តិយសបូជនីយដ្ឋាន ឬទិដំនួនភូមិភាគ(ប្រទេស) ដកគណនក្នុងហិរញ្ញវត្ថុ(ប្រាជ្ញ) ទៀត
សំខាន់ៗសម្រាប់បទប្បញ្ញត្តិ លក្ខណៈបញ្ញត្តិ ក្របខ័ណ្ឌ
- (៨) ដំនួនភូមិភាគបូជនីយដ្ឋាន ឬទិដំនួនភូមិភាគ(ប្រទេស) ឬទិដំនួនភូមិភាគ
ឬទិដំនួនភូមិភាគបូជនីយដ្ឋាន ឬទិដំនួនភូមិភាគ(ប្រទេស) ឬទិដំនួនភូមិភាគ
ឬទិដំនួនភូមិភាគបូជនីយដ្ឋាន ឬទិដំនួនភូមិភាគ(ប្រទេស) ឬទិដំនួនភូមិភាគ
- (៩) ឬទិដំនួនភូមិភាគបូជនីយដ្ឋាន ឬទិដំនួនភូមិភាគ(ប្រទេស) ឬទិដំនួនភូមិភាគ
ឬទិដំនួនភូមិភាគបូជនីយដ្ឋាន ឬទិដំនួនភូមិភាគ(ប្រទេស) ឬទិដំនួនភូមិភាគ
ឬទិដំនួនភូមិភាគបូជនីយដ្ឋាន ឬទិដំនួនភូមិភាគ(ប្រទេស) ឬទិដំនួនភូមិភាគ
- (១) ឬទិដំនួនភូមិភាគបូជនីយដ្ឋាន ឬទិដំនួនភូមិភាគ(ប្រទេស) ឬទិដំនួនភូមិភាគ
ឬទិដំនួនភូមិភាគបូជនីយដ្ឋាន ឬទិដំនួនភូមិភាគ(ប្រទេស) ឬទិដំនួនភូមិភាគ
ឬទិដំនួនភូមិភាគបូជនីយដ្ឋាន ឬទិដំនួនភូមិភាគ(ប្រទេស) ឬទិដំនួនភូមិភាគ

- (5) Sentana rajeg inggih punika, prati sentana wadon (pradhana) sané kamanggehang lanang (purusa) tur rikala nglaksanayang upacara pawiwahan, lanangé patut nyeburin.
- (6) Sang kéngin kaarsayang dados sentana rajeg inucap ring wiwit (5) ring ajeng, inggih punika:
 - ha. Pratisentana wadon tunggal utawi sinalih tunggil prati sentana wadon, yéning maka sami pratisentanannyané wadon.
 - na. Sampun kamanggehang dados prati sentana purusa.
 - ca. Kapawiwahang kaceburin, kautamayang jadma sané maagama Hindu utawi jadma sané maagama siosan tur sampun nglaksanayang pamarisuda raga utawi sudi wadani.
 - ra. Sang ngamanggehang sentana rajeg patut masadok ring Prajuru Banjar Adat, tur Kelihan Banjar Adat patut nyiarang ring krama banjar sajeroning paruman.

Pawos 67

- (1) Ngadegang sentana rajeg patut nganutin dudonan, kacihnayang antuk artha brana pamerasan sané kasaksiang sakala niskala.
- (2) Sapa sira ugi krama sané pacang ngidih sentana, patut masadok ring Bandésa Adat utawi Kelihan Banjar Adat, sanistannyané asasih sadéréng pamerasan.
- (3) Bandésa Adat, kawakilin antuk Kelihan Banjar Adat nyiarang ring banjar adatnyané sowang-sowang, tur sapa sira ugi sané tan lila mangda nguningayang ring Kelihan Banjar Adatnyané, masengker kalih wuku sadurung pamerasan.
- (4) Prajuru minakadi Kelihan Banjar Adat patut digelis mawosin saha nibakang pamutus népék ring catur dresta miwah pararem.
- (5) Pradé sulur paperasané tan manut kecap ring ajeng, prajuru minakadi Kelihan Banjar Adat wenang ngandegang upacara paperasané, saha ngicén tuntunan, mangda bebawosan sulur paperasan utawi wicarannia kapuputang rihin.

Pawos 68

- (1) Paperasan sané kapatut ring Désa Adat Dénpasar, ri sampuné kacihnayang antuk:
 - ha. Widhi widhana pamerasan.
 - na. Kasaksinin antuk Prajuru Désa Adat utawi Kelihan Banjar Adat sané makelingang utawi ngilikitayang.
 - ca. Kasiarang ring paruman Banjar Adatnyané.
- (2) Sané patut kaperas anggén sentana, manut sakadi ring sor puniki:
 - ha. Kulawarga saking purusa, pradé tan wénten kéngin saking wadon yéning taler tan wénten wawu kéngin sakama-kama (sakita kayun).
 - na. Kautamayang saking waris pancer kapurusa.
 - ra. Sinalih tunggil mawit saking kulawarga tunggal sanggah utawi merajan, paibon lan dadia, utawi ngambil anak tios sakéwanten sané maagama Hindu.
- (3) Kéngin ngangkat sentana langkungan ring adiri lanang wiadin wadon.

Palet 4

Indik Warisan

Pawos 69

- (1) Warisan inggih punika artha brana saha ayah-ayahan ngupadi sukreta sakala niskala saking kaluhurannia marep ring katurunannia.
- (2) Sané sinanggeh warisan, luiré:
 - ha. Duwé tengah, minakadi tegal ayahan désa, sanggah utawi merajan, pusaka lan sané siosan.
 - na. Pagunakaya, tadtadan utawi jiwa dana, lan utang piutang.
- (3) Wawu kéngin kabawos warisan, pradé wénten;
 - ha. Sang sané ngwarisin.
 - na. Katurunannia (ahli waris).
 - ca. Artha brana, tetegenan (ayah-ayah) makacihna warisan.

Pawos 70

- (1) Ahli waris, luiré:
 - ha. Pratisentana purusa.
 - na. Pratisentana istri (sentana rajeg).
 - ca. Sentana peperasan lanang utawi istri.
- (2) Pradé tan wénten sakadi ring ajeng, sané sinanggeh ahli waris:
 - ha. Katurunan purusa pernah ngunggahang makadi rerama lanang, pekak, salanturnia, rerama di misan, rerama di mindon.
 - na. Katurunan purusa pernah ka samping makadi kaponakan, kaponakan di misan miwah kaponakan di mindon.
- (3) Swadharmaning ahli waris, patut:
 - ha. Nerima saha ngwasayang tetamian pah pahan kaluhurannia, makadi ngrempon sanggah utawi merajan, pura, saha pangupakarannia miwah ayah-ayahan pawaris.
 - na. Ngabénang pawaris saha nglanturang upacara pitra yajnyannia.
 - ca. Nahurin utang pawaris manut panglokika.

Pawos 71

Munggwing pidabdab waris kawaris ring Désa Adat Dénpasar :

- (1) Warisan, wahu kéngin kaepah, ri sampun kalaksanayang upacara Pitra Yadnya lan utang pawaris buntas katawur.
- (2) Para ahli waris sami polih pahan pada sangkaning pagunakaya, sajawaning karang lan tegal ayahan désa kaemong antuk ahli waris sané sinanggeh krama ngarep.
- (3) Sinalih tunggil ahli waris kéngin tan polih pahan, pradé :
 - ha. Nilar kawitan lan sesananing agama Hindu;
 - na. Alpaka guru rupaka;
 - ca. Sentana rajeg utawi pratisentana nyeburin késah mawiwaha, sowang-sowang kabawos ninggal kadaton.

- (4) Boya ahli waris, kénéngin muponin hasil manut dudonan luihé:
- ha. Sentana luh, salami durung késah mawiwaha;
 - na. Balu luh wiadin muani nyeburin (sowang-sowang boya sentana).
- (5) Pawaris kénéngin mawéwéh ri kala maurip pinaka jiwa dana, tadtadan utawi bekel, makacihna pawéwéh ring oka sané késah mawiwaha.

Pawos 72

- (1) Pradé sajeroning pakulawargan wénten ahli waris langkungan ring adiri, patut :
- ha. Kawéntenang paiguman indik pah-pahan waris inucap;
 - na. Yan tan prasida, katunasang tetimbang ring prajuru;
 - ca. Pradé taler tan wénten cumpu ring panepas prajuru, kaaturang ring Kreta Désa; pradé taler tan kacumponin, kénéngin katunasang ring Majelis Désa Adat Tingkat Kecamatan, Majelis Désa Adat Tingkat Kabupaten / Kota, lan Majelis Désa Adat Tingkat Provinsi, kaping untat kaaturang majeng ring Sang Rumawos (Pengadilan Negeri).
- (2) Pradé wénten karang kaputungan utawi tan wénten sané ngawarisin, Kelihan Banjar Adat wenang nuréksa sulur pakulawaragannia sané dumun tur lantur kasiarang ring Banjar Adatnyané, mangda sang patut ngawarisin, digelis nyeledihi karang inucap.
- (3) Pradé wates pawanengan tigang sasih sasampun kasiarang ring sowang-sowang banjar, taler tan wénten kulawarga sané nyeledihi, karang inucap wenang kaambil antuk Banjar Adat, tur kaanggén sapatutnya manut pararem kadulurin antuk ngalaksanayang Pitra Yadnyan sang lina sané pecak ngamong karang inucap.

មេឡូឡា
ស្ទើរទៅទៅបញ្ចេញសេចក្តី

បញ្ចេញ
គាត់ ចំពោះ បញ្ចេញសេចក្តី

បុព្វបទ ១២៣

- (ក) សហគមន៍គាត់បញ្ចេញសេចក្តី
ហា រូបវន្តិក៍ស្តីប្រយោជន៍
គា មេឡូឡាបញ្ចេញសេចក្តីគាត់
(ខ) ចំពោះសេចក្តីស្តីប្រយោជន៍សហគមន៍
ចំពោះសេចក្តីស្តីប្រយោជន៍សហគមន៍

បុព្វបទ ១២៤

- (ក) សហគមន៍គាត់បញ្ចេញសេចក្តី
សិល្បៈ
(ខ) មេឡូឡាបញ្ចេញសេចក្តីស្តីប្រយោជន៍
គាត់ ចំពោះសេចក្តីស្តីប្រយោជន៍សហគមន៍
(គ) មេឡូឡាបញ្ចេញសេចក្តីស្តីប្រយោជន៍
សហគមន៍
(១) មេឡូឡាបញ្ចេញសេចក្តីស្តីប្រយោជន៍
ហា មេឡូឡាបញ្ចេញសេចក្តីស្តីប្រយោជន៍
គា មេឡូឡាបញ្ចេញសេចក្តីស្តីប្រយោជន៍
សា មេឡូឡាបញ្ចេញសេចក្តីស្តីប្រយោជន៍
ហា មេឡូឡាបញ្ចេញសេចក្តីស្តីប្រយោជន៍

Sad Sargah
Sukerta Tata Palemahan

Palet 1
Karang, Tegal, lan Carik

Pawos 73

- (1) Sahananing karang paumahan patut:
 - ha. Wénten wates ipun sané pastika.
 - na. Mapamedalan ka rurungé utawi ka marginé, tan dados wénten karang kabebeng.
- (2) Bendésa utawi Kelihan Banjar Adat patut ngutsahayang sahanan pakarangan krama désa utawi krama banjar mangda sakadi bacakan wiwit (1) ring ajeng.

Pawos 74

- (1) Sahanan krama désa patut ngwatesin pakaranganyané sowang-sowang jantos sida trepti nyatur sisi.
- (2) Wates sané marep ka marginé patut ka tembok utawi kapagehin olih sang nruwénang karang, tur genah tembok utawi pagehan punika dohnyané paling kedik 0,50 meter saking bibih got (jelingjingan margi), utawi nganutin uger-uger Pemerintah Kota Dénpasar.
- (3) Yéning pakarangan punika wénten tlajakannyané, tlajakan punika patut kapiara olih sang nruwénang karang.
- (4) Yan wénten anak padem ring tegalan wiadin ring carik anak lian, patut mamargi sakadi ring sor punika :
 - ha. Ring tegalan utawi carik punika, patut kalaksanayang upakara manut kecap sastra agama.
 - na. Ngentasang sawa ring tegalan wiadin carik anak lian, patut nganutin pituduh prajuru désa miwah prajuru subak.
 - ca. Tegal utawi carik sané kaentasin pinih rihin patut kaprayascitta olih sang nruwénang sawa, tegal utawi carik sané kaentasin pungkuran wantah kasiratin tirtha prayascitta kéwanten.
 - ra. Nanging yan ngentasang sawa ring tukad, pangkung utawi tlabah, punika nénten kadulurin antuk tirtha pamra-

yascitta.

- ka. Tan wenang ngenahang napi luwir sané sinanggeh ngletehin karang paumahan bilih-bilih yan kaletahan punika jantos nglimbak ngletehin désa adat, manut kecap sastra agama.
- (5) Krama désa adat, nénten kalugra:
- ha. Ngalahlah margi, tegal désa, karang krama liyan, tegal utawi carik krama liyan, lan sakancan ipun.
- na. Ngalahlah tegak kahyangan, sétra lan sakancan tegak sané sinanggeh suci.
- (6) Pradé wénten sané mamurug kecap ring ajeng, sang sané mamurug, patut ngwaliang tanah inucap, tur sang ngalahlah tegak suci, tiwosan ring ngwaliang tanah tegak suci inucap, taler patut karuntutin antuk upakara pamarisuda manut kecap sastra agama.
- (7) Yéning wénten karang paumahan sané putung, patut kauningayang ring prajuru Banjar Adat utawi Prajuru Désa.
- (8) Yéning wénten krama jagi ngadol utawi ngontrakang tanah pakarangan, tegalan utawi tanah carik, patut masadok ring prajuru banjar utawi prajuru subak lan prajuru désa adat.

Palet 2

Pepayonan

Pawos 75

- (1) Ngawit nandur pepayonan minakadi tanem tuwuh, patut adepa agung ngajerowang saking wates; pepayonan minakadi tanem tuwuh sané jantos ngliwat wates, wenang kasepatgantungin.
- (2) Pepayonan sané ngungkulin mawastu mayanin ka pisaga, sang nruwénang pepayonan inucap patut kawara tur kairing mapaiguman antuk sang rumasa katetehan, bilih bilih sang nruwénang arsa ngrebah utawi notor wit pepayonané punika.
- (3) Pradé sampun kawara taler ta wénten usaha sang nruwénang, sang rumasa katetehan wenang masadok ring prajuru, tur risampuné kaparitas kandugi wénten kalugrayang olih prajuru, wawu wit pepayonané punika kéngin karebah, sakéwanten panukun pati wit pepayonané punika patut katawur olih sang rumasa katetehan manut panglokika sang nepasin, tur wit pepayonané sané karebah punika, kasukserah ring sang nruwénang.

- (4) Sang patut keni pamidanda panyangaskara saha prabéa, pradé wénten wewangunan karubuhin taru, inggih punika:
 - ha. Sang nruwénang wit papayonan sané sinanggeh mayanin, pradé pungkak padidi tur ngrubuhin wewangunan krama tiosan;
 - na. Sang notor, munggul utawi ngrebah taru, tur ngrubuhin wewangunan krama tiosan.
- (5) Krama désa patut ngamanggehang kawredian tanem tuwuh sané ngawinang désané asri tur lestari sané kawastanin Bhutahita, sané mateges kalestarian lingkungan hidup.
- (6) Sinalih tunggil krama sané pacang ngrebah pepayonan minakadi tanem tuwuh sané ngawinang désané asri tur lestari, patut masadok tur nunas lelugrahan ring Prajuru Désa Adat miwah Guru Wisésa.

Palet 3
Wewangunan

Pawos 76

- (1) Nangken ngawangun, sowang-sowang krama patut:
 - ha. Masadok ring prajuru, pamekas marep ring wewangunan minakadi menengin wates.
 - na. Nganggén Asta Bhumi miwah gegulak Asta Kosala, sanistannia manut ring patitis ka niskala.
 - ca. Nénten nyayubin ka pisaga.
- (2) Pradé wewangunané jantos nyayubin ka pisaga, bilih-bilih témbok ring tlenging wates, risampuné kawara tur kairing mapaiguman taler tan wénten usaha sang nruwénang, kangkat kasadokang ring prajuru banjar / désa adat; sasampuné kaparitas tur wénten lelugrahan prajuru, sang nruwénang wewangunan wenang keni danda manut pararem, tur témbok inucap patut kagubar olih sang nruwénang, sanistannia mangda kakaryanang abangan.
- (3) Sapasira ugi krama désa sané jagi ngawangun paumahan miwah wewangunan napi malih ring sisin marginé, wewangunan punika mangda dohnyané saking tlenging margi manut pararem miwah manut uger-uger guru wisésa.
- (4) Yéning krama tamiu / tamiu, jagi ngawangun wewangunan sané kaanggén ngamargiang tata cara non hindu, mangda masadok ring prajuru banjar / désa adat. Prajuru wenang netesin rencana sapariindik wewangunan inucap.

Palet 4
Wewalungan

Pawos 77

- (1) Sahanan warga désa sané miara wewalungan: bawi, banténg lan sakancan ipun, mangda sayaga niténin minakadi negul, nglogor wewalungannia, mangda nénten ngrusak karang utawi pabianan krama tiosan, bilih-bilih jantos ngranjing ngletehin kahyangan.
- (2) Pradé wénten wewalungan malumbar utawi ngeléb tur ngrusak karang utawi pabianan krama siosan, risampuné kawara taler nénten wénten usaha sang nruwénang, yan wewalungan punika malih ngrusak karang utawi pabianan krama siosan, wewalungan punika kéngin kataban, tur sang nruwénang wenang katibakin danda ngawaliang panukun wit tetandurané sané karusak, saha nahur panebas papiaran tataban, manut panglokikan Prajuru Désa / Banjar Adat.
- (3) Yéning sajeroning asasih jantos ping tiga wewalungan punika mataban sakadi kecap ring ajeng, wewalungan punika wenang kaambil olih sang naban tan kéngin katebus malih, tur indiké kadi punika patut kasadokang ring Kelihan Banjar olih sang naban.

Pawos 78

- (1) Pradé wénten wewalungan ngranjing jantos ngaletihin genah suci, minakadi kahyangan, pamrajan lan sakancan ipun, risampuné kaparitas antuk prajuru sang nruwénang wewalungan inucap wenang keni déwa danda lan artha danda, agung alit ipun manut kecap sastra agama, sané kapikukuh antuk pararem.
- (2) Yéning wewalungané punika jantos ngarusak wewangunan sané sinanggeh suci, sang nruwénang wewalungané punika patut keni prabéan karusakan sané kawetuang olih wewalungané punika.

Pawos 79

- (1) Krama désa patut nyerayanin wewalungan miwah sarwa prani, tan kapatutang mademang paksi, nuba ulam lan sakancan ipun, pinaka sinalih tunggil usaha krama désa ngardi Bhutahita.
- (2) Sang mamurug kecapé ring ajeng, wenang keni danda manut pararem.

Palet 5

Indik Karesikan utawi Kabresihan

Pawos 80

- (1) Asing asing warga désa tan wenang:
 - ha. Ngembahang toya sané mawit saking badan wewalungan, paciringan, kamar mandi, pawaregan miwah sané siosan sané ngwetuang romon, bilih bilih jantos ngwetuang ambu kawon ka pakarangan anak lian miwah ka marginé.
 - na. Ngentungang luhu ka pakarangan anak lian, ka marginé, ka tlabahé miwah ka tukadé.
- (2) Sowang-sowang warga désa patut makarya paciringan, mangda kabresihan pakarangan miwah karahajengan désané prasida kapanggih.
- (3) Sang mamurug kecapé ring ajeng, patut keni pamidanda manut pararem.

Palet 6

Indik Dusta lan Bhaya

Pawos 81

- (1) Bacakan bhaya luihé: jiwa bhaya, artha bhaya, agni bhaya, toya bhaya, lindu bhaya, duracara ring agama, lan sakancan ipun sané ketah ipun kawastanin pancabhaya.
- (2) Sinalih krama sané manggihin pracihna pastika kawéntenan sahanan dusta miwah pancabhaya, patut pramangkin atur supéksa ring prajuru.
- (3) Bilih bilih kawéntenan ipun mabuat, sang sané uning ring indiké punika, patut digelis nepak kulkul banjar.
- (4) Sang manggihin kahanan jiwa bhaya, patut digelis nepak kulkul bulus.

(១) ប្រាជ្ញាបណ្ឌិតសភាសាខ្មែរ គ្រូបង្ហាញឲ្យដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងការអនុវត្តន៍នៃគោលនយោបាយនានា ដើម្បីឱ្យប្រជាជនមានជីវភាពរស់នៅបានប្រសើរឡើង។

បទប្បញ្ញត្តិ ២៥

- (ក) គណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវនានា ត្រូវមានសមាសភាព ដើម្បីឱ្យការសិក្សាស្រាវជ្រាវមានប្រសិទ្ធភាព។
- (ខ) ប្រាជ្ញាបណ្ឌិតសភាសាខ្មែរ ត្រូវមានតួនាទី ប្រកាសឲ្យដឹងពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។

បទប្បញ្ញត្តិ ២៦

- (ក) រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាឲ្យមានការចូលរួមគ្នា រវាងរដ្ឋាភិបាល និងសមាជិកសង្គម ដើម្បីឱ្យការសិក្សាស្រាវជ្រាវមានប្រសិទ្ធភាព។
- (ខ) រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាឲ្យមានការចូលរួមគ្នា រវាងរដ្ឋាភិបាល និងសមាជិកសង្គម ដើម្បីឱ្យការសិក្សាស្រាវជ្រាវមានប្រសិទ្ធភាព។
- (គ) រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាឲ្យមានការចូលរួមគ្នា រវាងរដ្ឋាភិបាល និងសមាជិកសង្គម ដើម្បីឱ្យការសិក្សាស្រាវជ្រាវមានប្រសិទ្ធភាព។
- (ឃ) រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាឲ្យមានការចូលរួមគ្នា រវាងរដ្ឋាភិបាល និងសមាជិកសង្គម ដើម្បីឱ្យការសិក្សាស្រាវជ្រាវមានប្រសិទ្ធភាព។

បទប្បញ្ញត្តិ ២៧

- (ក) សមាជិកសង្គមត្រូវមានតួនាទី ប្រកាសឲ្យដឹងពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។
- (ខ) ប្រាជ្ញាបណ្ឌិតសភាសាខ្មែរ ត្រូវមានតួនាទី ប្រកាសឲ្យដឹងពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។
- (គ) រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាឲ្យមានការចូលរួមគ្នា រវាងរដ្ឋាភិបាល និងសមាជិកសង្គម ដើម្បីឱ្យការសិក្សាស្រាវជ្រាវមានប្រសិទ្ធភាព។
- (ឃ) ប្រាជ្ញាបណ្ឌិតសភាសាខ្មែរ ត្រូវមានតួនាទី ប្រកាសឲ្យដឹងពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។

- (5) Pradé désané kahanan jiwa bhaya, krama désané patut ngaturang upacara pamahayu désa manut kecap sastra agama sané kapikukuh antuk krama, tur sang ngwetuang jiwa bhaya, katur ring sang ngawawenang.

Pawos 82

- (1) Sinalih tunggil krama désa sané kaicalan miwah kamalingan pradé pacang maseserep, patut nunas lalugrahan Prajuru Banjar.
- (2) Pradé genahé maseserep ngalangkungin banjar siosan, patut nunas lalugrahan ring Prajuru Banjaré irika.

Pawos 83

- (1) Sowang-sowang krama désa tan kapatutang mapailon ring dusta; sang kacihnan mapailon ring dusta patut katibakin danda kadi dandaning maling, sané kasulurang manut pararem.
- (2) Indik ngrereh reramon minakadi daun kelapa, ron, miwah sané siosan ring pabianan krama tiosan ri kanjekan suwung, kasulurang manut pararem.
- (3) Indik ngranjingin pakubonan utawi pakarangan krama siosan rikala suwung, mawastu raris sang maderbé pakubonan utawi pakarangan punika kaicalan, kasulurang manut pararem.
- (4) Indik ngranjingin pakubonan utawi pakarangan krama siosan rikala suwung riantukan wénten pisarat sané mabuat minakadi mapangarah miwah kabuatan sané liyanan, kasulurang manut pararem.

Pawos 84

- (1) Sahanan warga désa yan polih nuduk barang napi luihé ring wewidangan Désa Adat Dénpasar, patut atur supéksa ring prajuru banjarnia.
- (2) Prajuru banjar inucap patut nyiarang barang dedudukan punika, mangda sang nruwénang mawali ngamolihang barangnyané.
- (3) Sang mariangken patut nyihnayang angga sané ngawinang pastika munggwing barangé punika yukti-yukti padruwéannyané.
- (4) Pradé jantos tigang sasih taler tan wénten anak ngélingin barangé punika, wenang kadruwénang olih sang nuduk barangé punika.

ບູຮານສາດ
ບົດສອນການຄຸ້ມຄອງສິດທິ

ບາງບາດສຳຄັນ

- (໑) ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງສິດທິ ທີ່ເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ສາມາດສ້າງສັນ ບາງບາດສຳຄັນ ທີ່ເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ສາມາດສ້າງສັນ
- (໒) ທາງການຄຸ້ມຄອງສິດທິ ທີ່ເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ສາມາດສ້າງສັນ
- (໓) ການຄຸ້ມຄອງສິດທິ ທີ່ເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ສາມາດສ້າງສັນ ທີ່ເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ສາມາດສ້າງສັນ

ສະຫຼຸບສຳຄັນ
ບົດສອນການຄຸ້ມຄອງສິດທິ

ບູຮານສາດ
ບົດສອນການຄຸ້ມຄອງສິດທິ

ບາງບາດສຳຄັນ

- (໑) ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງສິດທິ ທີ່ເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ສາມາດສ້າງສັນ ທີ່ເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ສາມາດສ້າງສັນ
- (໒) ທາງການຄຸ້ມຄອງສິດທິ ທີ່ເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ສາມາດສ້າງສັນ
- (໓) ການຄຸ້ມຄອງສິດທິ ທີ່ເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ສາມາດສ້າງສັນ ທີ່ເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ສາມາດສ້າງສັນ

Palet 7
Indik Panyanggran Karyan Krama

Pawos 85

- (1) Sinalih tunggil krama banjar, ritatkala ngwéntenang karya suka duka, patut kasanggra antuk krama banjar jantos puput.
- (2) Tata cara panyanggra inucap ring ajeng, kasulurang manut pararem.
- (3) Sowang-sowang krama banjar sané pacang nangun karya suka duka sané mabuat, mangda masadok ring Prajuru Banjar.

Saptamas Sargah
Wicara lan Pamidanda

Palet 1
Indik Wicara

Pawos 86

- (1) Sané wenang mawosin wicara ring wewengkon Désa Adat Dénpasar, inggih punika Prajuru Désa / Bendésa miwah Kerta Désa.
- (2) Pradé sang mawicara tan cumpu ring pamutus Kerta Désa, kéngin nunasang ring Sabha Désa, lan Majelis Désa Adat, pinih untat ring Sang Rumaos (Pengadilan Negeri).
- (3) Sahanan wicara sané mawit saking kacorahan sakaluiré sané sinanggeh nungkasin daging awig-awig, paswara miwah pararem désa / banjar adat, patut digelis kabawosin olih prajuru, nénten nyantos pasadok malih.

- (4) Sajaba wicara sakadi ring ajeng, patut nyantos pasadok sang nunas bawos.
- (5) Panepasé mangda pastika nyantenang iwang patut malarapan Tripramana, inggih punika: saksi, ilikita, bukti, tur panepasé tan maren nepék ring awig-awig lan dresta.
- (6) Saluwir wicara sané nénten prasida kapuputang antuk panepas Kerta Désa, kalaturang ring Sabha Désa, Majelis Désa Adat lan Sang Maraga Guru Wisésa.

Palet 2

Indik Pamidanda

Pawos 87

- (1) Sakaluwir pakaryan désa madaging pamidanda.
- (2) Désané, wenang nibakang pamidanda ring warga désa sané sisip, kalaksanayang antuk prajuru sajeroning paruman krama désa.
- (3) Pamidanda sané katiwakang, mangda pastika nepék ring Catur Upaya Sandhi, luihé :
 - ha. Sama; krama miwah prajuru sami keni pamidanda.
 - na. Bhéda; tetiwak pamidanda wenang mabinayan manut agung alit kasisipan.
 - ca. Dana; pamidanda sané kalaksanayang madasar antuk kayun tresna asih.
 - ra. Danda; pamidanda kalaksanayang wantah matetujon ngicalang kasisipan utawi panyegjeg sajeroning ngamanggehang kasukretan désa.
- (4) Bacakan pamidanda, luihé :
 - ha. Artha danda.
 - na. Déwa danda.
 - ca. Kanorayang.

Pawos 88

- (1) Krama sané langkungan ring tigang paruman nglantur nénten nahur paturunan miwah danda, wenang katikelang ping tiga utawi karampag.
- (2) Tetibak pangrampag, nganutin tata cara sakadi ring sor puniki:
 - ha. Kalaksanayang olih prajuru, kasarengin antuk krama pinih akéh tigang diri, maka saksi.
 - na. Sang ngrampag patut madarsana rikala ngambil barang minakadi nyawénin tanem tuwuh, sané ageng pangargannyané manut ring utang sang karampag.
 - ca. Prajuru patut miteketin mangda barang-barang sané karampag digelis katebus masengker awuku, tur ring kutus rahinané pacang kalélang utawi kaadol ring ajeng krama banjar.
 - ra. Tan kéngin ngrampag saluwiring barang sané patut inggilang manut sastra agama, miwah mademang pangupajiwana sang karampag.

Pawos 89

- (1) Pradé sang pacang karampag mialangin pamargin rerampagan inucap, mawastu sampun tan nganutin linging awig-awig, krama inucap wenang kanorayang sasampuné atur supéksa ring Sang Maraga Guru Wisésa.
- (2) Pamidanda inucap ring ajeng kabawos buntas, ri sampun sang karampag punika:
 - ha. Satia wacana ngicalang laksana corah tur satinut ring pidabdab désa adat / banjar adat;
 - na. Nahur pangargan panguwak pasubaya sadaweg pacang karampag, kasaksinin olih prajuru kadulurin antuk prayascitta.

Asthamas Sargah
Nguwah Uwuhin Awig-Awig

Pawos 90

- (1) Nguwah nguwuhin awig-awig désa adat puniki, wantah kéngin kalaksanayang antuk paruman désa.
- (2) Pidabdab nguwah-nguwuhin awig-awig puniki, mangda mawit saking pakarsan krama désa, yadiastun kamedalang antuk sinalih tunggil prajuru utawi sinarengan tur kacumponin antuk pinih kedik kalih pah tiga lintang saking sang sané ngamiletin paruman.

Pawos 91

- (1) Sakaluwiring indik sané sampun wénten sadéréng awig-awig puniki kasurat, mangda kaanutang ring sadaging awig-awig puniki.
- (2) Sakaluwiring sané durung kasurat sajeroning awig-awig puniki, manawi kangkat kanggén mitegepin awig-awig puniki, pacang kasurat sajeroning pararem.

Nawamas Sargah

Samapta

Pawos 92

- (1) Awig-awig puniki kawastanin Awig-awig Désa Adat Dénpasar.
- (2) Awig-awig puniki kamargiang ngawit saking kaingkupin utawi kararemin.

Pawos 93

- (1) Awig-awig puniki kaparipurnayang lan kacumpuin ring Paruman Agung Désa Adat ring rahina Anggara Pon Merakih Úaka warsa 1943, pinanggal 1 Juni 2021, kalingga tanganin antuk Bendésa Désa Adat Dénpasar, Penua, Kerta Désa miwah olih Kelihan Banjar Sawengkonin Désa Adat Dénpasar, kasaksinin olih Pemerintah Kota Dénpasar, lan kacatet ring Pemerintah Provinsi Bali.
- (3) Luwir sang nglinggatanganin:

ha. Kapratama: Bandésa Désa Adat Dénpasar,

A. A. NGURAH RAI SUDARMA, SH.MH.

na. Kaping kalih : Penua Kerta Désa,

Wayan Pandé Sudirta, SH

ca. Kaping Tiga : Kelihan Banjar Adat

1. Kelihan Banjar Margajati,

2. Kelihan Banjar Balun,

.....

3. Kelihan Banjar Belong Gedé,

.....

4. Kelihan Banjar Belong Ménak,

.....

5. Kelihan Banjar Panti Sari,

.....

6. Kelihan Banjar Panti Gedé,

.....

7. Kelihan Banjar Gerencéng,

.....

8. Kelihan Banjar Tulangampiang,

.....

.....

៧១ ភីណិហ្គត្ត្វាតិទោទិ។

ក៧១ ភីណិហ្គត្ត្វាតិទោទិ។

.....

.....

ក៧៧ ភីណិហ្គត្ត្វាតិទោទិ។

ក៧៧ ភីណិហ្គត្ត្វាតិទោទិ។

.....

.....

ក៧៧ ភីណិហ្គត្ត្វាតិទោទិ។

ក៧៧ ភីណិហ្គត្ត្វាតិទោទិ។

.....

.....

ក៧៧ ភីណិហ្គត្ត្វាតិទោទិ។

ក៧៧ ភីណិហ្គត្ត្វាតិទោទិ។

.....

.....

ក៧៧ ភីណិហ្គត្ត្វាតិទោទិ។

ក៧៧ ភីណិហ្គត្ត្វាតិទោទិ។

.....

.....

ក៧៧ ភីណិហ្គត្ត្វាតិទោទិ។

ក៧៧ ភីណិហ្គត្ត្វាតិទោទិ។

.....

.....

ក៧៧ ភីណិហ្គត្ត្វាតិទោទិ។

ក៧៧ ភីណិហ្គត្ត្វាតិទោទិ។

.....

.....

9. Kelihan Banjar KertaJati,

.....

11. Kelihan Banjar Semila Jati,

.....

13. Kelihan Banjar KertaSari,

.....

15. Kelihan Banjar Kaliungu Kaja,

.....

17. Kelihan Banjar Umasari,

.....

19. Kelihan Banjar Lumintang,

.....

21. Kelihan Banjar Wangaya Kelod,

.....

10. Kelihan Banjar Mekar Manis,

.....

12. Kelihan Banjar Merta Yasa

.....

14. Kelihan Banjar Taensiat

.....

16. Kelihan Banjar Kalanganyar,

.....

18. Kelihan Banjar Lumbungsari,

.....

20. Kelihan Banjar Wangaya Kaja,

.....

22. Kelihan Banjar Lelangon,

.....

ក្រក្រាវ ភីលីហ្គ្រីវ ម៉ាសាឈីវ

ក្រ្រាវ ភីលីហ្គ្រីវ ម៉ាសាឈីវ

.....

.....

ក្រខ្មាវ ភីលីហ្គ្រីវ ម៉ាសាឈីវ

ក្រ្រាវ ភីលីហ្គ្រីវ ម៉ាសាឈីវ

.....

.....

ក្រស្រាវ ភីលីហ្គ្រីវ ម៉ាសាឈីវ

ក្រ្រាវ ភីលីហ្គ្រីវ ម៉ាសាឈីវ

.....

.....

ក្រដាវ ភីលីហ្គ្រីវ ម៉ាសាឈីវ

ក្រ្រាវ ភីលីហ្គ្រីវ ម៉ាសាឈីវ

.....

.....

ក្រក្រាវ ភីលីហ្គ្រីវ ម៉ាសាឈីវ

ក្រក្រាវ ភីលីហ្គ្រីវ ម៉ាសាឈីវ

.....

.....

ក្រក្រាវ ភីលីហ្គ្រីវ ម៉ាសាឈីវ

ក្រក្រាវ ភីលីហ្គ្រីវ ម៉ាសាឈីវ

.....

.....

ក្រខ្មាវ ភីលីហ្គ្រីវ ម៉ាសាឈីវ

ក្រខ្មាវ ភីលីហ្គ្រីវ ម៉ាសាឈីវ

.....

.....

23. Kelihan Banjar Mekarsari,

.....

25. Kelihan Banjar Belaluan,

.....

27. Kelihan Banjar Tengah,

.....

29. Kelihan Banjar Bun,

.....

31. Kelihan Banjar Kaliungu Kelod,

.....

33. Kelihan Banjar Tegal Sari,

.....

35. Kelihan Banjar Abianbasé,

.....

24. Kelihan Banjar Tampakgangsul,

.....

26. Kelihan Banjar Belaluan Sadmerta,

.....

28. Kelihan Banjar Pucak Sari Batu,

.....

30. Kelihan Banjar Kayumas Kelod,

.....

32. Kelihan Banjar Abasan,

.....

34. Kelihan Banjar Batu Mas.

.....

36. Kelihan Banjar Titih Kalér,

.....

ក្រយ៍ស៊ីលីហ្គ្រាម ៣១១

៣១១ ស៊ីលីហ្គ្រាម ៣១១

.....

.....

៣៧១ ស៊ីលីហ្គ្រាម ៣៧១

៣៧១ ស៊ីលីហ្គ្រាម ៣៧១

.....

.....

៣៧១ ស៊ីលីហ្គ្រាម ៣៧១

៣៧១ ស៊ីលីហ្គ្រាម ៣៧១

.....

.....

៣៧១ ស៊ីលីហ្គ្រាម ៣៧១

៣៧១ ស៊ីលីហ្គ្រាម ៣៧១

.....

.....

៣៧១ ស៊ីលីហ្គ្រាម ៣៧១

៣៧១ ស៊ីលីហ្គ្រាម ៣៧១

.....

.....

៣៧១ ស៊ីលីហ្គ្រាម ៣៧១

៣៧១ ស៊ីលីហ្គ្រាម ៣៧១

.....

.....

៣៧១ ស៊ីលីហ្គ្រាម ៣៧១

៣៧១ ស៊ីលីហ្គ្រាម ៣៧១

.....

.....

39. Kelihan Banjar Titih Tengah,

.....

41. Kelihan Banjar Gemeh

.....

43. Kelihan Banjar Pekambangan,

.....

45. Kelihan Banjar Pelita Sari,

.....

47. Kelihan Banjar Éka Sila,

.....

49. Kelihan Banjar Bumi Sari,

.....

51. Kelihan Banjar Bumi Asri,

.....

40. Kelihan Banjar Titih Kelod,

.....

42. Kelihan Banjar Suci,

.....

44. Kelihan Banjar Catur Panca,

.....

46. Kelihan Banjar Batu Bintang,

.....

48. Kelihan Banjar Bumi Santhi,

.....

50. Kelihan Banjar Sanglah,

.....

52. Kelihan Banjar Pengiasan

.....

១២៧ ភីណិហត្តក្ខន្ធាតិរាតាភិ។

១៣១ ភីណិហត្តក្ខន្ធាស្ស្ស។

.....
១២៨ ភីណិហត្តក្ខន្ធាតិមទា។

.....
១៣២ ភីណិហត្តក្ខន្ធាស្សិមិដិ។

.....
១២៩ ភីណិហត្តក្ខន្ធាតិរាតាភិ។

.....
១៣៣ ភីណិហត្តក្ខន្ធាស្សិមិដិ។

.....
១៣០ ភីណិហត្តក្ខន្ធាតិរាតាភិ។

.....
១៣៤ ភីណិហត្តក្ខន្ធាស្សិមិដិ។

.....
១៣១ ភីណិហត្តក្ខន្ធាតិរាតាភិ។

.....
១៣៥ ភីណិហត្តក្ខន្ធាស្សិមិដិ។

.....
១៣២ ភីណិហត្តក្ខន្ធាតិរាតាភិ។

.....
១៣៦ ភីណិហត្តក្ខន្ធាស្សិមិដិ។

.....
១៣៣ ភីណិហត្តក្ខន្ធាតិរាតាភិ។

.....
១៣៧ ភីណិហត្តក្ខន្ធាស្សិមិដិ។

53. Kelihan Banjar Beraban,

.....

55. Kelihan Banjar Jematang,

.....

57. Kelihan Banjar Sebelanga,

.....

59. Kelihan Banjar Tegal Balér Geria,

.....

61. Kelihan Banjar Tegal Gedé,

.....

63. Kelihan Banjar Tegal Kawan,

.....

65. Kelihan Banjar Monang Maning,

.....

54. Kelihan Banjar Sumuh,

.....

56. Kelihan Banjar Bumi Werdi,

.....

58. Kelihan Banjar Abiantegal,

.....

60. Kelihan Banjar Tegal Agung,

.....

62. Kelihan Banjar Tegal Langon,

.....

64. Kelihan Banjar Tegal Dukuh Anyar,

.....

66. Kelihan Banjar Sampingbuni,

.....

៤៧ រតិណិហត្តក្ខ័យពោធិ្យ។

.....

៤៨ រតិណិហត្តក្ខ័យព្យុបពោធិ្យ។

.....

៤៩ រតិណិហត្តក្ខ័យសង្ការិកា។

.....

៥០ រតិណិហត្តក្ខ័យធម្មិកា។

.....

៥១ រតិណិហត្តក្ខ័យបិកាហិមាធិ។

.....

៥២ រតិណិហត្តក្ខ័យបិណិមិកា។

.....

៥៣ រតិណិហត្តក្ខ័យព្យុដ្យាយុសាហ្យ។

.....

៤៨ រតិណិហត្តក្ខ័យវិទ្យុតិ។

.....

៤៩ រតិណិហត្តក្ខ័យបិសាតិកា។

.....

៥០ រតិណិហត្តក្ខ័យហិរ្យញ្ញិយុសិ។

.....

៥១ រតិណិហត្តក្ខ័យវិស្វាស្វាមិ។

.....

៥២ រតិណិហត្តក្ខ័យវិភាសិកា។

.....

៥៣ រតិណិហត្តក្ខ័យព្យុដ្យាយុសាហ្យិកា។

.....

៥៤ រតិណិហត្តក្ខ័យហិរ្យញ្ញិយុសិកា។

.....

67. Kelihan Banjar Batannyuh,

.....

69. Kelihan Banjar Buagan,

.....

71. Kelihan Banjar Sadingsari,

.....

73. Kelihan Banjar Margaya,

.....

75. Kelihan Banjar Penyaitan,

.....

77. Kelihan Banjar Pemedilan,

.....

79. Kelihan Banjar Busung Yéh Kauh,

.....

68. Kelihan Banjar Tenten,

.....

70. Kelihan Banjar Pekandelan,

.....

72. Kelihan Banjar Abiantimbul,

.....

74. Kelihan Banjar Teges Mas Jati,

.....

76. Kelihan Banjar Kerandan,

.....

78. Kelihan Banjar Busung Yéh Kangin

.....

80. Kelihan Banjar Alangkajeng Gedé,

.....

ប្រាំ៧ ឆ្នាំនៃបញ្ញត្តិព្រះបាទស្រីរាជ្យវរ្ម័នទី៧

ប្រាំ៨ ឆ្នាំនៃបញ្ញត្តិព្រះបាទស្រីរាជ្យវរ្ម័នទី៧

.....

.....

ប្រាំ៨ ឆ្នាំនៃបញ្ញត្តិព្រះបាទស្រីរាជ្យវរ្ម័នទី៧

ប្រាំ៩ ឆ្នាំនៃបញ្ញត្តិព្រះបាទស្រីរាជ្យវរ្ម័នទី៧

.....

.....

ប្រាំ៩ ឆ្នាំនៃបញ្ញត្តិព្រះបាទស្រីរាជ្យវរ្ម័នទី៧

ប្រាំ០ ឆ្នាំនៃបញ្ញត្តិព្រះបាទស្រីរាជ្យវរ្ម័នទី៧

.....

.....

ប្រាំ០ ឆ្នាំនៃបញ្ញត្តិព្រះបាទស្រីរាជ្យវរ្ម័នទី៧

ប្រាំ១ ឆ្នាំនៃបញ្ញត្តិព្រះបាទស្រីរាជ្យវរ្ម័នទី៧

.....

.....

ប្រាំ១ ឆ្នាំនៃបញ្ញត្តិព្រះបាទស្រីរាជ្យវរ្ម័នទី៧

ប្រាំ២ ឆ្នាំនៃបញ្ញត្តិព្រះបាទស្រីរាជ្យវរ្ម័នទី៧

.....

.....

ប្រាំ២ ឆ្នាំនៃបញ្ញត្តិព្រះបាទស្រីរាជ្យវរ្ម័នទី៧

ប្រាំ៣ ឆ្នាំនៃបញ្ញត្តិព្រះបាទស្រីរាជ្យវរ្ម័នទី៧

.....

.....

ប្រាំ៣ ឆ្នាំនៃបញ្ញត្តិព្រះបាទស្រីរាជ្យវរ្ម័នទី៧

ប្រាំ៤ ឆ្នាំនៃបញ្ញត្តិព្រះបាទស្រីរាជ្យវរ្ម័នទី៧

.....

.....

81. Kelihan Banjar Alangkajeng Ménak

82. Kelihan Banjar Puri

.....
83. Kelihan Banjar Pemeregan,

.....
84. Kelihan Banjar Celagi Gendong,

.....
85. Kelihan Banjar Gelogor,

.....
86. Kelihan Banjar Tegal Linggah

.....
87. Kelihan Banjar KertaPura,

.....
88. Kelihan Banjar KertaDharma,

.....
89. Kelihan Banjar Mertha Jaya,

.....
90. Kelihan Banjar Graha Shanti,

.....
91. Kelihan Banjar Manut Negara,

.....
92. Kelihan Banjar Mertha Gangga,

.....
93. Kelihan Banjar Bhuana Sari,

.....
94. Kelihan Banjar Bhuana Asri,

វេទ១ ភិណ្ឌហត្ថក្នុងឡបុគ្គល

វេទ៤ ភិណ្ឌហត្ថក្នុងបញ្ញាភិទេវ

.....

.....

វេទ៧ ភិណ្ឌហត្ថក្នុងវិទ្យាបុគ្គល

វេទ៥ ភិណ្ឌហត្ថក្នុងសាវ័ទ្យបុគ្គល

.....

.....

វេទ៧ ភិណ្ឌហត្ថក្នុងស្នេហ៍បុគ្គល

វេទ១ ភិណ្ឌហត្ថក្នុងវិទ្យាបុគ្គល

.....

.....

វេទ៧ ភិណ្ឌហត្ថក្នុងសិលាបុគ្គល

វេទ៧ ភិណ្ឌហត្ថក្នុងសត្វបុគ្គល

.....

.....

វេទ៧ ភិណ្ឌហត្ថក្នុងស្រុកបុគ្គល

វេទ៣ ភិណ្ឌហត្ថក្នុងស្នេហ៍បុគ្គល

.....

.....

វេទ១ ភិណ្ឌហត្ថក្នុងបិណ្ឌបុគ្គល

.....

95. Kelihan Banjar Muliawan

.....

97. Kelihan Banjar Tegal Wangi

.....

99. Kelihan Banjar Asta Buana

.....

101. Kelihan Banjar Cemara Agung

.....

103. Kelihan Banjar Buana Merta

.....

105. Kelihan Banjar Penamparan

.....

96. Kelihan Banjar Panca Kertha,

.....

98. Kelihan Banjar Sari Buana

.....

100. Kelihan Banjar Tegal Sari

.....

102. Kelihan Banjar Sanga Agung

.....

104. Kelihan Banjar Sapta Bumi

.....

សាសនាវិនិច្ឆ័យ
បីមិវិទ្យាសាសនាសាសនា
និបលកោសិកា

.....

ឱវេទនាបិដក
បីមិវិទ្យាប្រាសាទិកា
និបលកោសិកា

.....

ហិរញ្ញវត្ថុសាសនា :

ហិរញ្ញវត្ថុ :

មូលបត្រ ក្រុមហ៊ុន :

Kasaksinin Olih
PEMERINTAH KOTA DÉNPASAR
KEPALA BAGIAN :

.....

Murdhaning Pamikukuh
PEMERINTAH PROPINSI BALI
KEPALA BAGIAN

.....

Telah Dicatatkan:

Tanggal :

Reg.Nomor :

ក្របខណ្ឌការងារ
ប្រតិបត្តិការងារ/ទំនើបកម្មស្រុកមិចតិ
រដ្ឋបាលស្រុកស្រែក

ក) ប្រតិបត្តិការងារ : ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ខ) ប្រតិបត្តិការងារ : មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និង កសិកម្ម

គ) ប្រតិបត្តិការងារ : មន្ទីរស្ថាប័នស្រុកស្រែក និង មន្ទីរស្ថាប័នស្រុកស្រែក

ឃ) មន្ទីរ :

ក) រដ្ឋបាលស្រុកស្រែក និង មន្ទីរស្ថាប័នស្រុកស្រែក

ខ) មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និង កសិកម្ម

គ) មន្ទីរស្ថាប័នស្រុកស្រែក និង មន្ទីរស្ថាប័នស្រុកស្រែក

ឃ) មន្ទីរស្ថាប័នស្រុកស្រែក

ង) មន្ទីរស្ថាប័នស្រុកស្រែក និង មន្ទីរស្ថាប័នស្រុកស្រែក

ច) រដ្ឋបាលស្រុកស្រែក និង មន្ទីរស្ថាប័នស្រុកស្រែក

ដ) មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និង កសិកម្ម

ឆ) មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និង កសិកម្ម

ឈ) មន្ទីរស្ថាប័នស្រុកស្រែក

ក) មន្ទីរស្ថាប័នស្រុកស្រែក និង មន្ទីរស្ថាប័នស្រុកស្រែក

ក) មន្ទីរស្ថាប័នស្រុកស្រែក និង មន្ទីរស្ថាប័នស្រុកស្រែក

ក) មន្ទីរស្ថាប័នស្រុកស្រែក និង មន្ទីរស្ថាប័នស្រុកស្រែក

LEPIHAN : I
PRAWARTAKA NURÉKSA / TIM PENYUSUN AWIG-AWIG
DÉSA ADAT DÉNPASAR

1. Pangelingsir : Bendésa
2. Panua : Jro Mangku Wayan Pandé Sudirta, SH
3. Penyarikan : Anak Agung Ngurah Alit Wirakesuma, SH
4. ANGGA :
 - 1) Drs. Anak Agung Ngurah Ketut Suwéda, M.Si
 - 2) Ida Bagus Sukanta
 - 3) I Gede Rihartana, Bsc, AK
 - 4) Anak Agung Mas Putra
 - 5) I Made Putra Risnawa, ST
 - 6) Ir I Ketut Gdé Atmadja
 - 7) I Wayan Sugita, SH
 - 8) I Wayan Suwitra, SH
 - 9) I Ketut Suardana
 - 10) Anak Agung Ngurah Rai Adnyana, ST
 - 11) I Ketut Sutéja Kumara, ST
 - 12) Anak Agung Ngurah Ketut Wéda

LAMPIRAN 2

Contoh Awig-Awig

Desa Adat Tanglad

SARGA I
ARAN MIWAH WAWIDANGAN

Pawos 1

Desa Adat puniki mawasta Desa Adat Tanglad tur sampun kasurat ring lepihan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali nomor 1436.

Pawos 2

1. Desa Adat Tanglad ngawidangin kalih banjar adat, inggih punika:
 - ha. Banjar Adat Tanglad.
 - Na. Banjar Adat Julingan.
2. Wawidangan Desa Adat Tanglad mewates nyatur:
 - ha. Tepi Kangin : sisi kauh Desa Adat Pelilit.
 - na. Tepi Kauh : sisi kangin Desa Adat Anta.
 - ca. Tepi Kaler : sisi kelod Desa Adat Panca Sakti.
 - ra. Tepi Kelod : sisi kaler Desa Adat Watas.

SARGA II
PAMIKUKUH MIWAH PATITIS

Pawos 3

Desa Adat Tanglad ngemanggehang pamikukuh:

- ha. Pancasila.
- na. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia warsa 1945.
- ca. Tri Hita Karana manut ring Tatwaning Buwana Agung.
- ra. Ilikita utawi uger-uger sakeng guru wisesa mapaiketan desa adat.

Pawos 4

Desa Adat Tanglad ngamanggehang patitis:

- ha. Ngukuhang miwah ngerajegang Sang Hyang Agama.

- na. Nginggilang tata Prawertin Magama.
- ca. Ngrajegang kesukertan desa adat, warga desa saha pawongan nyane sami, sekala lan niskala.

SARGA III

SUKERTA TATA PAKRAMAN

Palet 1

Pawongan

Pawos 5

1. Krama Desa Adat Tanglad inggih punika jana sane mipil utawi kasurat ring silih tunggil bacakan Banjar Adat, Desa Adat Tanglad.
2. Warga Desa Adat Tanglad inggih punika angga kakuwuban krama Desa Adat Tanglad.
3. Tamiu inggih punika jana sateos krama lan warga sane ngranjing utawi jumenek ring wawidangan Desa Adat Tanglad.
4. Krama lan angga kakuwuban krama rauhing tamiu sane jumenek ring wawidangan Desa Adat Tanglad kabawos pawongan Desa Adat Tanglad.

Pawos 6

Manut tategenan lan kawentenan pakulawargan, krama Desa Adat Tanglad kabinayang manados:

- ha. Krama Ngarep Jangkep inggih punika krama sane kantun tegap lanang istri pakurenannia tur matetegenan weweg.

- na. Krama Bala Angkep inggih punika kalih utawi langkung anaking krama sane wenten lanang wadon nyane tur sampun antes ngamarginin ayah desa katedunang nyelosin makrama rihantuk guru rupakan nyane tan kantun. Krama puniki ngamarginin ayah-

- ayah tegep saha pamedalan seosan.
- ca. Krama Balu Angkep inggih punika krama balu luh sane kajangkepin olih pianak muanin nyane, utawi balu muani sane kajangkepin olih pianak luh nyane. Krama puniki matetegenan weweg.
 - ra. Krama Arirang inggih punika krama rauhing angga kakuwuban nyane pateh jenis kelamin. Krama puniki lepas tetegenan.
 - ka. Krama Tapukan inggih punika anaking krama sane durung antes ngamarginin ayah desa nyelosin makrama riantuk katinggal guru rupakan nyane. Krama puniki lepas sahananin tategenan.
 - da. Krama Ngempel inggih punika krama sane ngentosin ayah lan pamedalan antuk jinah. Krama kangkat ngampel prade sajangkep angga kulawarga kakuwub malinggih ring dura kabupaten utawi selat segara tur ring karang paumahan nyane kantun wenten sane jenek makrama.
 - ta. Krama Nyada inggih punika krama sane sampun mayusa 60 ngantos 69 warsa tur nenten maduwe angga kakuwuban sane antes ngamarginin ayah desa. Sahanan pamedalan katuku antuk jinah, ayah angga sarira lepas.
 - sa. Krama Nekl inggih punika krama sane sampun mayusa 70 warsa ngantos sauripa tur nenten maduwe angga kakuwuban sane antes ngamarginin ayah desa. Krama puniki lepas sahananin tategenan krama.
 - wa. Krama camput inggih punika krama sane nenten wenten ngalanturang pakraman nyane. Krama camput puniki manados tanggung jawab desa adat rauhing pagelah-gelahan nyane.
 - la. Jana sane pinaka krama salanturnyane tegteg kalanturang kapekraman nyane sajaba camput, magingsir, utawi kanorayang.

Pawos 7

Panemaya tedun makrama:

1. Krama tedun sangkaning Nyelosin kaunggang ring bacakan banjar adat risampun mawiwaha kapurusa. Patedunan kamargiang solas rahina risampun wenten tatengeran suaran kul-kul banjar adat. Ngawit patedunan puniki, bacakan sane kacelosin kapunceh. Warga sane kangkat nyelosin inggih punika, anaking krama kapurusa sane alaki rabi pinih ajeng.
2. Krama tedun anyar anaking krama soang-soang banjar adat maduwe pamargi:
 - ha. Banjar Adat Tanglad satunggil krama sane maduwe oka menek truna melarapan saseleh krama pacang katumbak. Nincap ngawentenang upacara maturan ring banjar sampun sapisanan makrama sane karampih olih guru rupakan nyane.
 - na. Banjar Adat Julingan satunggil wenten anaking krama mawiwaha kapurusa sane nenten nyelosin, molihang manumbak rikala banjar adat ngawentenang upacara ring banjar adat. Ngawit punika katedunang pinaka krama anyar.
3. Krama anyar sane mawit saking dura anaking krama, katedunang risampune negepin gaguat ring sor:
 - ha. Nyukserahang swalapatra lepas maadat ring desa adat pecak.
 - na. Naur panukun pipil manut pararem banjar adat.
 - ca. Rauh ring jeroning pasangkepan nyantenang raga.
 - ra. Ngaturang pajati tegep ring pura desa sane kaenter olih mangku pura desa.

Pawos 8

Krama wusan makrama sangkaning antuk:

- ha. Puceh utawi nyamput.
- na. Pinunas ngraga tur sampun polih wak-wakan.
- ca. Kanorayang.

Pawos 9

1. Krama wusan makrama antuk pinunas ngraga tur molihang wak-wakan, risampune:
 - ha. Nyukserahang swalapatra pajanten raga nunas wusan makrama.
 - na. Nyukserahang swalapatra tan ninggal tategenang ring desa adat sane kaembasang olih bandesa adat.
 - ca. Nyukserahang swalapatra desa adat sane nampenin madesa adat.
 - ra. Matur piuning malarapan pajati kaenter mangku ring pura desa.
 - ka. Nyukserahan swalapatra nenten nunas pah-pahan olih-olihan desa adat.
2. Krama wusan makrama antuk pinunas ngraga tur molihang wak-wakan, prade mawali malih antes katampenin makrama antuk gaguat nyukserahang swalapatra sakeng bandesa utawi prajuru adat genah makrama.
3. Krama kanorayang prade mawali makrama, antes katampenin yening tegap nginutin ngaguat makadi:
 - ha. Nunas pangampura ring jeroning paruman.
 - na. Nyukserahang swalapatra nenten mabuat piwal.
 - ca. Naur panuku jalarang kakanorayang kawewehin antuk naur panuku arta brana padruwen desa adat.
 - ka. Maupasaksi malarapan pajati sane kaenter mangku ring pura desa.

Pawos 10

1. Swadarma tamiu:
 - ha. Mapisadok majeng prajuru tan kasep ring arahina.
 - na. Naur punia manut pararem.
 - ca. Nginutin kasukertan Desa Adat Tanglad.
2. Swadikara tamiu:
 - ha. Polih pangayoman Desa Adat Tanglad.
 - na. Polih ayah-ayahan manut pabuat.
3. Krama utawi warga sane ngaraksa tamiu patut nabdabin tamiu inucap mangda tan lempas ring uger-uger desa adat.

4. Tamiu sane piwal kategenang olih warga utawi krama sane ngaraksa tamiu inucap.

Pawos 11

1. Krama utawi warga sane maduwe karya ayu utawi ala, kangkat nunas pitulung majeng krama utawi nyelang bale banjar pinaka genah makarya.
2. Krama utawi warga sane maduwe karya ayu utawi ala, kadadosang nyelang bale banjar kemawon, upakara banjar kamargiang kadi patut.
3. Krama utawi warga sane nyelang bale banjar pinaka genah makarya nenten kakenin prabeya sakemawon bale banjar mangda bersih.
4. Nyelang lan ngawaliang genah patut saha uning kelian banjar utawi prajuru banjar.

Pawos 12

Tingkahing sane kepatutang sampun dados ngayahang desa:

1. Sampun alaki rabi ngantos mayusa 70.
2. Angga kakuwuban krama sane sampun antes ngamarginin ayah. Antes tan antes katureksian olih saseleh krama.
3. Anak-anaking krama utawi angga kakuwuban sane dados ngayahang kariinin antuk pisadok krama ring jeroning paruman utawi sangkepan.

Pawos 13

1. Anak-anaking krama Desa Adat Tanglad mangda mapendidikan sanistane saundagan Pendidikan Dasar.
2. Anak-anaking krama Desa Adat Tanglad prade wenten pialang ngalanturang pendidikan sanistane saundagan Pendidikan Dasar, desa adat patut ngutsahayang.

Pawos 14

1. Pajangkepan lan pakurenan mangda ngutsahayang maduwe oka ngantos wenten Ketut.

2. Wastan pungkusan lilitan oka mangda nganutin: a.) Wayan, Gede, Putu, b.) Made, Kadek, Kade, Nengah, c.) Nyoman, Komang, d.) Ketut manut ririgan.
3. Ngembasang oka patut nginutin uger-uger guru wisesa.

Palet 2

Tata Kaprajuruan Desa Adat

Pawos 15

1. Prajuru Desa Adat Tanglad inggih punika Bandesa, Patajuh, Panyarikan, Patengen, baga soang soang adiri.
2. Bandesa Adat inggih punika krama sane pinaka pucuking krama lan warga tur kaadegang ring jeroning paruman olih krama.
3. Patajuh, Panyarikan, lan Patengen, baga kasudi olih Bandesa, kadarma tatimbangan majeng Sabha Desa lan kasumangkemin ring jeroning paruman.
4. Tata titining ngadegang bandesa lan prajuru desa adat kadasarin antuk Pararem Panuntun Ngadegang Bandesa lan Prajuru Desa Adat Tanglad.
5. Prajuru desa adat ngamargiang swadarma malarapan gilik saguluk, paras paro sarpana ya.
6. Bandesa wenang nyudi staf administrasi umum lan administrasi keuangan manut pabuat.

Pawos 16

Gagwat dados Bandesa lan Prajuru Desa Adat wiadin Klian Banjar luwire:

1. Krama marep jangkep.
2. Tan dados tulak.
3. Kaadegang ring jeroning paruman.
4. Sanistane mapendidikan pendidikan dasar.
5. Sanistane mayusa selai warsa.
6. Sadurung ngamargiang swadarma kaprajuruan patut majaya-jaya lan kakukuhang.
7. Matur piuning ring KhayanganTiga kasarengin warga desa adat kaenter mangku pura.

Pawos 17

Swadarma prajuru desa adat:

1. Ngarincikang sahananin paridabdab desa adat.
2. Ngarincikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat Tanglad.
3. Ngalaksanayang pangrencana sane sampun kasungkemin ring jeronin paruman.
4. Nginutin awig-awig utawi pararem desa adat.
5. Nepasin sahanan wicara sane mapaiketan ring Desa Adat Tanglad.
6. Maridabdabin sahananin parikrama pakraman lan agama, nganutin sastra agama miwah dresta.
7. Nyobyahang sahananin pamargin pakraman ring paruman utawi sangkepan.
8. Pinaka duta Desa Adat Tanglad, utawi Banjar Adat Tanglad pacang ngewentenang bebaos ring sapisira ugi manut pabuat.

Pawos 18

Wawenang Prajuru Desa Adat

1. Ngukuhang pangrencana sane kadabdabin olih Labda Pacingkremen Desa utawi LPD lan Baga Usaha Padruwen Desa Adat utawi BUPDA.
2. Ngukuhang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat utawi RAPBDA dados Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat utawi APBDA satunggil ngawarsa.
3. Ngawigunayang padruwen Desa Adat sajeroning ngamargiang swadarma prajuru.
4. Ngadegang lan ngararianang Pengawas, Pengurus LPD, BUPDA, lan Pacalang risampune kacumponin olih Sabha Desa.
5. Ngamargiang saseleh lan ngenterang sahananin parikrama Desa Adat.
6. Nibakang sahanan pamidanda manut pamutus paruman.
7. Ngangganin desa adat sajeroning midabdabin parilaksana hukum.
8. Ngamargiang kawenangan siosan manut awig-awig lan pararem.

Pawos 19

Wewanengan lan Ngentosin Prajuru Desa Adat:

1. Wawanengan makamiwah sengker dados Bandesa Adat, utawi Klian Banjar, luwire:
 - ha. Ngawit sakeng kakukuhang utawi majaya-jaya.
 - na. Masa ayahan mewaneng limang warsa ngawit purnama sasih kapitu ngantos malih limang warsa Purnama sasih Kapitu.
 - ca. Risampun kalih sasih pacang tugtug sengker masa ayahan, kamargiang pangadegang antuk pararem panuntun ngadegang bandesa lan prajuru desa adat Tanglad.
 - ra. Sane wawu merarian dados wenang kacalonang malih.
 - ka. Sang pecak manados bandesa utawi Klian banjar dados kaadegang malih.
2. Ngentosin Bandesa lan Prajuru Desa Adat sangkaning:
 - ha. Sampun tugtug sengker masa ayahan.
 - na. Lampus utawi seda.
 - ca. Tan prasida ngamargiang swadarman prajuru.
 - ra. Saking pinunas ngraga tur sampun kalugra olih Krama Desa Adat ring jeroning paruman.
 - ka. Konorayang.
 - da. Ngentosin prajuru patut kararemin olih krama, tur kawntenang pangilikita sane kasaksiang olih prajuru sane kapatutang.
 - ta. Bandesa utawi prajuru sane ngentosin mawaneng ngantos masa ayahan bandesa lan prajuru sane madeg.

Pawos 20

Prajuru desa adat tan patut:

- ha. Mamurug awig-awig lan pararem.
- na. Ngardi kaputusan ngarugiang krama utawi warga.
- ca. Iwang ngawigunayang swadarma lan wawenang.
- ra. Mbuat ngametuang biota.

ka. Dados angka Pengurus Organisasi Terlarang.

Pawos 21

1. Bandesa lan prajuru sane iwang sasana miwah ngalinyokang padruwen desa, piwal ring awig-awig, pararem utawi paswara tur sampun mabukti, patut kadanda nikel.
2. Bandesa lan Prajuru sane iwang manut (1) patut ngewaliang sehananing duwen Desa utawi Banjar, saha pramangkin kerarianang manados bandesa utawi prajuru desa adat.
3. Pamargin pakrama katuntun olih prajuru siosan ring sane karararianang.

Pawos 22

Petias Bandesa Adat miwah Prajuru Adat:

- ha. Tan ngamedalin seluwiring jejahitan lan reramon.
- na. Polih cenengan saluwiring duman apahan.

Pawos 23

1. Sajeroning swadarma ngamargiang pangrencana pakraman, prajuru desa kaabih olih Angka Sabha Desa.
2. Sajeroning swadarma ngamargiang panepas wicara, prajuru desa kaabih olih Kerta Desa.

Pawos 24

1. Sabha Desa kasudi olih Bandesa, ring paruman desa adat makuweh jejeag paibon soang soang adiri. Sang kasudi tan kangkat nulak.
2. Sabha Desa Adat mawiwit saking warga sane sujana lan Undagan Sabha Desa nganutin pararem.
3. Sabha Desa maweh darma tatimbang majeng prajuru desa mina kadi: ngarincikang daging awig-awig lan pararem, ngarencanaang wawangunan, ngarencanaang APBD, lan ngamargiang pawangunan desa.

4. Wawanengan sabha desa ingkup ring wawanengan masa ayahan Bandesa lan Prajuru desa.

Pawos 25

1. Kerta Desa kasudi olih Bandesa Desa Adat majeeg manut pabuat.
2. Kerta Desa mawiwit saking prajuru desa, kawewehin antuk utusan warga sane maduwe kawagedan hukum adat. Bandesa Adat pinaka pamucuk sapisan angga Kerta Desa.
3. Yening pamucuk utawi angga Kerta Desa wenten paiketan nyane risajeroning wicara, pamucuk utawi angga inucap nenten kapatutang nepasin wicara.
4. Prade pamucuk Kerta Desa kawicaraang utawi wicara mapaiketan majeng pamucuk Kerta Desa, pamucuk Kerta Desa kagentosin olih angga sane mayusa pinih lingsir.
5. Wawanengan Kerta Desa ingkup ring wawanengan masa ayahan Prajuru desa.

Pawos 26

Swadarma Kerta Desa:

- ha. Nampenin, nureksain, nepasin wicara.
- na. Nepasin wicara mangda ngutamayang kasukertan madasar antuk druwenang sareng-sareng.
- ca. Prade tan ngamolihang wiwit kadi aksara na, Kerta Desa nganutang manut daging awig-awig utawi pararem.
- ra. Prade sang keni nenten nagingin kantos waneng limolas (15) rahina, sang mawicara utawi para pihak kangkat ngarauhang majeng Majelis Desa Adat manut undagan.

Pawos 27

Prajuru desa, Sabha Desa, Kerta Desa patut polih olih-olihan manut pararem.

Pawos 28

Desa Adat Tanglad maduwe makudang-kudang paiketan, minakadi:

1. Paiketan Pemangku inggih punika pupulan warga sane sampun katambyakan pinaka mangku. Angga paiketan mangku maswadarma kukuh ngamargiang darma kapamangkuan, nincapang kaweruhan lan kawagadan indik kapamangkuan, tur mautsaha manados panuntun pamargin ajaran agama miwah sida manados tatuladan.
2. Paiketan Serati inggih punika pupulan warga sane sampun maduwe kaweruhan kalih kawagedan indik wawantenan tur sampun kacihna sampun mawinten kaseratian. Swadarma para angga ngukuhan wangun lan pamargin wawantenan manut sastra dresta kaadungan sareng dresta siosan. Para angga Serati mautsaha pinaka panuntun satunggil parikrama ngamargiang upakara, upacara manut pabuat.
3. Paiketan Wredha inggih punika pupulan warga sane sampun mayusa 60 warsa utawi langkung sane kaaturin galah lan genah nyagra kasegerogeran nyane tur kaange genah nunas piteket.
4. Pacalang inggih punika pupulan warga sane kaaturin swadarma widang kasutreptian lan kasukerten nganinin wawidangan desa rauh sadaging nyane:
 - ha. Pacalang kaadegang lan kararianang oleh Bandesa adat kadasarin antuk putusan desa adat, ring paruman Desa Adat.
 - na. Swadarma pacalang sane siosan inggih punika swadarma negara manut titah bandesa utawi prajuru siosan.
 - ca. Ring sajeroning nincapang kaweruhan, pacalang polih aguron-guron saking guru wisesa.
 - ra. Pacalang polih olih-olihan manut pararem.
 - ka. Swadarma pacalang kadabdabin nganutin tuntunan sasana pacalang.
 - da. Tuntunan sasana pacalang kamedalan olih Majelis Desa Adat.
 - ta. Masa ayahan Pacalang pateh ring masa ayahan bandesa lan prajuru.
5. Paiketan Krama Istri inggih punika pupulan istri krama lanang desa sane maswadarma ngarampih swadarma krama lanang kalih ngamargiang parikrama desa manut pabuat.

6. Pasraman inggih punika genah paajah-ajahan utawi pauruk-urukan majeng warga nganinin Tri Kerangka agama Hindu tur parilaksanaan nyane.

Pawos 29

Sekaa inggih punika pupulan warga sane kaadegang olih krama desa adat manut pabuat.

Sekaa-sekaa ring Desa Adat Tanglad:

- ha. Sekaa Gong.
- na. Yowana Desa Adat.
- ca. Sekaa Santhi.
- ra. Sekaa-sekaa siosan mapaiketan adat, agama lan budaya manut pabuat.

Pawos 30

Indik Sekaa Gong Desa Adat Tanglad:

1. Angga sekaa gong desa adat Tanglad inggih punika warga sane maduwe kaonengan nabuh.
2. Swadarma sekaa gong:
 - ha. Mautsaha waged nabuh.
 - na. Siaga satunggil wenten pamargi sane muatang sekaa gong.
 - ca. Sutrepti rikala ngamargiang swadarma.
 - ra. Inut sahananing ilikita sekaa gong.
3. Swadikara angga sekaa gong:
 - ha. Klian sekaa gong molihan peras gong sane sampun kauningan antuk lilitan.
 - na. Klian sekaa gong molihan peras gong sane sampun kauningan antuk lilitan.
 - ca. Polih panyanggra panyangu manut kawentenan.
 - ra. Nampenin kupahan: abalaganjuran utawi abarungan. Jinah kupahan : 75% ngaranjing ring kas sekaa gong, 25% ke banjar adat.
 - ka Prade piranti gong wenten kawon, prabeya katanggung banjar adat.
4. Sekaa gong Desa Adat Tanglad, kamanggala olih Klian sekaa gong tur nenten nampenin upah-upahan.

Pawos 31

Indik Yowana Desa Adat Adat:

- ha. Anak-anaking krama sane sampun mayusa 15 tiban utawi sampun ngeranjing ring SMP kelas 3 ngantos mayusa 35 warsa tur durung marabian mangde nyaluk manados angga Yowana Desa Adat.
- na. Yowana Desa Adat Tanglad mawasta Yowana Desa Adat Tanglad.
- ca. Angga Yowana Desa Adat patut ngarembe parikrama krama manut sesanan nyane lan pituduh Bandesa lan Prajuru Desa Adat.
- ra. Angga Yowana Desa Adat patut ngarembe parikrama krama manut sesanan nyane lan pituduh Bandesa lan Prajuru Desa Adat.

Pawos 32

Indik Sekaa Santi:

1. Sane manados angga Sekaa Santi inggih warga sane oneng masanthi tur siaga ngamargiang sahananin swadarma sekaa.
2. Swadarma angga sekaa santhi:
 - ha. Mautsaha weruh lan waged masanti.
 - na. Tegteg nyagra kasusilaan sekaa.
 - ca. Manados tatuladan pamargin suksaman sastra santi.
3. Swadikara:
 - ha. Kangkat ngayah manut pinunas tur molihang wak-wakan olih sang wenang.
 - na. Kasiagaang wawantenan marupa pajati asoroh.
 - ca. Polih panyangu manut kawentenan.
4. Sekaa Santhi sane wenten ring Desa Adat Tanglad mawasta Sekaa Santhi Desa Adat Tanglad.

Palet 3
Indik Paruman Lan Sangkep

Pawos 33

1. Paruman Agung Desa Adat Tanglad inggih punika parum sane kamiletin olih krama Puluk, tur mawosang tata kasukertan pawowongan rauh sadaging nyane.
2. Paruman Agung kamargiang satunggil Purnama Sasih Karo, utawi prade wenten padgata kala, parum kamargiang karihinin antuk arah olih prajuru sangkanin pituduh bandesa utawi prajuru desa.
3. Pasangkepan kamargiang ring banjar adat manut pasumangkeman.
4. Krama sane nenten nyarengin paruman utawi pasangkepan runut ping tiga antes kaparerenga. Krama inucap patut katiwakin danda manut pararem.

Pawos 34

1. Parikrama sane kainggilang ring Paruman desa inggih punika:
 - ha. Ngukuhang awig-awig.
 - na. Ngukuhang bandesa lan prajuru.
 - ca. Ngukuhang paridabdab mahautama pamargi pakraman.
2. Paridabdab mahautama madasar antuk Trihita Karana, minakadi:
 - ha. Nabdabin desa adat.
 - na. Ngarencana pawangunan desa.
 - ca. Ngamargiang paiketan pantaraning desa adat.
 - ra. Nabdabin padruwen desa adat.
 - ka. Mutusang paindikan rencana investasi ring desa adat.
 - da. Ngadegang lan nabdabin LPD.
 - ta. Nabdabin BUPDA.
 - sa. Nguwah-nguwuhin padruwen desa.
 - wa. Ngawangun sarana prasarana, adat istiadat, darma agama, dresta, seni budaya.
 - la. Nincapang kaweruhang sajeroning pasraman.
 - ma. Ngawerdiang lan ngawigunayang indik asal-usul, nilai adat, nilai agama, nilai sima, nilai seni lan budaya, miwah sane seosan manut

pabuat.

3. Prajuru desa sane nenten ngalaksanaang paruman desa manut uger-uger, paruman kengin kalaksanaang olih angga sabha desa sane mayusa pinih anom lan pinih lingsir.
4. Putusan paruman desa ngiket warga desa.

Pawos 35

Sajeroning sangkepan, Bandesa utawi Prajuru Adat patut nambyakang:

- ha. Papeson munjuk lungsuring ayah-ayahan.
- na. Pamargin panelas arta brana druwen desa.
- ca. Pamargin usaha-usaha desa sane mabuat.
- ra. Pamargin usaha-usaha desa sane mabuat.
- ka. Daging paruman miwah pasuaran-pasuaran sane mabuat.
- da. Pidabdab prajuru nganinin usaha kertin desane kapungkur miwah sane sioasan.
- ta. Nambyakang sahanan dadauhan guru wisesa.

Pawos 36

Paruman utawi Pasangkepan sida mamargi prade:

1. Risampune sang ngayahang langkung ring satenga jeeg krama.
2. Karihinin antuk suaran kulkul.
3. Pamilet mabusana adat (madestar, makwaca makerah, makampuh, mawastra malalancingan).
4. Pamilet nenten makta gagawan.
5. Tan maren ngastiti Ida Bagawan Panyarikan macihna antuk ngarihinin ngaturang banten cane ring baduur meja sane kaaturang olih bandesa.
6. Pabacakan pangrauh kamargiang sadurung ngawit paruman.
7. Sakeng ngawit rauh puput sang ngayah patut malinggih trepti, sadurung katitah kangkat matangi, sang ngayah tegteg malinggih.
8. Sahanan pinaka pamutus mangda madasar antuk dasar tan piwal ring pamargi katah tur mawesana kabecikan.

9. Prade rikala mutusang babawos tan sida antuk puluk, kaputusan antuk paswaran pinih akeh.

Pawos 37

Pamutus daging paruman utawi sangkepan kabawos rajeg risampuni kacumponin puluk utawi madasar paswaran sane akehan.

Palet 4

Indik Kukul

Pawos 38

1. Kukul inggih punika piranti malakar taru sane sampun kacumponin pinaka tatengeran satunggil wenten parikrama pakraman.
2. Kukul sane wenten ring wawidangan Desa Adat Tanglad, minekadi:
 - ha. Kukul pura.
 - na. Kukul sekaa gong.
 - ca. Kukul banjar, kukul desa.
3. Kawigunan soang-soang kukul:
 - ha. Kukul sekaa gong kaswarayang manut parikrama angga sekaa gong.
 - na. Kukul pura, keswarayang manut tatujon.
 - ca. Kukul banjar utawi desa kaswarayang rikala pacang parum, sangkep, gotong royong, ngayah, bhaya, utawi manut pabuat.

Pawos 39

Tabuh tatepakan kukul:

1. Kalih tuludan : sangkep utawi wenten patedunan krama.
2. Ngempang : cihna pamargin wali utawi nyineb.
3. Tigang klentungan alon : cihna wenten warga mawiwaha daa truna.
4. Kalih Klentungan Alon : cihna wenten warga mawiwaha daa truna sareng balu.
5. Aklentungan : cihna wenten warga mawiwaha sampun balu.
6. Bulus panjang : cihna wenten bhaya.

Pawos 40

1. Kukul patut katepak olih klian utawi sane katitah klian. Tatepakan nyane manut pabuat.
2. Warga sane katiben baya, sagelisne nunas pitulung, sepisanan nepak kukul utawi kawantu olih sang sane nangehang.
3. Sang nepak kukul piwal ring pamargi kawigunaan nepak kukul, sang nepak patut kadanda manut pararem.

Palet 5

Indik Druwen Desa

Pawos 41

Padruwen Desa Tanglad, makadi ring sor:

- ha. Kahyangan Desa:
 1. Kahyangan Tiga (Pura Desa, Pura Puseh lan Pura Dalem).
 2. Pura Prajapati.
 3. Pura Pandian.
 4. Pura Gunung Cemeng.
 5. Pura Luwah lan Pura Ahus.
- na. Gong sejangkep nia.
- ca. Bale Banjar rauhing telajakannia.
- ra. Tanah pakarangan Desa utawi tanah PKD, manut deresta sane sampun memargi kesukserahang ring krama Desa Adat Tanglad tur setinut ring daging awig-awig.
- ka. Tanah setra.
- da. Tanah Laba Pura.
- ta. Labda Pacingkreman Desa utawi LPD.
- sa. Jinah Pokok lan Tahunan.
- wa. Piranti Uperengga pura sami.
- la. Kukul.
- ma. CBD (Community Based Development).
- ga. Piranti siosan sane munggah ring ilikita Desa Adat salantur nyane.

Pawos 42

Olih-olihan Desa luire:

- ha. Olih-an laba puradruwen desa.
- na. Paica-paica saking guru wisesa.
- ca. Urunan krama.
- ra. Dana punia, aturan-aturan siosan sane patut.
- ka. Sesarin canang.
- da. Cacukuh pahan laba LPD.

Pawos 43

1. Prajuru patut ngenterang pamupon laba pura lan druwen desa.
2. Pikolih lan pamupon laba pura ngaranjing ring kas desa.
3. Tan kapatutang ngadol wiadin matiwakang druwen desa tanpa pamutus paruman utawi pasangkepan.
4. Sahanan druwen desa mangda mawali ring desa.
5. Sang ngaryanin tanah druwen desa lantur puput nyane kapuput ring jeroning pasangkepan.
6. Warga Adat Tanglad patut nitenin tur mraktiyasayang druwen Desa.
7. Sang mandung druwen desa prade mabukti keni denda manut pararem saha ngewaliang.
8. Pandung utawi maling sane tan sida kabuktiang sakala, desa adat patut ngawentenang padewasaksian manut kewentenan.

Pawos 44

Indik pamiara lan uger-uger ring setra:

1. Wawidangan setra patut kapiara olih warga Desa Adat Tanglad.
2. Tanah pangurug lan gegumuk papendeman kangkat ngawigunayang setios tanah setra.
3. Setra Desa Adat Tanglad kangkat kawigunayang olih setios warga Desa Adat Tanglad prade wenten nguwubang kadulurin antuk naur batu-batu manut pararem.

4. Ngaben nadak tan kangkat kamargiang sajabaning sang rumaga pemangku sane maduwe amongan.
5. Setios pemangku kadadosan makingsan ring geni sekirang awarsa jagi ngemargiang pitra yadnya ring Desa Adat Tanglad.
6. Ngaben masa kamargiang ring sasih karo.

Palet 6

Indik Sukertan Pamitegep

Kaping 1

Karang Lan Tegal

Pawos 46

1. Tanah pakarangan Desa utawi tanah paumahan, patut wenten ngayahang tur jumenek irika.
2. Tanah pakarangan Desa utawi tanah paumahan sane nenten kaayahang, sang ngamong keni panukun karang manut pararem.
3. Tanah pakarangan tan kangkat kapetimbang sadurung pamutus pasangkepan.
4. Karang, tegal, patut sekadi ring sor:
 - ha. Wenten watas.
 - na. Mapemedal ka rurung utawi ka margine.
 - ca. Wenang kewehin sombah, utawi pengurus toya.
 - ra. Maguna saha tan ngawinayang keduhkitan.
5. Wates karang nepi margi utawi ulu, utawi tanpa panyanding, patut kadabdabin olih sang aduwe karang, tur tan kangkat ngalahlah. Mabukti ngalahlah, patut katiwakin danda manut pararem, minakadi:
 - ha. Ngewaliang tanah sane kelahlah.
 - na. Ngewehin prabiya sekadi patut.
 - ca. Yan sane kalahlah marupa genah sane suci krama inucap keni pamidanda pangupakara manut tatacara agama.

Pawos 47

1. Krama Desa Adat sane sampun ngeraksa karang desa ndiri tan kapatutang malih nunas karang desa, ngangkep karang desa.
2. Sang nglinggihin karang desa patut ngawigunayang karang manut cacukuh.

Kaping 2

Indik Kekayonan

Pawos 48

1. Nandur tanem tuwuh mededampingan ring genah parahyangan wiadin paumahan, paembang ipun saking panyengker ka jero pinih kidik adepa agung.
2. Kakayonan sane kapitahen pacang ngerawuhang baya, kangkat katundung. Sang nundung nyiagaang prabea, sang aduwe taru muputang. Prade ngawetuang baya, katanggung olih sang aduwe taru. Utawi kapuputang antuk paigum sang nundung lan sang aduwe taru.
3. Prade tan sida ngembasan paigum, bandesa lan prajuru tedun ngarauhang panepas, tur panepas suka tan suka antas katampenin.
4. Taru sane ngawinan baya, sang aduwe taru patut mrabeanin sategepne.
5. Tan kapatutang nebtob utawi ngebah taru ageng wiadin sane kasinanggeh mabuat wigunannia manut kawerdian lingkungan, sadurung polih uwak-uwakan saking prajuru desa, manut paiguman Krama Desa Adat.
6. Krama desa patut ngamanggehang kawentenan resesikan tanem tuwuh sane ngawinang desane asri, tur lestari luire:
 - ha. Tanem tuwuh sane katandur utawi kapiara antuk desa utawi banjar.
 - na. Tetamanan desa.
 - ca. Margi utawi rurung, tlajakan.
7. Sapa sira sane ngrusak tanem tuwuh ring ajeng wilangan 5, patut keni pamidanda manut pararem.

Kaping 3

Indik Wewangunan

Pawos 49

1. Krama utawi warga Desa tan kepatutang, mekarya wewangunan nyapcap kepakarangan wewangunan anak siyos.
2. Yening pacang mekarya rurung, linggah ipun kepatutang adepa agung, adepa belah, adepa.
3. Rurung sane katangun kadasari antuk paigum sang aduwe tanah lan sang sane pacang ngawigunayang tur kasobyahang ring pasangkepan.
4. Tan kepatutang ngenahang barang padruwen, ring margi utawi rurung Desa Adat Tanglad ngantos mgemetuang pikobet ring margi.
5. Sahananing margi sane wenten ring wawengkon Desa Adat Tanglad kepatut taler polih pitulung pamiara keasrian saking krama Desa Adat Tanglad, pinaka penyanggra Krama Desa Adat marep ring Guru Wisesa, saha miara keasrian wewidangan.
6. Tan wenang ngewentenang wewangunan, sajeroning kakuwub margi.
7. Warga Desa Adat Tanglad sane pacang mapetimbang tanah patut masadok tur pastika molihang uwak-uwakan bandesa utawi prajuru.
8. Warga dura Desa Adat Tanglad sane mapatimbang tanah ring wawidangan Desa Adat Tanglad patut malarapan saha uning bandesa lan prajuru.
9. Wawangunan sane tan nganutin tata ngawangun lan tata ngawigunaang genah, jantos nyayubin bilih-bilih tembok ring telenging wates, risampun kawara tur sampun kasadokang wenang kapidanda manut pararem.
10. Nenten dados ngawangun banjar lan setra anyar ring wawidangan Desa Adat Tanglad.
11. Sang piwal sakadi inucap ring ajeng angka (1) rauh ring angka (7), patut kebaosin lan keni pamidanda manut perarem.

Pawos 50

1. Sapa sira ugi pacang ngawit makarya wawangunan suci makadi pura ring wawidangan Desa Adat Tanglad, patut polih lugraha saking desa adat sane kapastikayang antuk pararem desa adat.
2. Sapa sira ugi sane ngawigunayang palemahan padruwen negara lan palemahan padruwen desa adat sane wenten ring wawidangan Desa Adat Tanglad, tan kapatutan makarya wawangunan palinggih permanen, sajawaning sane sampun wenten sadurung awig-awig puniki kamanggehang.
3. Sang sampun medrebe palinggih permanen ring palemahan druwen negara lan palemahan padruwen desa adat matilar saking genah inucap, sahananin palinggih patut kapralina manut kecap satra agama sadurung matilar saking genah punika.
4. Sang sapa sira sane ngawangun palinggih utawii parahyangan durung polih wak-wakan paruman patut palinggih utawi parahyangan inucap kapralina manut sastra agama olih sang sane ngawangun.

Kaping 4

Indik Wewalungan

Pawos 51

1. Warga Desa Adat Tanglad sane maubuh-ubuhan, ubuh-ubuhan nyane patut kadabdabin mangda ngawinang rena.
2. Ubu-ubuhan sane ngawetuang baya, sengkala, usak utawi leteh, cemer, sang aduwe ubuh-ubuhan inucap patut nanggung prabea sang kabaya, kasengkalen, kausak, utawi ngawaliang kasucian sane kaletihin utawi kacemerin.
3. Sang sapa sira ja tan kapatutang maboros, mabedilan, ring wawidangan Desa Adat Tanglad, sajabaning sampun polih wak-wakan bandesa utawi prajuru desa, sang piwal patut kadanda manut pararem.
4. Sang sapa sira ja tan kawenang ngenahang utawi negulang ubuh-ubuhan ring:
 - ha. Wawidangan parahyangan.
 - na. Dura tegalan, carik, utawi teba.
 - ca. Wawidangan setra.

Kaping 5

Indik Bhaya

Pawos 52

1. Sakancan pabuat tan rahayu utawi sakancan sane ngawinang pikobet, duhkita, duskerta ring raga utawi jadma siosan kasinanggeh bhaya.
2. Bacakan sane kabawos bhaya, luire:
 - ha. Jiwa bhaya : kaamuk, kabaak, lan kaparikosa.
 - na. Artha bhaya : kamalingan, kabegalan.
 - ca. Geni bhaya : katunuan utawi puun.
 - ra. Toya bhaya : anyud ketiben arus.
 - ka. Bhayu bhaya : katiben linus.
 - da. Duracara agama bhaya : bhaya agama non dresta.
 - ta. Gumi bhaya : bhaya sangkanin tanah embid, tanah longsor.

Pawos 53

1. Warga desa sane katiban bhaya, mangda digelis atur supeksa majeng prajuru utawi sang wenang memaosin.
2. Warga Desa sane uning sane ngawinang baya, patut digelis atur supeksa majeng prajuru utawi Guru Wisesa.
3. Warga sane ketiban baya ageng, sang katiban baya utawi sang amangguh, wenang digelis nepak kulkul cihna baya tur atur supeksa majeng prajuru utawi sagelisne nunas pitulung.
4. Warga sane nyingak utawi mireng kulkul cihna baya patut sayaga mapitulung ngeromba saha makta gegawan, manut kewentenan baya punika, tur patut ngeromba sang keni baya manut duhkitannyane, sih dana miwah siyosan.

Pawos 54

1. Pamargi maseserep utawi ngeledahin, ritatkala wenten kemalingan, patut nunas panguak dumun majeng Prajuru utawi Klian Banjar.

2. Pamargi maseserep tios bebanjaran utawi Desa, patut polih panguak sakeng Prajuru utawi Klian Banjar wiyadin Klian Desa inucap.
3. Prajuru patut nuntun pamargin tingkah maseserep mangda nenten ngawetuang pikobet.

Pawos 55

1. Sang melaksana dusta, sang ngawinang baya sane sampun mabukti patut kadanda, tur ngalantur ngamargiang pamutus krama wasana (akibat perbuatan).
2. Prade mayanin ngrusak utawi ngemaling druwe sane kesinanggeh suci, pamidanda punika patut maweweh penyanggaskara caru utawi prayascita manut sastra agama.
3. Warga Desa Adat Tanglad mangda sumeken ngamargiang tata-titi pamargin agama manut catur dresta. Prade piwal patut kabawosin.
4. Dusta saking dura Desa Adat Tanglad, prade sida katangehan patut kasadokan majeng sang wenang tur mangda naur panuku manut wasana pabuat nyane.
5. Warga utawi tamiu sane ngumam-ngumam ring wawidangan Desa Adat Tanglad patut kadanda manut pararem.

Kaping 6

Indik Narkoba

1. Krama Desa Adat patut nyokong tur nyarengin usaha Guru Wisesa nambakin Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba;
2. Krama Desa Adat mangda pastika uning ring Narkoba, kawigunan tur bayan nyane;
3. Krama Desa Adat mangda yatna-yatna majeng jana sane nawahang Narkoba;
4. Krama Desa Adat mangda sareng-sareng nyelehin, nureksa tataneman utawi barang sane kacenidra Narkoba;
5. Krama Desa Adat mangda nyadokang jana sane kacinidra utawi sane sampun macihna maduwe, miara, nawahang, ngangge, ngadol, nyimpen, nyiagayang Narkoba majeng bendesa , prajuru desa utawi guru wisesa;

6. Krama Desa Adat utawi jana sane sampun macihna maduwe, miara, nawahang, ngangge, ngadol, nyimpen, nyiagayang Narkoba patut kapidanda;
7. Krama Desa Adat utawi jana sane sampun macihna maduwe, miara, nawahang, ngangge, ngadol, nyimpen, nyiagayang Narkoba patut nampenin danda manut Hukum Positif tur kawewehin pidanda manut pararem;
8. Krama Desa Adat sane sampun macihna maduwe, miara, nawahang, ngangge, ngadol, nyimpen, nyiagayang Narkoba kadanda antuk:
 - a. Ngangkenin pabuat maduwe, miara, nawahang, ngangge, ngadol, nyimpen, nyiagayang Narkoba ring jeroning Paruman Agung sane kasaksi oleh Guru Wisesa;
 - b. Nunas ampura majeng Krama lan guru wisesa ring jeroning Paruman Agung;
 - c. Nawur pinuku upakara pamahayu jagat manut putusan krama;
 - d. Naur danda marupa beras 10 kg saakeh krama sane munggah ring bacakan krama;
9. Krama Desa Adat sane sampun macihna maduwe, miara, nawahang, ngangge, ngadol, nyimpen, nyiagayang Narkoba tur nenten nawur danda, katibakin danda manut pamutus krama sane katuntun guru wisesa (Majelis Desa Adat);
10. Jana dura Desa Adat sane sampun macihna maduwe, miara, nawahang, ngangge, ngadol, nyimpen, nyiagayang Narkoba kadanda antuk:
 - a. Ngangkenin pabuat maduwe, miara, nawahang, ngangge, ngadol, nyimpen, nyiagayang Narkoba ring jeroning Paruman Agung sane kaanter oleh Guru Wisesa;
 - b. Nunas ampura majeng Krama lan guru wisesa ring jeroning Paruman Agung;
 - c. Nawur pinuku upakara pamahayu jagat manut putusan krama;
 - d. Naur danda marupa beras 50 kg saakeh krama sane munggah ring bacakan krama;

Pawos 56

Kaping 7

Indik Nglanjar

Pawos 57

1. Sahananin parikrama adat, agama, lan budaya sane kamargiang olih Desa Adat Tanglad tan kapatutang wenten panyanggra lanjutan tur tan kangkat wenten ngalanjar.
2. Sang mamurug kecap 1, kebaosin tur keni pamidanda manut pararem.

Kaping 8

Kotoran lan Luwu-luwu

Pawos 58

1. Warga Desa Adat Tanglad mangda tegteg miara kabersihan, kaasrian wawidangan parahyangan lan palemahan, wenten tan wenten titah sakeng bandesa utawi prajuru.
2. Krama, warga, lan tamiu sane wenten ring wawidangan Desa Adat Tanglad patut stata nyanggra kabersihan wawidangan.
3. Sahananin mis sane metu sakeng raga, wawidangan ngraga patut kadabdabin sabecik-becikne utawi kagenahan ring wadah mis sane sampun kasiaga.
4. Sahananin mis patut kapilah tur kawadah. Mis plastik mapupul mis plastik, mis don-donan mapupul mis don-donan, blah-blahan mapupul blah-blahan.
5. Warga Desa Adat Tanglad mangda matitetin ngangge plastik.
6. Soang-soang warung, penggak utawi genah mausaha patut nyiagaang genah mis manut papilahan.
7. Sahananin mis tan kapatutang kaentungang ka dura karang utawi tanah duwe, sajaba sampun maduwe genah mis sane sampun kapastika oleh desa.
8. Banyu, pamasuhan, yeh umbah-umbahan, yeh blengbeng utawi sakeluwir nyane tan kapatutang ngaromoning ka dura karang utawi tanah duwe.
9. Sang sapa sira ja tan kapatutang mabacin ring jalinjing, tegalan, utawi tukad.
10. Mis sane metu sangkaning upakara utawi upacara mangda kapuputang ring wawidangan genah ngamargiang upakara utawi upacara.

11. Sang sapa sira piwal utawi murug tan nganutin nyagra kabersihan kakeninin danda manut pabuat.

Kaping 9

Panyanggran Banjar utawi Desa

Pawos 59

1. Warga Desa Adat Tanglad sane nangun yadnya ala utawi ayu kengin nunas pitulung majeng krama utawi warga desa adat karihinin antuk wenten pisadok sakeng aduwe yadnya majeng prajuru.
2. Yadnya merupa karya kelayusekaran patut karombo olih sameton dadia.
3. Yadnya marupa pitra yadnya patut karemba olih krama Desa Adat Tanglad. Sadurung ngemargiang karya pitra yadnya kerihinin antuk paigum sang aduwe karya sareng prajuru, krama ring jeroning pasangkepan.
4. Warga utawi Krama Desa sane nunas pitulung majeng sameton dadia kengin ngaturang panyanggra saka sidan.

SARGA IV

SUKERTA TATA AGAMA

Palet 1

Indik Dewa Yadnya

Pawos 60

1. Pura Kahyangan Desa Adat Tanglad lan pujawalin nyane, inggih punika:
 - ha. Pura Kahyangan Desa:
 1. Pura Desa : Anggara Medangsia
 2. Pura Puseh (Pura Tunjuk Pusuh Sad Kahyangan Nusa Penida) :
Buda Kliwon Gumbreg.

3. Pura Dalem : Anggara Kasih Tambir.
 4. Pura Prajapati : Anggara Kasih Tambir.
 5. Pura Pandian : Tumpek Landep.
 6. Pura Gunung Cemeng : Buda Kliwon Gumbreg.
 7. Pura Luwah lan Pura Ahus : Purnama Sasih Kadasa.
2. Soang-soang Pura Kahyangan Desa Adat Tanglad kaprebealan kasanggra olih desa adat.
 3. Tawur Kesanga ring Desa Adat kamargiang ring:
 - ha. Catus Pata Agung Desa Adat : caru panca sata.
 - na. Catus Pata suang-suang Banjar Adat : caru eka sata brumbun.
 - ca. Soang-soang paumahan nganutin swalepatra edaran guru wisesa.

Pawos 61

4. Aturan marupa atos, sesangi, marupa barang mentah, punia, piranti uparengga miwah sekeluirnia patut kedruwe olih Desa Adat, kasuratang olih klian pura.

Pawos 62

Kasukertan Kahyangan:

- ha. Warga Desa Adat Tanglad utawi pamedek patut ngupadi kasukertan kalih kasucian kahyangan.
- na. Sane tan kalugra ngranjing ka pura inggih punika:
 1. Sang sebel ring raga sangkaning ngraja swala, durung 42 rahina yening ngembasang putra, sane lanang sampun lintang ring 27 rahina.
 2. Cuntaka mawit saking kalampusan manut senger.
 3. Jadma sane kasinanggeh leteh luire : Beling tan kasinangaskara, jadma buduh, sakit ila sadurung polih kaprayascita manut agama.
 4. Ubuh-ubuhan sajabaning mapaiketan ring upakara.
 5. Sang mabusana sane tan patut manut tata susila ngranjing ka pura.
 6. Makta sahanan barang sane sinanggeh leteh manut agama.

7. Sahanan sane tan kapatutang manut pararem utawi sane kabaos ngletehin.
- ca. Pratingkah sane tan kapatutang ring pura:
1. Masumpah utawi naap cor.
 2. Maujar ala, ulah ala, wak parusi, nemah utawi misuh.
 3. Majaljal, mayuda punapi malih jantos metu rah kabaos leteh.
 4. Ngagah wastra, pusungan miwah macecepin rare.
 5. Ngagah wastra, pusungan kangkat majeng sang sulinggih, pragina sane pacang ngayah.
 6. Makoratan, mabanyu, makolem lanang istri masarengan dados asiki, macumbana matemu rasa, masanggama miwah sakancannia sane siosan.
 7. Mangan nginum rauh ketaluhan, sehananing jajudian, ngelanjat.
- ra. Warga utawi pamedek mabukti ngaletihin wenang kadanda.
- ka. Kahyangan sane keni kedurmanggalaan kadi ring sor:
1. Panca kerubuhan, kesiratan rah jadma, kehanan wangke sato ageng, wangkening manusa, sehananing lulut lan simbar, mangku utawi sang sane ngemanggihin digelis nyadokang majeng Prajuru, mangda marumang krama Desa adat, pacang ngawentenang pangupakara sepatutnya, manut panugrahan ida sulinggih.
- da. Warga Desa Adat kerawuhan sane ngawinang kasinangkawonan digelis kapintonin manut pararem tur tan lempas ring sastra lan agama, maka jalaran muktiang jati tan jatinnia, yan prade tan jati wong kerawuhan inucap patut kapidanda manut pararem.

Pawos 63

Indik Pemangku

Soang-soang pura sawewengkoning Desa Adat Tanglad, patut kaadegang mangku:

1. Tata ngadegang mangku:
 - ha. Lantaran keturunan mangku, tur katuku keluarga lan kasumangkemin warga desa.

- na. Prade nenten wenten sakeng keturunan, wenang nyanjan utawi nunas bawos ring natar pura.
 - ca. Prade nenten polih sakeng nyanjan, kamargiang sasudian desa majeng warga desa.
 - ra. Prade nenten polih antuk sasudian, kangkat antuk pinunas tur molihang pasumangkeman desa.
 - ka. Kawintenin olih ida sulinggih tur kaupasaksi prajuru rauh krama desa.
2. Warga sane tan kangkat kaadegang mangku:
 - ha. Sang cedangga.
 - na. Mabukti salah laku.
 - ca. Nenten polih pasumangkeman krama desa.
 3. Sang kaadegang mangku pura risampun ngamargiang pawintenan weweg sapatut nyane, sang kaadegang mangku siaga ngamargiang swadarma kapamangkuan.
 4. Sajeroning mangku lanang ngamargiang amongan swadarma, puluk kawantu olih mangku istri lan prajuru.

Pawos 64

Swadarmaning Mangku

1. Ngutamayang ngamargiang swadarma kapamangkuan ring pura genah kaadegang.
2. Nabdabin sahanan pamargin upakara lan upacara ring pura genah kaadegang sane kaadungan majeng prajuru pura.
3. Siaga ngrombo pamargin mangku siosan manut pabuat lan kawenangan.
4. Stata siaga manados tatuladan warga desa.
5. Stata tureksa ring jeroning pura tur siaga ngarauhang sahanan sane patut karauhang majeng prajuru pura.
6. Nuntun warga desa mangda satinut majeng dresta sane kamanggehang ring pura utawi sane kamargiang sawewidangan Desa Adat Tanglad.

Pawos 65

1. Mangku Pura patut polih pangrombo mangku-mangku siosan pura inucap. Mangku-mangku dadia kangkat ngrombo prade sampun katambyakan tur sampun polih nyeracap pawintenan ring Pura Kahyangan Desa Tanglad.
2. Mangku pamucuk keni piambeng rikala galah ngamargiang swadarma pamargi yadnya, patut kagentosin manut panemaya mangku lan karauhang olih bandesa utawi prajuru.
3. Mangku sane keni ujar ala, ulah ala, patut maprayascita, sang ngeninin kadanda manut pararem.
4. Mangku sane kebuktiang amungpang paraning laku, nyasar ring sesana, tan wenang kasepuh.

Pawos 66

Petias lan olih-oli mangku luwirnia:

1. Kaping singgih manut linggih tur sesanania.
2. Polih aturan sesari sane kapupulan sakeng bakti sakesidan pamedek.
3. Pemangku Desa Kahyangan Desa patut polih punia busana kepemangkuan saparadeg sanistannya kalih warsa apisan.
4. Polih petiyas siwosan saking aturan ikrama manut pararem.
5. Luput sahanan peson-peson rauh panyilidihin nyane kadi peson-peson krama ayah ngarep.
6. Pawintenan lan papebonan katanggung desa adat.

Pawos 67

1. Mangku kagentosin, sangkaning:
 - ha. seda.
 - na. sungkan rahat.
 - ca. pinunas tur sampun polih uwak-uwakan.
 - ra. Kanorayang.
2. Mangku sane kanorayang patut kadanda tur ngawaliang pawintenan manut kawentenan.

3. Mangku ngalap rabi sangkaning rahayu, rahayu katampenin, prade lempas patut kadanda.
4. Mangku kaambil rabi, patut kaselehin tur pamutus pamargi kaanutan antuk daging saseleh.
5. Mangku sane ngarepan yadnya atiwa-tiwa patut ngamargiang nyepuh pawintenan sadurung ngamargiang swadarma kapamangkuan kadi patut.

Palet 2

Indik Rsi Yadnya

Pawos 68

1. Warga sane mapikarsa pacang nyujur padwijatian, patut ngarauhang pisadok majeng bandesa utawi prajuru Desa Adat Tanglad.
2. Bandesa utawi prajuru desa adat patut ngadungan paridabdab pamargi nyujur padwijatian.
3. Warga sane mapikarsa pacang nyujur padwijatian, tur risampun manados sang sampun madwijati patut nginutin sadaging awig-awig lan dresta sane kantun kamanggehang. Kawentenan puniki stata kauratiang warga tur prade piwal sagelis kabawosin ring jeroning paruman.
4. Sang pacang mepodgala utawi meduwijati sadurungne patut polih panugrahan saking Parisada Hindu Dharma lan kantor Agama, maka cihna pacang mepodgala inucap sampun wus ketitenin, katureksain indik sehanan kewentenan/paweruh lan pawongania tan ngelepasin kadi kecap sastra dresta, saha keweruhan manut agama lan sesana sane pacang kemargiang.
5. Prajuru patut nitenin/nureksain mungguhing kewentenan, inggihan laksana sang pacang mapodgala, mangda jati tan lepas ring kecaping Agama.
6. Yan perade lepas ring kecaping agama, prajuru wenang tan ngeraremin.
7. Risampun puput upakarania tur naben ida sampun mepica parab, prajuru patut ngawedar indik lan pamargin sang putus madwijati.
8. Sang mewinten sane pacang ngemargiang Nyonteng, Dalang, Ngusadain, patut masadok ring prajuru, prajuru wenang ngawas nitenin kewentenan tur

nyaksiang upakarania. Selanturnia prajuru wenang ngawedar indik tetujon pemargi sang melaksana, rauhing ring wates wewidangania.

9. Ida sang putus sane keadegang pinaka siwa (Guru Loka Pala Seraya), antuk Desa kepatutang kadi ring sor:
 - ha. Upakara pediksan lan pretiwan Ida riwekas kelaksanayang olih krama.
 - na. Pinaka panuntun krama Desa ring indik Tatwa lan Upakara Agama.
 - ca. Muputang upakara ring Kahyangan utawi upakara ring Krama Desa.
 - ra. Tan patut muputang upakara/yadnya, sane kantun sajeroning wicara.

Pawos 69

1. Bandesa lan Prajuru patut nuntun warga desa adat nyinggihang sang sampun maraga mekajati, madwijati, lan jana sane patut kasinggihan.
2. Warga rikala nguntap utawi nuur, utawi ngulem sang sampun maraga mekajati, madwijati, lan jana sane patut kasinggihan patut karihinin antuk atur pinunas rauh saruntutan nyane.
3. Warga sane nguntap utawi nuur, utawi ngulem sang sampun maraga maekajati, madwijati, lan jana sane patut kasinggihan, patut inut ring pamargi dresta Desa Adat Tanglad.
4. Pamargi Adat, Agama, Budaya sane antes katunasang, patut katunasang manut pabuat majeng sang sampun maraga mekajati, madwijati, lan jana sane patut kasinggihan.
5. Warga Desa Adat Tanglad patut maturan, mapunia, utawi ngamargiang darma paayah-ayahan majeng sang sampun maraga mekajati, madwijati, lan jana sane patut kasinggihan manut pabuat.

Palet 3

Indik Pitra Yadnya

Pawos 70

1. Sehanan upakara pemeretekan sang lampus kebawos Pitra Yadnya.

2. Upacara pamretekaan sang lampus, luire mersihin sawa, mendem, ngeseng sawa, atiwa-tiwa, kelanturang antuk pengeroras, rauh ngelinggihang ring pahrayangan Dewa Sang Bhatara.
3. Pemargi mendem sawa utawi ngaben ring Desa Adat Tanglad kadi ring sor:
 - ha. Mendem utawi ngaben magenah ring setra Desa Adat Tanglad, sang piwal patut kabawosin ring paruman.
 - na. Pemargi padewasan mendem katunasang majeng Jero Mangku Dalem, atiwa-tiwa kapidabdab nganutin wariga dresta, tur malarapan antuk pinunas majeng sang sulinggih pamuput.
 - ca. Warga lampus rikala eedan wali ring Kahyangan ngawit pangambilan karya wali ngantos nyineb wali, kamargiang sasuluban katanganin olih warga pasemetonan tur kamargiang sedereng endag surya utawi risampun engseb surya.

 - ra. Nenten kadadosang ngajangin mendem lan nginepang bangbang. Ngajangin inggih punika mendem sawa langkungan ring adiri ring galah arahina mabinayan galah mamargi ke setra.
 - ka. Prade wenten seda nyambung risampun wenten mapendem, pamargin pamendeman katunasang majeng Jro Mangku Dalem.
 - da. Yan mendem sawa tigang rahina rauhing seraina sadurung pujawali ring Kahyangan Tiga lan Kahyangan Desa siosan patut mamargi sasiliban (tanpa pasuaran kulkul cihna kalampusan lan kamargiang rikala sampun engseb surya utawi sadurung endag surya).
 - ta. Warga lampus rikala banjar utawi desa adat ngamargiang karya masesapuh, ngenteg linggih lan pujawali ring kahyangan desa, krama sane maduwe kalampusan patut masadok majeng bandesa utawi prajuru desa tur kangkat mendem sasiliban, pamargine lintang ring sandikala utawi sadurung endag surya.
 - sa. Warga sane sampun katambyakan mangku prade seda tan kangkat

kapendem, pamargine patut kaplebonang, sane kasanggra olih sang ngadegang pinaka mangku.

Pawos 71

1. Sang lampus sangkanin salah pati, ulah pati, pamretekan nyane pateh makadi sang lampus biasa. Paweweh nyane wantah wenten wawantenan pangulap ring genah kalampusan utawi manut kawentenan.
2. Sang lampus ngadut bobotan kapendem risampun embas bobotan nyane. Ngembasang bobotan kangkat katanganin antuk pabuat medis.
3. Warga sane lampus sangkaning pinungkan pacang nularin, paridabdab nyane mangda nganutin sang wenang.
4. Sang lampus sadurung embas utawi wawu embas patut kapendem pramengkin.
5. Warga sane lampus ring genah tan patut, sang maduwe kapatutan patut maridabdabin genah kalampusan manut pituduh sang wenang sane kadabdabin olih bandesa utawi prajuru desa adat.
6. Tamiu lampus ring wawidangan Desa Adat Tanglad patut kasukserahang majeng guru wisesa tur sang maduwe kapatutan patut mapiadung majeng Bandesa lan Prajuru Desa Adat. Prade nenten wenten ngangkenin, upakara sapatut nyane kasanggra Desa Adat Tanglad.
7. Tamiu kadadosang ngamargiang upacara Pitra Yadnya ring wawidangan Desa Adat Tanglad prade wenten nyarengan sakeng warga Desa Adat Tanglad.

Pawos 72

Swadarmaning warga ritatkala katiben kelayuan:

1. Gelis mapisadok majeng Bandesa utawi Prajuru Desa Adat mangda molihang pamargi ngalantur 2. Prajuru Adat patut maritatas pemargin sang kelayuan manut kewentenanian, tur nyuarayang kulkul cihna kalayuan manut tatujon.
2. Pasemetonan patut ngremba sang kalayuan sane kadabdabin olih prajuru.
3. Sarwa prateka nabdabin sawa patut kamargiang banban, sutrepti, kadulurin pangrastiti olih warga. Sang murug wenang kadanda manut daging sangkepan.

Pawos 73

1. Sawa sane dados kaabenang inggih punika sawa sane sanistane sampun mayusa apupak.
2. Sawa sane ring soring apupak kaupakara antuk:
 - ha. Ngwarak karuron: karuron durung marupa.
 - na. Nglangkir: sampun marupa durung embas sampun lampus.
 - ca. Nglungah: sampun embas tur durung ketus untu utawi durung apupak.
 - ra. Rupa upakara ring ajeng kapastika olih Ida Sulinggih malarapan antuk pinunas.

Pawos 74

Dudonan nangun yadnya atiwa-tiwa:

- ha. Paigum adung pangrencana olih sang aduwe karya sareng bandesa lan prajuru.
- na. Mutusang adung pangrencana olih sang aduwe karya sareng bandesa lan prajuru.
- ca. Ngamargiang pangrencana manut daging pangrencana.
- ra. Ngarauhang pertanggungjawaban olih sang aduwe karya majeng warga.

i

ka. Ngamargiang saseleh sajeroning nincapang pamargi salantur nyane.

Pawos 75

1. Atiwa-tiwa ring Desa Adat Tanglad kamargiang antuk ngerit (ngamasa kinambulan).
2. Atiwa-tiwa ngerit kamargiang nemuning sasih karo manut kawentenan, antuk pakeling nenten kadadosang sawa kapendem langkungan ring 5 warsa.
3. Atiwa-tiwa ngerit kamargiang kinembulan ring Desa Adat Tanglad.
4. Rikala ngamargiang Atiwa-tiwa ngerit kinembulan, tan kadadosang wenten ngamargiang niri.
5. Atiwa-tiwa kamargiang manut paigum tunggal dewasa, tunggal genah, tunggal pamuput miwah tunggal pamargi.

Pawos 76

1. Rikala ngaben masa nenten kadadosang ngarauhang panyanggra marupa lanjutan, sane siosan mamargi manut kawentenan.

Pawos 77

1. Rikala atiwa-tiwa masa, pakaryan kramane kadi ring sor:
 - ha. Makarya uparengga atiwa-tiwa.
 - na. Ngamong sapula-pali upakara.
 - ca. Ngawantu rikala ngebet.
 - ra. Nabdabin tatakan api sategep nyane.
 - ka. Nyandang uparengga, eteh-ete upakara ring puncak ngaben, ngantos puput nganyut.
 - da. Mangda sami eedan pamargi yadnya antar, eedan yadnya kadabdabin antuk paigum sang aduwe yadnya sareng prajuru desa.
2. Tigang rahina risampun ngamargiang ngaben, sang nangun yadnya patut:
 - ha. Ngamargiang pacaruan panca sata magenah ring:
 1. Payadnyan.
 2. Tengahing wawidangan setra.

3. Rompok genah ngamargiang eteh-ete pangabenan.
- Na. Ngemargiang pacaruan eka sata brumbun:
1. Pempatan Desa Adat Tanglad.
 2. Ring soang-soang pura kahyangan desa.
 3. Ring soang-soang pura dadia anangun karya.
 4. Soang-soang paumahan anangun karya.

Pawos 78

1. Warga sane cuntaka tan kadadosang ngamiletin parikrama suci.
2. Sang kahanan cuntaka:
 - ha. Sebel raga: cuntaka ngantos puput tur kacihna sampun mabersih.
 - na. Karuron : cuntaka ngantos 42 rahina, sane lanang 27 rahina.
 - ca. Kalampusan : cuntaka warga jeroning karang ngantos 11 rahina.
 - ra. Nganten : cuntaka ngantos lingtang atigang rahina.
 - ka. Maduwe oka : sane istri cuntaka ngantos 42 rahina sane lanang cuntaka ngantos 27 rahina.
3. Sane tan keni lan tan ngenen cuntaka inggih punika warga sane sampun madwijati lan sane sampun maekajati manados mangku sane kaadegang Olih Dadia/Paibon, Banjar Adat lan Desa Adat Tanglad.

Palet 4

Indik Manusa Yadnya

Pawos 79

1. Manusa yadnya inggih punika upacara/upakara darmaning manusa ngawit saking petemuning kama bang kelawan kama petak, sejeroning garba wadaning ibu, jantos lampus riwekas.
2. Upacara/upakara manusa yadnya:
 - ha. Magedong-gedongan.
 - na. Kepus puser utawi lepas awon.
 - ca. Tugtug kambuhan.
 - ra. Telubulanan/asambutan.
 - ka. Otonan.
 - da. Makutang bok.
 - ta. Raja singa/raja swala.
 - sa. Matatah.
 - wa. Masakapan.
 - la. Mabayuh.
3. Upacara/upakara manusa yadnya mangda nganutin dresta Desa Adat Tanglad.

Palet 5

Indik Buta Yadnya

Pawos 80

1. Bhuta yadnya inggih punika upacara-upacara pabiyakalaan ring ibu pertiwi lan kahyangan, sarwa prani miwah ring sarwa bhuta.
2. Upacara-upacara pabiyakalaan ring sarwa prani inggih punika:
 - ha. Upakara majeng entik-entikan utawi punyan-punyanan nemuning Tumpek Pengarah utawi tumpek Pengatag (Saniscara Kliwon Wariga).
 - na. Upacara majeng ubuh-ubuhan nemuning Tumpek Kuningan.

3. Upacara-upacara pabiyakalaan ring Ibu Pertiwi miwah kahyangan lan ring sarwa bhuta kawastanin macaru. Pecaruan inucap minakadi pacaruan:
 - ha. Ekasata.
 - na. Pancasata.
 - ca. Rsigana.
 - ra. Pancasanak.
 - ka. Pancakelud.
 - da. Balik sumpah.
 - ta. Tawur Agung utawi Malabuh Gentuh.

4. Pamargin Upacara pacaruan inucap ring ajeng (3) nganutin kecaping agama, pemargine nganutin dresta Desa Adat Tanglad tur pamutus Ida sulinggih sane kaangkenin Desa Adat Tanglad.

Pawos 81

Upacara Tawur kesanga patut kelaksanayang kadi ring sor:

1. Ring Catuspata Desa Adat Tanglad (pusering wawidangan Desa Adat Tanglad), kewentenang pecaruan jagat, pengambilannya panca sata.
2. Ring soang-soang paumahan, nganutin tetiwak guru wisesa.
3. Nyoreang ngewentenang pengerupukan mebuu-buu, tur kapidabdab olih prajuru.
4. Ring rahina penyepian patut ngemargiang brata penyepian sekadi:
 - ha. Amati geni.
 - na. Amati karya.
 - ca. Amati lelungan.
 - ra. Amati lelangon.
5. Sane murug brata penyepian patut keni pamidanda manut perarem sejawaning sane polih lelugrahan manut wigunania kalih kekobetannia, saha lingga tangan saking prajuru.

6. Ring rahina pangembak geni, mapiteges pangelukatan beratha sekadi, soang-soang krama patut nunas pengaksama ring kadangnia, lan makacihna pangawit dewasa Isaka Warsa.
7. Sehananing brata penyepian, sane ketitenin olih Prajuru patut kamargiang olih pecalang.

Pawos 82

Pacaruan Nangluk Merana

1. Pacaruan Nangluk Merana kamargiang satunggil tilem sasih kanem.
2. Wawanten ring soang-soang manut tetiwak guru wisesa.

SARGA V

SUKERTA TATA PAWONGAN

Palet 1
Indik Pawiwahan

Pawos 83

1. Pawiwahan inggih punika, paiketan anak lanang kalawan anak istri malarapan antuk adung tresna tur sampun tegep nampenin tri upasaksi (manusa saksi, butha saksi, widhi saksi) miwah kailikitaang manut ilikita guru wisesa.
2. Pidabdab pawiwahan ring Desa Adat Tanglad, ngemanggehang kapurusan, sang purusa sane ngalap rabi tur kapaumahang ring sang kapurusa.
3. Rupa pawiwahan:
 - ha. Pawiwahan lumrah: pawiwahan sang lanang rumaga purusa.
 - na. Pawiwahan nyantana/nyeburin: pawiwahan sang istri rumaga purusa.
4. Paridabdab pawiwahan:
 - ha. Pepadikan: sangkulawarga purusa madarma suaka majeng sang kulawarga pradana. Pamargine:
 1. Nyedek : sang pacang mawiwaha kapurusa kasarengin guru rupakan nyane matemuwirasa majeng sang pacang mawiwaha kapradana kasarengin guru rupakan nyane.
 2. Maplaku : sang pacang mawiwaha kapurusa sane kasarengin guru rupakan nyane rauhing pasemetonan guru rupaka matemu wirasa majeng sang pacang mawiwaha kapradana kasarengin guru rupaka rauhing pasemetonan guru rupakan nyane.
 3. Amet-pinet : sang pacang mawiwaha kapurusa ngambil sang pacang mawiwaha kapradana sane katodia olih pasemetonan utawi krama tur kaupasaksi antuk triupasaksi.
 - na. Ngerangkat : sang purusa antuk sasiliban ngambil sang pradana. Salanturnyane, kulawarga sang purusa ngamargiang:
 1. Nyedek : Utusan sang kapurusa malarapan swalapatra pajanten sakeng sang mawiwaha masadu ajeng majeng guru rupaka sang kapradana sane karampih olih manggala dinas kapradana. Rikala puniki kamargiang adung babawos pamargi salantur nyane.

2. Maplaku : pasemetonan sang kapurusa matemu wirasa majeng pasemetonan sang kaparadana ngindikang pamargin pawiwahan.
3. Maupasaksi : sang mawiwaha sane karampih olih pasemetonan sang kapurusa tur katodia manggala adat lan dinas matemu wirasa majeng pasemetonan lan manggala adat lan dinas pasemetonan kapradana.
5. Warga kapurusa prade ngambil kapradana seos agama pamargi kaanutang manut kawentenan. Sang pradana patut masudawadani malarapan manah ngraga. Prade nenten masudawadani tan patut kasarengan ngamargiang eedan pamargin pawidiwidanan. Sane mawidiwidana wantah sang purusa.
6. Warga kapradana prade kaambil olih seos agama tegteg ngamargiang pamargin adat/awig-awig.

Pawos 84

1. Sang kaicalan warga patut digelis masadok ring Klian, nunas pamitulung pacang maseserep.
2. Klian ngenterang pemargine maseserep, tur mangda nganutin tata kramaning desa.
3. Paseserep patut sampun polih wakwakan prajuru.

Pawos 85

1. Warga mawiwaha kangkat ngamaduang prade malarapan pamargi rahayu tegteg molihang upasaksi bandesa utawi prajuru, prade lempas patut kadanda manut pararem.
2. Warga sane mawiwaha tan rahayu utawi kantun kawicaraang, wicara patut kabuntasang, wawu molihang upasaksi.
3. Jadma deha mobot, utawi sang majangkepan mobot keni cenidra, utawi sang balu luh mobot sadurung wenten ngangkenin patut digelis kadabdabin Bandesa, tur digelis karerehang pamunceh pamargi.

Palet 2

Indik Nyapihan

Pawos 86

1. Sang palas merabian tur sampun kailikitaang kebawos nyapihan.
2. Sang kabawos nyapihan risampune maduwe akta perceraian.
3. Sang palas marabian yadiastun sampun kadabdabin olih kulawarga lan parajuru nenten taler sida masikian, dados nyapihan malarapan swalapatra pajanten kawewehin saha uning manggala adat lan dinas purusa pradana.

Pawos 87

1. Sang nyapihan adung mawali alaki rabi utawi masomahan patut naur danda manut pararem tur pamargine nginutin makadi pawiwahan anyar.
2. Sang nyapihan prade katangehan matemu wirasa kadanda manut pararem.

Pawos 88

1. Balu luh katinggal muanin nyane utawi balu sane pecak nyeburin, patut ngemargiang swadarma kadi ring sor:
 - ha. Ngemanggehang kepatibratan.
 - na. Ngemarginin ayah krama manut pamargi.

 - ca. Ngeraksa, nguasayang, lan miara warisan lan sentanan nyane.
 - ra. Tan dados ngadol warisan sedurung polih wakwakan saking kulawargan sang lanang.
 - ka. Kawenang mawiwaha sangkaning rahayu.
2. Balu sane tan pageh ring swadarma, luwire:
 - ha. Matingkah dretikrama, miwah salah solah sane siwosan.
 - na. Matilar tan pasadok.
 - ca. Lempas ring swadarmaning balu, utawi salah prawerti.
3. Balu sane tan pageh wenang katundung saha tan polih pahpahan waris.
4. Balu tan pasentana, prade kawaliang olih wargania kapurusa, utawi sangkaning pinunas rahayu patut polih pahpahan paguna kaya.

Palet 3

Indik Sentana

Pawos 89

1. Sentana inggih punika sang panglantur swadarma swadikara.
2. Sentana kepeah manados:
 - ha. Preti sentana/sentana rajeg : katurunan buah basang sang makurenan.
 - na. Sentana peperasan : panglantur swadarma lan swadikara pakurenan sangkaning ngidih manut paridabdab.

Pawos 90

Paridabdab ngidih sentana:

1. Sane patut kaperas anggen sentana, kadi ring sor:
 - ha. Sang keperas megama Hindu.
 - na. Sakeng waris pancer kapurusa.
 - ca. Mawiwit saking keluarga tunggal sanggah utawi merajan, paibon, lan dadia.
 - ra. Yening tan wenten utawi tan polih paadung saking pancer kepurusa, kengin mawiwit saking keluarga sapa sire ugi.
 - ka. Sang kaperas tan langkungan saking yusa lima warsa.
2. Paperasan sinanggeh puput, macihna:
 - ha. Sampun ngamargiang pawidhi-widhanaan paperasan.
 - na. Kaupasaksi manggala adat lan dinas, saha katambyakan ring paruman.
 - ca. Maduwe ilakita.

Palet 4

Indik Warisan

Pawos 91

1. Warisan inggih punika tetamian arta brana, saha ayah-ayahan ngupadi sukerta sekala niskala saking kaluhurannya, marep ring turunannya.
2. Sane kaucap warisan luwire:

- ha. Duwe tengah, karang paumahan, pemerajan.
 - na. Pegunakayan, tatadan, jiwadana, lan utang piutang.
3. Wawu kengin kebawos waris, inggih punika:
 - ha. Wenten sang mapiturun warisan.
 - na. Wenten turunannya, ahli waris.
 - ca. Wenten arta brana miwah tetegenan utawi ayah-ayahan merupa warisan.
 4. Sane kebawos ahli waris, inggih punika:
 - ha. Preti sentana lanang.
 - na. Sentana rajeg.
 - ca. Sentana peperasan lanang utawi wadon.
 5. Prade tan wenten sekadi ring ajeng, kang sinanggeh ahli waris:
 - ha. Turun purusa pernah ngunggahang, sekadi rerama dia, rerama dimisan, rerahe dimindon.
 - na. Turun purusa pernah kesamping, mekadi ponakan, misan, mindon.
 - ca. Prade campur, tan wenten ngelingin, upakarania kemargiang olih krama. Druwenyane kaambil Banjar.

Pawos 92

1. Swadarmaning ahli waris patut nerima saha ngusahayang tetamian ayah-ayahan saking keluhuranne mekadi ngerempon sanggah, pura dadia, pura kahyangan, saha pekarangannya.
2. Ngabenang sang ngewarisang saha ngelanturang upakara pitra yadnya sepatutnya.
3. Naurin utang-utang sang ngewarisang pamekas utang ring desa wiadin ring pura lan utang-utang sane siwosan.

Pawos 93

1. Pengepahan warisan kangkat kemargiang sekadi sor:
 - ha. Risampun ngelaksanayang pitra yadnya lan utang piutang sang ngewarisang sampun buntas ketawur.

- na. Warisan sangkaning arta brana paguna kayan kaepah pada.
 - ca. Karang ayahan desa kaemong antuk ahli waris kang sinanggeh pinih marep.
2. Sinalih tunggil ahli waris ring ajeng, tan polih pahpahan wewarisan prade ipun:
 - ha. Alpaka guru rupaka, utawi guru swadiyaya.
 - na. Merupa sentana rajeg, sane sampun kesah mewiwaha malih.
 - ca. Merupa sentana lanang, sane mewiwaha nyeburin kepekurenan lian.
 3. Sentana ahli waris sane nilar Agama Hindu, keangkat polih pahpahan waris paguna kayan kemaon, ten pisan kangkat ngambil karang ayahan desa.
 4. Yening wenten sentana luh ngelaksanayang lokikasanggaha (nyilih polah) mewastu madrebe pianak kewastanin sentana alpaka guru.
 5. Yan anak ipun keakuin ring penglingsirnya, kengin pianak punika ngewaris paguna kayan reramane luh kemawon.
 6. Sane kangkat ngewaris paguna kayan:
 - ha. Balu luh.
 - na. Balu muani sane mawit saking mawiwaha nyeburin.
 - ca. Sang mulih deha, seantukan ring pawiwahane dumun sampun kaucap ninggal kedaton.
 7. Sekantune maurip ipengelingsir kangkat ngewehin jiwa dana tatadan, utawi bekel maka cihna paweweh ring pianake sane mawiwaha.

Pawos 94

Prade sejeroning keluarga wenten ahli waris langkung ring adiri, patut:

- ha. Kawentenang paigum indik pedum waris inucap.
- na. Yening tan presida katunasang tatimbang ring Bandesa.
- ca. Prade tan wenten taler nganutin ring penepas Bandesa, kengin nunasang ring sang wenang rumawos.

Pawos 95

Karang ayahan desa kaputungan ahli waris patut kaparidabdab desa adat, prade tegteg nenten wenten kayun ngalinggihin, karang inucap mawali ka desa.

SARGA VI
WICARA LAN PAMIDANDA

Palet 1
Indik Wicara

Pawos 96

1. Sane patut mutusang pamunceh wicara ring Desa Adat Tanglad, inggih punika Prajuru Desa Adat ring jeroning sangkepan utawi paruman.
2. Pamutus pamunceh wicara mangda nganutin daging awig-awig, petitis lan pamikukuh Desa Adat Tanglad, lan ilikita guru wisesa sane paiketan nyane.
3. Satunggil wenten wicara, wicara karerehang pamunceh olih bandesa lan prajuru karampih olih kertha desa. Pamutus pamunceh wicara tegteg ring jeroning sangkepan utawi paruman. Prade indik wicara tan prasida molihang pamutus olih Prajuru Desa Adat, patut wicara punika katur ring Kerta desa.
4. Prade nenten molihang pamutus wicara, wicara katunasang pamunceh ka MDA manut undagan.

Pawos 97

1. Sehananing wicara sane mapaiketan ring agama, adat, patut kebawosin olih Prajuru Desa Adat sane karampih Kertha Desa, tur keni pamidanda manut pararem.
2. Malih yan wenten sinalih tunggil krama Desa Adat Tanglad mewicara nyewenggara wiadin ngawentenang bawos kawon, ngemetuang manah sungsut ring anak siwos patut digelis kebawosin olih klian Banjar utawi Bandesa Adat.
3. Pamutus patut pastika, nyantenang kaiwangannya utawi lempas ring daging awig-awig Desa Adat Tanglad.

Palet 2
Indik Pamidanda

Pawos 98

1. Desa Adat Tanglad, wenang nibakang pamidanda majeng warga sane sampun mabukti lempas ring daging awig-awig.
2. Pamidana katiwakang oleh bandesa utawi prajuru ring jeroning sangkepan utawi paruman. Indik petetiwak pamidanda patut kelaksanayang olih Prajuru Desa Adat Tanglad.
3. Bacakan Pamidanda:
 - ha. Panca pamidanda:
 1. Tulak minci, manut pararem.
 2. Pangererenga, manut pangelokika pekaryan.
 3. Melencerin, manut sekadi dosan mekarya apisan.
 4. Penyagsag wirasa, manut pemargi dedosan mekarya pang kalih.
 5. Anrugada Klian keni danda manut pararem.
 - na. Pamidanda siwosan:
 1. Ayah-ayahan penukun kasisipang.
 2. Denda arta (dedosan saha panikel-nikelan nya, utawi panikel paturunan).
 3. Pangupakara lan pengaskara.
 4. Rerampagan (melelang).
 5. Ngewaliang tanah karang desa.
 6. Kasepekang.
 7. Kanorayang.
 - ca. Agung alit pamidanda manut daging pamutus paparuman.
4. Jinah utawi rajabrana saking pamidanda manados druwen Banjar Adat utawi Desa Adat Tanglad.

Pawos 99

1. Krama Desa Adat Tanglad tan nawur paturunan, paputran utawi dedosan risampune rauh panemayannia pacang nawur, patut keni panikel manut pararem.

Pawos 100

1. Warga desa sane ngeseng (nenten pitra yadnya) utawi mendem sawa sateos ring setra desa, warga inucap keni pamidanda manut pararem saha nglaksanayang pamarisudha desa manut pituduh sang ngawiwenang tur sawa inucap kaanutang genahne.
2. Warga sang rumaga putus utawi sampun madwijati, pitra yadnyan nyane kamargiang manut dresta, prade piwal patut kabawosin.
3. Warga sane makarya bangbang pacang nandur kekayon kirang ring adepa agung patut keni pamidanda manut pararem saha pramangkin ngurug bangbang.
4. Warga sane ngutang luwu, wangken wawalungan miwah kotoran sane siosan ring margi agung, got miwah genah sane tan manut, kapidanda manut pararem.
5. Sahananing sane kausak olih wong edan, sahananing sane kausak inucap patut kategenang manut pabuat olih kapatutan sang wong edan.
6. Warga utawi tamiu sane marebat ring wawidangan Desa Adat Tanglad wenang kadanda manut pararem.
7. Warga utawi tamiu sane ngamuk ring wawidangan Desa Adat Tanglad wenang kadanda manut pararem.
8. Warga sane cuntaka yening ngranjing ke pura patut keni pamidanda manut pararem, saha panyapuhan pamrayascita.
9. Warga utawi tamiu sane masang pangalah dewa, mendem sahanan rarempon sarwa leteh ring pura patut keni pamidanda manut pararem saha ngwentenang panyapuhan.
10. Tamiu sane madunungan ring wawidangan Desa Adat Tanglad sang nampi patut masadok majeng prajuru. Yening tan masadok, napi mapih tamiu punika kasinanggeh dusta, sang nampi tamiu keni pamidanda manut pararem. Warga Desa Adat Tanglad. Sang malaksana keni pamidanda manut pararem.
11. Warga Desa Adat Tanglad sane manggihin sang piwal ring awig-awig, prade tan nyadokang, warga inucap patut keni pamidanda.
12. Sahanan pamidanda patut ngangge gaguat utawi uger-uger manut pararem.

SARGA VII
NGUWAH-NGUWUHIN AWIG-AWIG

Pawos 101

1. Nguwah kalih nguwuhin awig-awig patut kelaksanayang antuk Paruman Krama Desa Adat Tanglad.
2. Perareman inucap patut malarapan gilik saguluk perarem Krama Desa Adat Tanglad.
3. Pamutus bebawosan presida yan sampun keramane gilik saguluk utawi kengin mejalaran pasuaran (wewilangan suara).
4. Mejararan antuk wewilangan suara, geguatnya sekadi ring sor:
 - ha. Krama Desa sanistanya apahan, lintang asiki.

SARGA VIII

PAMUPUT

Pawos 102

1. Awig-awig puniki kewastanin, Awig-awig Desa Adat Tanglad.
2. Awig-awig puniki kemargiang ngawit saking keraremin olih Krama Desa Adat Tanglad.
3. Awig-awig Desa Adat Tanglad puniki manggeh kalih kelaksanayang wewidangan warga lan Desa Adat Tanglad.
4. Awig-awig Desa Adat puniki nganinin sahanan warga lan krama Desa Adat Tanglad, lan sehanan sane kekuwub antuk Desa Adat Tanglad.

PAWOS 103

Saluiring pamargi pakraman sane durung kabawos utawi durung munggah ring sajeroning awig-awig puniki, manggeh kelaksanayang manut tata cara sane sampun ketah memargi, kedulurin antuk pasuaran/pararem.

PAWOS 104

1. Awig-awig puniki kalinggatanganin olih Bandesa ngangganin warga Desa Adat Tanglad.
2. Awig-awig puniki kasurat, kararemin tur kamanggehang duk rahina..... panglong ping sasih....., Icaka..... tanggal masehi , ring Desa Adat Tanglad
3. Luir sang sane ngalingga tanganin:
 - ha. Krama Desa Adat Tanglad manut bacakan kasurat ring lepihan.
 - na. Prajuru Desa Adat Tanglad:

Bandesa Desa Adat Tanglad,

Panyarikan Desa Adat Tanglad,

Ngurah Alit Parnawa

I Gede Purwa Adnyana

Patajuh Desa Adat Tanglad,

Petengen Desa Adat Tanglad,

I Wayan Dastra

Gede Ngurah Mambal

ca. Kemanggehang lan kasurat :

Tanggal :

Reg. Nomor :

Bupati Klungkung,

I Nyoman Suwirta

